

Abdul Qodir

Percikan

Pemikiran Manajemen
dan Pendidikan Islam

Kata Pengantar:
Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A.
Editor:
Suhari, S.Pd.





**PERCIKAN PEMIKIRAN
MANAJEMEN
DAN PENDIDIKAN ISLAM**

Kutipan Pasal 44 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA:

Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Abdul Qodir

PERCIKAN PEMIKIRAN MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM

Editor:

Suhari, S.Pd.

Kata Pengantar:

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A.

[Guru Besar Bidang Pendidikan Islam
dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang]



Interpena

Perpustakaan Nasional: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Qodir, Abdul

Percikan Pemikiran Manajemen dan Pendidikan Islam / Abdul Qodir

----- Yogyakarta: Interpena, 2012

xxxiv + 262 hlm, 14 X 21 cm

ISBN: 979-1740-21-6

1. Pendidikan

I. Judul

2. Manajemen

II. Penulis

Percikan Pemikiran Manajemen dan Pendidikan Islam

Karya: Abdul Qodir

Tata Letak: Muh. Zuhair Zahid

Tata Sampul: Intermata Design

Editor: Suhari, S.Pd.

Penyelaras Akhir: Lazua

Tim Pra & Pasca Cetak: Budiarto,
Abdul Rahman Khamid, Paryadi

Cetakan Pertama, Pebruari 2012

Penerbit:



INTERPENA Yogyakarta

Anggota IKAPI

Jl. Anggrek No. 74, Kradenan Rt. 10/ Rw. 69 Maguwoharjo,

Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta

Hp. 0811-350-100, 0811-351-934

Fax: 0274-489563

Email: interpena@yahoo.com

ISBN: 979-1740-21-6

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak tulisan ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk memfoto copi, tanpa ijin tertulis dari penerbit

MERANCANG PENDIDIKAN ISLAM FUTURISTIK:

Suatu Pengantar

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A.¹

Memberikan kata pengantar merupakan usaha yang memakan banyak pikiran, sebab harus membaca untaian kalimat yang berisi muatan pemikiran penulis untuk diterjemahkan secara lugas ke hadapan pembaca. Dengan begitu pembaca sedikit lebih tahu isi buku dengan latar pengantar ini atau bahkan sedikit terprovokasi dengan membaca pemikiran dalam pengantar ini. Oleh sebab itu, pengantar berfungsi untuk melakukan propaganda sebelum masuk kedalam pemikiran penulis. Paradigma ini kemudian membentuk suatu opini bagi sedikit pembaca bahwa dengan membaca kata pengantar, maka telah tahu arah pemikiran buku tersebut. Padahal itu belum tentu untuk memperoleh pemahaman yang utuh pembaca

¹ Guru Besar Bidang Pendidikan Islam dan sekaligus Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

dituntut pula untuk melakukan eksplorasi pemikiran di dalam membaca buku tersebut. Sebab, menurut paradigma hermeneutik gadamerian, teks yang sudah digulirkan itu multitafsir yang memercikan berbagai pemikiran dihadapan pembaca. Begitu pula dalam lingkup pemikiran pendidikan yang dihadapkan pada realitas perubahan.

Perubahan dalam realitas merupakan suatu hukum alam (*sunnatullah*) -dan sebuah hukum universal (*universal law*)- dan juga merupakan “realitas keagungan Tuhan” yang harus disikapi secara *flexible*. Perubahan yang terus bergulir akan mengubah perspektif yang memandang dunia ini penuh keteraturan menjadi dunia yang *turbulen*. Hal tersebut diindikasikan dengan berubahnya fase *newtonian* menjadi fase *quantum* dan *economical capital* menjadi *intellectual capital* atau bahkan *information capital*. Perubahan-perubahan ini juga akan berimbas pada realitas konsumtif menuju realitas *reinventor* bahkan juga membangun realitas kompetitif-regional menjadi realitas kompetitif-global yang membentuk peradaban baru bagi manusia dengan paradigma yang baru pula.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam daras realitas tersebut di satu sisi juga berimplikasi pada rancangan mekanisme atau aturan yang menjadi suatu sistem nilai-nilai (*systems of values*) yang “luhur” dan juga menjadi pegangan bagi setiap individu, keluarga, atau kelompok komunitas atau masyarakat tertentu. Fakta tersebut kemudian bergulir pada arus pendidikan sebagai wahana pengkonstruksian manusia paripurna yang siap untuk bergumul dengan perubahan itu

sendiri. Pada kerangka ini kemudian statemen dari Hasan Langgulung yang menyatakan bahwa pendidikan yang baik telah memberi sumbangan bagi pertumbuhan individu bagi semua bidang, yang meliputi pertumbuhan jasmani baik dari segi struktural maupun fungsional,² menjadi hal yang sangat urgen untuk dijadikan tolok ukur. Artinya, pendidikan dikatakan berkualitas jika mampu membangun dan mengangkat manusia pada stadium *humanity* holistik-integralistik³ yang kontributif untuk mengulirkan peradaban manusia menuju peradaban yang lebih baik.

Peran pendidikan yang demikian urgen dalam peradaban manusia juga dituntut untuk terus memberikan kontribusi yang signifikan yang didalamnya penuh dengan nilai-nilai humanis untuk kemaslahatan manusia. Harapan inilah yang kemudian menjadi sorotan beberapa ilmuwan pendidikan untuk membangun pendidikan yang lebih baik dan mampu menjawab tuntutan zaman dalam membangun peradaban manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Khaldun dalam membangun teori tentang peradaban menyatakan bahwa wujud suatu peradaban manusia merupakan produk dari

² Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Radar Jaya Opset. 2003. Hal: 31

³ Disini pada kerangka tertentu ada sebagian penulis yang mengasumsikan bahwa yang dikatakan manusia holistik adalah manusia yang secara menyeluruh merangkul dan mengembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya yaitu potensi kemanusiaan (*nasut*) dan ketuhanan (*lasut*). Sedangkan manusia integralistik adalah manusia yang mampu menyatukan aspek jasmani (*duniawi*) dan rohani (*ukhrawi*). Oleh sebab itu, penulis pengantar ini mengistilahkan manusia tersebut dengan manusia yang ada pada stadium *humanity* holistik-integralistik.

akumulasi tiga elemen penting yaitu: 1). Kemampuan manusia untuk berfikir yang menghasilkan sains dan teknologi; 2). Kemampuan berorganisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer; dan 3). Kesanggupan berjuang untuk hidup.⁴ Jadi kemampuan berfikir merupakan elemen asas suatu peradaban. Suatu bangsa akan beradab (berbudaya) hanya jika bangsa itu telah mencapai tingkat kemampuan intelektual tertentu. Sebab kesempurnaan manusia ditentukan oleh ketinggian pemikirannya. Suatu peradaban hanya akan wujud jika manusia di dalamnya memiliki pemikiran yang tinggi sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupannya. Suatu pemikiran tidak dapat tumbuh begitu saja tanpa sarana dan prasarana ataupun supra-struktur dan infra-struktur yang tersedia. Dalam hal ini pendidikan merupakan sarana penting bagi tumbuhnya pemikiran, namun yang lebih mendasar lagi dari pemikiran adalah struktur ilmu pengetahuan yang berasal dari pandangan hidup. Untuk menjelaskan bagaimana pemikiran dalam peradaban Islam merupakan faktor terpenting bagi tumbuh berkembangnya peradaban Islam dan bisa kita merujuk pada tradisi intelektual Islam.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa manusia merupakan subjek dan objek utama dalam pembangunan peradaban ini. Penulis buku ini menyatakan bahwa "*...posisi sentral manusia dalam perkembangan peradaban melalui proses pendidikan yang melibatkan seluruh potensi fitrah, cita rasa ketuhanan dan hakekat serta wujud manusia, maka dalam pandangan*

⁴ 'Abd al-Rahman Ibn Mumammad Ibn Khaldun. *The Muqaddimah: an Introduction to History*, Peterj.: Franz Rosenthal, 3 Jilid, Editor N.J. Dawood. London: Routledge & Kegan Paul. 1978. Hal: 54-57.

Islam tujuan pendidikan adalah untuk aktualisasi potensi-potensi kemanusiaan tersebut untuk membangun peradaban manusia berlandaskan pada "meta-narasi universal" yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. Karena potensi yang ada merupakan nilai-nilai ideal yang dalam wujud implementasinya akan membentuk pribadi manusia secara utuh, sempurna dan mandiri yang pada akhirnya mengerucut pada tujuan akhir dari pendidikan yaitu untuk perwujudan penyerahan mutlak kepada Allah, pada tingkat individual, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya...".⁵ Oleh sebab itu, manusia mampu membentuk peradabannya sesuai kapasitas dan potensinya yang diperoleh melalui pendidikan yang dirangkai oleh nilai Qur'anik. Bahkan Islam memandang bahwa kegiatan pendidikan merupakan sistem integral yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia dari aspek eksoteris maupun esoteris yang memobilisir umat Islam untuk terus berpacu mengembangkan peradabannya mencapai peradaban yang diridhai Allah.

Ketika merujuk pada hasil kongres sedunia pun, tujuan pendidikan dalam pandangan Islam adalah: kedudukan Islam harus mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Karena itu pendidikan harus mencapai pertumbuhan manusia dalam aspeknya: spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa baik secara individual maupun secara kolektif

⁵ Lebih detailnya bab I: *Pendidikan Islam: Menemukan Esensi Dari Diskursus*.

dan mendorong aspek ini kearah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan dalam Islam terletak dalam perwujudan ketertundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas maupun seluruh umat manusia. Secara analitis tujuan pendidikan dalam Islam yang ingin diwujudkan nampak pada tujuan akhir (*ultimate aims of education*) tersebut.⁶

Sedangkan pada perspektif konseptual-normatif, nilai-nilai yang perlu dikembangkan di dalam tujuan pendidikan dalam pandangan Islam adalah nilai-nilai yang bersifat fundamental seperti nilai-nilai sosial, ilmiah, moral dan agama yang secara aksiologik bermuara pada empirisikal *humanity*. Dengan demikian, pendidikan menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup yang dapat memberikan informasi paling berharga mengenai pegangan hidup masyarakat umat manusia, serta membantu manusia sendiri dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial dalam menghadapi perubahan yang serba elastis dan fluktuatif.

Dengan landasan argumentasi-rasionalistik tersebut, pandangan-pandangan filosofis terhadap tujuan pendidikan Islam akan mampu dieksplorasi atau dieksplanasi secara komprehensif pada ranah ontologik, epistemologik maupun aksiologiknya. Seperti pandangan M. Athiyah al-Abrosyi yang menyatakan bahwa tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan pembentukan jiwa,⁷ atau

⁶ Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu. 2002. Hal: 57

⁷ M. Athiyah al-Abrosyi. *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam* (Peterj.:

pandangan Omar Muhammad at-Toumy as-Syaibani yang meformulasikan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah perubahan yang diinginkan, yang diusahakan dalam proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dari kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakat serta pada alam sekitar di mana individu itu hidup atau pada proses pendidikan itu sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu kegiatan asasi dan sebagai proporsi di antara profesi asasi dalam masyarakat,⁸ atau menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, hasil yang ingin dicapai dari pendidikan Islam adalah menciptakan manusia beradab dalam pengertian yang menyeluruh meliputi kehidupan spiritual dan material.⁹ Semua pandangan tujuan pendidikan Islam tersebut merupakan tujuan pendidikan yang mengarah pada ranah aksiologik *an sich* yang mereduksi bangunan tujuan pendidikan ranah epistemologiknya. Dengan demikian, formulasi pemikiran para intelektual atau ulama masa lalu bukan sesuatu yang harus diterima secara *taken for granted*, tetapi harus dilihat secara proporsional dan kontekstual.

Abdullah Zaky al-Kaaf). Bandung: Pustaka Setia. 2003. Hal: 13.

⁸ M. Arifin. *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003. Hal: 29. Dan pengklasifikasian tujuan pendidikan Islam menurut Omar Muhammad at-Toumy as-Syaibani lebih detailnya lihat dalam M. Misbahus Salam. *NU dan Transformasi Masyarakat Madani*. Malang: Pustaka Bayan. 2005. Hal: 85-86.

⁹ Wan Mohd. Nor Wan Daud. *Filsafat dan Prektek Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas*. Bandung: Mizan. 1998. Hal: 174

Buku yang ditulis oleh saudara Abdul Qodir dan telah ada dihadapan pembaca ini merupakan pembacaan sisi lain dari bangunan pendidikan Islam khususnya pada ranah manajemen dan filosofisnya. Kegelisahan penulis buku ini pada ranah epistemologik pendidikan Islam menjadi pisau analisis untuk menyobek tatanan baku pendidikan Islam selama ini dan bahkan penulis menukik langsung pada jantung problematika “masyarakat kontemporer”¹⁰ yang identik dengan arus masyarakat teknologi dan informasinya. Di sisi lain penulis juga memberikan tawaran pada ranah manajemen dalam mengelola lembaga pendidikan yang lebih demokratis dan profesiona. Dengan demikian, penulis buku ini mencoba memberikan tawaran pada tatanan masyarakat kontemporer yang teraliansi pada lingkaran degradasi moralitasnya, sehingga dengan bahasa vulgar -meminjam formulasi dari Wan Mohd. Nor Wan Daud- bahwa orang yang terpelajar dalam pandangan Islam adalah orang yang beradab, yaitu orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Allah, memahami dan menunaikan keadilan terhadap diri sendiri dan orang lain dalam masyarakat, dan terus berupaya untuk meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia yang beradab,¹¹ atau yang

¹⁰ Penulis kata pengantar menggunakan label masyarakat kontemporer sebagai bentuk dari konsistensi label karakteristik pada masyarakat sekarang yang masih menyisakan paradigma masyarakat modern. Walaupun para ahli telah sepakat bahwa era sekarang adalah era postmodernis yang paradigma kritisnya banyak dipengaruhi oleh filsafat Derrida dengan dekonstruksinya.

¹¹ *Ibid.*

biasa di sebut sebagai manusia paripurna atau yang lebih dikenal dengan konsep insan kamil¹² yang mampu *survival* di kancah konstruksi “ilmu pengetahuan umum” untuk dunia dan “ilmu pengetahuan agama” untuk akhirat yang ber-paradigma teoantrophosentris.

Berangkat dari paradigma tersebut, ada dua misi yang harus ditempuh dalam pendidikan Islam, yaitu: *pertama*, menanamkan pemahaman Islam secara komprehensif agar peserta didik mampu mengetahui ilmu-ilmu Islam sekaligus mempunyai kesadaran untuk mengamalkannya. Pendidikan Islam tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan Islam secara teoritik sehingga hanya menghasilkan seorang Islamolog, tetapi pendidikan Islam juga menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku yang Islami dengan kata lain membentuk manusia *Islamist*. *Kedua*, memberikan bekal kepada peserta didik agar nantinya dapat berkiprah dalam kehidupan masyarakat yang nyata, serta *suivre* menghadapi tantangan kehidupan melalui cara-cara yang benar. Dengan demikian pendidikan Islam tidak hanya bersandarkan pada

¹² Hasan Langgulung menyebut insan kamil dengan sebutan insan shaleh, yang merupakan tujuan tertinggi dari pendidikan Islam. Membentuk insan shaleh adalah berusaha mengembangkan manusia yang menyembah dan bertaqwa kepada Allah, manusia yang penuh keimanan dan ketaqwaan, iman dan taqwannya kepada Allah dapat dibuktikan dengan amal perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, segala fikiran yang tergores dan segala perasaan yang berdetak dijantungnya selalu mengagungkan asma Allah. Ciri-ciri dari insan shaleh seperti memiliki sikap terbuka pada alam dan mencari rahasia serta hikmahnya, ia bekerja tidak sekedar kerja namun kerjanya dianggap ibadah, berprinsip hanya kepada Allah dan memiliki rasa kasih sayang kepada sesama. Hasan Langgulung. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-21*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1998. Hal: 137.

“meta narasi universal” *an sich*, akan tetapi juga berdialektika dengan material historis yang merupakan material fundamen dari pendidikan Islam.

Dengan demikian, pendidikan Islam sangat berbeda dengan pendidikan Barat yang dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan bercorak sekuler dan dibangun di atas filsafat materialisme, naturalisme dan eksistensialisme yang melahirkan ilmu pengetahuan yang jauh dari nilai-nilai spiritual, moral dan etika. Dan dari perkembangan ilmu pengetahuan yang bebas nilai itu, ternyata aspek pendidikan belum mampu menimalisirnya, apalagi mengatasinya. Setidaknya ada beberapa faktor yang diantaranya masih ada pandangan dikotomis ilmu secara substansial (ilmu agama dan ilmu umum).¹³ Akan tetapi pendidikan Islam diharapkan dalam mengkonstruksi teori filosofis-normatifnya berdasarkan pada filsafat materialisme, naturalisme dan eksistensialisme yang dikerangkai dengan spirit al-Qur'an dan al-Hadist.

Dengan demikian, pendidikan Islam harus -yang dalam bahasa agama adalah “wajib”- mampu mengakses perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mengkonstruksi teori epistemologi dalam anatomi pendidikan Islam berparadigma integralistik-monokotomik. Serta pendidikan Islam tidak boleh mengasingkan diri dari realitas kehidupan yang senantiasa berkembang dan terus berubah sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Kenyataan ini menjadi “kebenaran yang tidak terbantahkan” bahwa

¹³ M. Zainuddin. *UTN: Menuju Integrasi Ilmu dan Agama*, dalam M. Zainuddin (Edit.). *Memadu Sains dan Agama Menuju Universitas Islam Masa Depan*. Malang: Bayumedia. 2004. Hal: 3.

pendidikan Islam yang non-dikotomis mampu melahirkan intelektual muslim yang memiliki karya yang sangat besar dan berpengaruh positif terhadap eksistensi kehidupan manusia. Menurut Harun Nasution,¹⁴ cendekiawan-cendekiawan Islam tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat dari buku Yunani, tetapi menambahkan ke dalam hasil-hasil penyelidikan yang mereka lakukan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan hasil pemikiran mereka dalam ilmu Filsafat. Dengan demikian, lahirlah ahli-ahli ilmu pengetahuan dan filosof-filosof Islam, seperti, Al-Farazi (astronom Islam), Ibnu Sina (ahli kedokteran sehingga dijuluki dengan *doctor of doctors*), Al-Biruni (ahli filsafat, astronomi, geografi, matematika, juga sejarah), Ibnu Rusyd (filosof dan ahli fiqh, sehingga dijuluki *Averous*). Sedangkan dalam ilmu agama, terdapat para ulama yang mengembangkan ilmu Hadits (Bukhari Muslim abad IX); ilmu Hukum Islam (Imam Malik, Al-Syafi'i, Abu Hanifah dan Ibn Hanbal abad VII, IX), dan lain-lain.¹⁵

Konstruksi ideal dari pendidikan Islam tersebut menjadi gerbang bagi pertumbuhan peradaban manusia kontemporer yang diharapkan memberikan jawaban pasti pada problematika masyarakat kontemporer –baca masyarakat modern. Melihat hal tersebut, Abuddin Nata mencoba untuk memetakan problematika masyarakat modern yang dalam pandangannya terdapat sekurang-kurangnya de-

¹⁴ Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press. 1979. Hal: 71.

¹⁵ *Ibid*. Hal: 73.

lapan penyakit yang menimpa masyarakat modern. *Pertama*, desintegrasi antar ilmu pengetahuan (spesialisasi yang terlampau kaku) yang berakibat pada terjadinya pengkotak-kotakannya akal pikiran manusia dan cenderung membingungkan masyarakat. *Kedua*, kepribadian yang terpecah (*split personality*) sebagai akibat dari kehidupan yang dipolakan oleh ilmu pengetahuan yang terlampau terspesialisasi dan tidak berwatak nilai-nilai ketuhanan. *Ketiga*, dangkalnya rasa keimanan, ketaqwaan, serta kemanusiaan, sebagai akibat kehidupan yang terlampau rasionalistik dan individualistik. *Keempat*, timbulnya pola hubungan yang materialistik sebagai akibat dari kehidupan yang mengejar duniawi yang berlebihan. *Kelima*, cenderung menghalalkan segala cara, sebagai akibat dari paham hedonisme yang melanda kehidupan. *Keenam*, mudah stress dan frustrasi, sebagai akibat dari terlampau percaya dan bangga terhadap kemampuan dirinya, tanpa dibarengi sikap tawakal dan percaya pada ketentuan Tuhan. *Ketujuh*, perasaan terasing di tengah-tengah keramaian (*lonely*), sebagai sifat individualistik, dan *kedelapan* kehilangan harga diri dan masa depannya, sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang.¹⁶

Pemetaan yang dikemukakan oleh Abuddin Nata tersebut merupakan implikasi logis dari adopsi ilmu pengetahuan yang dikembangkan Barat dengan mereduksi tatanan nilai, moral dan etis-religius dari doktrin metafisik-religius

¹⁶ Abuddin Nata. *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2003. Hal: 82-83.

dan hegemoni paradigma budaya global yang positivistik yang didominasi oleh peradaban Barat. Sekularisasi ilmu pengetahuan adalah ciri khas dari peradaban Barat yang sekuler dan liberal. Demikian juga munculnya sifat hedonistik dan individualistik merupakan implikasi dari kapitalisme yang materialistik. Sedangkan Samsul Nizar pada ranah ini mengidentifikasi ciri metode sains Barat; antara lain *pertama*, rasionalisme filosofis yang hanya merupakan persepsi inderawi; *kedua*, rasionalisme sekular yang cenderung lebih bersandarkan pada pengalaman inderawi dan menyangkal otoritas serta intuisi, serta menolak wahyu dan agama sebagai sumber ilmu yang benar; *ketiga*, empirisme filosofis yang menyandarkan seluruh ilmu pada fakta-fakta yang dapat diamati, bangunan logika dan analisis bahasa, dan menelantarkan aspek non empiris sebagai zat supranatural; dan *keempat*, sistem etika Barat bercorak antroposentris yaitu menempatkan manusia sebagai pusat dari segala-galanya sebagai sosok individu yang merdeka tanpa batas.¹⁷ Ciri-ciri tersebut sangat berbeda dengan metode sains Islam yang mengakui otoritas, intuisi, dan wahyu sebagai sumber ilmu. Demikian juga etika Islam bercorak teoantroposentris yang menempatkan manusia sebagai pelaku sejarah yang sekaligus sebagai makhluk Tuhan.

Berdasarkan deskripsi analitik tersebut, penulis buku "Manajemen dan Pendidikan Islam" menjadikan spirit integratif atau yang biasa kita sebut sebagai kesatuan tran-

¹⁷ Samsul Nizar. *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001. Hal: 144-145.

sendental atau tauhid dijadikan landasan untuk dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan khususnya teori pendidikan Islam berparadigma monokotomi khususnya dalam mengelola lembaga pendidikan Islam. Upaya saudara Abdul Qodir, ini adalah untuk mempertemukan khazanah pengetahuan modern ke dalam kerangka Islam, bahkan mengajak keluar dari dualisme keilmuan dengan cara meletakkan epistemologi dan teori sistem pendidikan yang bersifat mendasar pada kerangka yang komprehensif dan integral.

Dengan demikian, perlu adanya upaya yang urgen untuk melakukan rekonstruksi pendidikan Islam dan yang pantas untuk pertama kali dibangun adalah pandangan dunia Islam (*Islamic world view*) atau bagaimana membangun epistemologi Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist ditambah dengan memahami perkembangan dunia kontemporer walaupun nanti umat Islam meminjam khazanah keilmuan dari dialektika materialisme. Walaupun di satu sisi pembangunan epistemologi Islam tidak mungkin disandarkan pada disiplin-disiplin ilmu yang ada, akan tetapi perlu mengembangkan paradigma-paradigma baru di mana ekspresi-ekspresi eksternal peradaban Islam yang meliputi sains, teknologi, politik hubungan antar bangsa, struktur sosial, ekonomi, pembangunan masyarakat desa dan kota dan sebagainya dapat dipelajari dan dikembangkan dalam hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan dan realitas kontemporer.¹⁸ Oleh sebab itu, pengembangan epistemologi

¹⁸ Djamaluddin Ancok dan Fuat Nashori Suroso. *Psikologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1994. Hal: 116.

pendidikan Islam dapat dikatakan sia-sia jika pada ujung prosesnya standar kebenarannya dikembalikan pada ilmu pengetahuan Barat lagi.

Implikasi logis jika hal tersebut terjadi adalah reduksi paradigmatis-holistik yang cenderung memfragmentasi pada dua pola yaitu wilayah profan dan sakral. Sadisnya adalah seperti yang dideskripsikan oleh saudara Abdul Qodir, bahwa relevansi antara pendidikan Islam dengan *outputnya* sangat dipertanyakan. Bahkan dari pendekatan yang digunakan oleh pendidikan Islam juga menuai kritik dari saudara Abdul Qodir, ia menyatakan bahwa "*...selama ini studi pendidikan Islam masih menggunakan pendekatan konvensional yang umumnya bersifat diakronis yang kajiannya berpusat pada sejarah dari ide-ide dan tokoh pemikir besar dalam pendidikan, atau sejarah dan sistem pendidikan dan juga lembaga-lembaga, atau sejarah perundang-undangan dan kebijakan umum dalam bidang pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka harus ada pendekatan sejarah pendidikan (Islam) baru yang hanya tidak cukup dengan cara-cara diakronis saja. Perlu ada pendekatan metodologis yang baru yaitu dengan pendekatan interdisipliner...*"¹⁹ Kegelisahan ini yang akhirnya menjadi spirit pengembangan pemikiran pendidikan Islam ini.

Serta problematika filosofis maupun praksis pendidikan Islam dan berbagai problematika pada masyarakat modern khususnya dalam menjawab degradasi moral sebagai bentuk

¹⁹ Lihat bagian penutup bab II: *Pendidikan Islam dalam Pendekatan Multidisipliner: Suatu Pengantar Kajian Gradual Menuju Paradigma Global*.

implikasi logis dari pendidikan Barat yang dicoba diurai saudara Abdul Qodir, dalam buku yang kini ada di tangan pembaca. Namun demikian semakin perlu disadari perlunya membedah *pseudo* teoritik mungkin juga *pseudo* (seolah-olah) Islam dalam praktik pendidikan Islam yang selama ini berlangsung. Hal ini berakibat sulitnya berbagai pandangan yang bersifat filosofis maupun teoritis-praksis pendidikan Islam berkembang dan bersaing dengan kompetitornya yang semakin canggih yang sayangnya dipandang sebelah mata dengan menyebut mereka sebagai kaum yang “kafir”. Sayang, di saat yang sama produk pendidikan Islam cenderung pada boks yang terus-menurus “kalah” dalam perebutan di lapangan kehidupan. Sampai kapan kondisi pendidikan Islam seperti ini berlangsung? Pembaca yang arif sendiri yang bisa menjawab. []

Malang, Juni 2011

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A.

PENGANTAR PENULIS

Buku ini merupakan serpihan-serpihan atau per-cikan dari beberapa tulisan yang dikumpulkan menjadi sebuah buku yang utuh dengan susunan dari hal-hal yang bersifat teoritik ke tataran praktis. Hal ini merupakan langkah yang penulis ambil dalam rangka memunculkan format pemikiran pendidikan Islam yang menarik dengan kajian yang sangat mendasar. Apalagi ketika melihat pendidikan yang ada di Indonesia yang masih berorientasi pada pragmatisme *an sich* dengan diarahkan pada kepentingan penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, pembangunan dapat dilaksanakan secara akseleratif. Sehingga konsepsi pendidikan belum mampu menyentuh dimensi kemanusiaan yang paling *human*. Teori

human capital yang dikembangkan Theodore W. Schultz menyiratkan kesesuaian dengan realitas kondisi bangsa Indonesia pada saat ini. Teori ini bertolak dari asumsi, bahwa manusia merupakan bentuk kapital sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya. Sehingga dengan asumsi ini, sisi *humanity* manusia tereduksi oleh sisi pragmatisme belaka yang bertolak dari ontologik-materialistik dan meninggalkan tataran ontos-metafisik.

Oleh sebab itu, keberhasilan pendidikan menurut teori *human capital*, diukur dari seberapa besar *rate of return* pendidikan terhadap pembangunan ekonomi khususnya dalam ranah kapital. Pada tataran ini pendidikan merupakan sebuah proses kapitalisasi, di mana *output*-nya bisa terserap dalam dunia industri dan pasaran kerja, yang menuntut kemampuan penguasaan ketrampilan (*skill*) yang tinggi. Dengan konsepsi pendidikan seperti ini, dengan sendirinya aspek humanistik apalagi aspek spiritual dalam pendidikan menjadi terabaikan atau bahkan ditinggalkan sama sekali. Ini merupakan implikasi logis dari elan dasar pendidikan yang bertolak dari antos-fisik *an sich*.

Berbeda dengan Paulo Freire, yang secara filosofis memberikan dasar pemikiran tentang pentingnya pendidikan sebagai penyadaran (*awareness*). Aspek ini bagi pendidikan menjadi bagian penting dari eksistensi manusia untuk membangun peradaban manusia yang madani. Pentingnya penyadaran ini karena manusia dalam dunia tidak sekadar hidup (*to live*), tetapi mengada atau bereksistensi, *existencial-being*, *human-being*, *spiritual-being* sampai pada *religious-be-*

ing. Manusia bereksistensi berarti mampu berkomunikasi dengan dunia obyektif sehingga memiliki kemampuan kritis. Dengan penjelasan ini Paulo Freire ingin memberikan suatu afirmasi filosofis, bahwa manusia pada hakikatnya mampu melakukan transendensi dengan semua realitas yang melingkupinya. Atau dengan bahasa lain, menurut eksistensialis Jerman, Karl Jaspers sebagai "Yang mengelilingi segala sesuatu yang mengelilingi kita" (*das umgreifende alles umgreifenden*).

Proses transendensi manusia dengan semua realitas akan mengkonstruksi kesadaran integral tanpa mereduksi konsep "kesatuan mistik universum" manusia dalam dirinya. Konsep kesatuan kesadaran ini yang akan mengangkat *humanity* manusia pada stadium "insan kamil" yang merupakan tujuan idealistik dari pendidikan. Bahkan Imam Ghazali, *hujjatul islam*, mensinyalir bahwa tujuan pendidikan (Islam) adalah membentuk manusia menjadi insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, "kesatuan mistik universum" manusia tidak bisa difragmentasikan menjadi partikel-partikel kecil sebagai yang berdiri sendiri untuk menyokong pembangunan ekonomi *an sich* -seperti dalam teori *human capital*-.

Maka, bias bahan material ilmu (pendidikan) dan batas geokultural dalam komunitas manusia perlu dikaji secara kritis-selektif sebagai elan dasar pengembangan wawasan intelektual dan pembangunan peradaban manusia. Dekonstruksi batas definitif objek dan wilayah ilmu adalah dasar etik seluruh kesaksian (*syahadah*) ketuhanan secara

intelektual yang didasari oleh spirit pemuliaan kemanusiaan (humanitas) tanpa memandang batas-batas geokultural. Sebab tak ada realitas di luar peran Tuhan dan tak ada realitas yang terfregmentasi (terpisah) menjadi sub sistem yang eksis dengan eksistensinya sendiri. Seluruh fisis kealaman dan humaniora terkonstruksi dalam kesatuan mistis di bawah paradigma *the natural laws* (*sunnahtullah*).

Dengan dasar tersebut, peradaban manusia akan melahirkan manusia integral yang mampu menyeimbangkan ranah profanistik dengan yang sakralistik atau yang transendental. Proses pengkonstruksian manusia integral memerlukan pengelolaan, pengaturan dan penataan -pola manajemen pendidikan- yang baik dalam lembaga pendidikan untuk meyelaraskan hubungan antar variabel seperti staf tata laksana administrasi, staf teknis pendidikan di dalamnya ada kepala lembaga pendidikan dan guru, komite lembaga pendidikan sebagai badan independen yang membantu terlaksananya operasional lembaga pendidikan, dan bahan baku (siswa) sebagai peserta didik yang bisa ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai.

Hubungan antar variabel tersebut harus sinergis, karena keberlangsungan operasional lembaga pendidikan terbentuknya dari hubungan "simbiosis mutualis" antar komponen tersebut karena *needs of education* demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal semata-mata demi *needs of learner* dalam menggali *skill of intelligence, skill of social* dan *skill of spiritual*. Sebab

pendidikan dapat menjadi determinan penting bagi proses transformasi personal maupun sosial manusia menuju peradaban madani seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika ada di Madinah.

Untuk menuju *point education change* (perubahan pendidikan) secara menyeluruh, maka manajemen pendidikan adalah hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan *output* yang diinginkan. Maka dalam hal ini yang banyak berperan adalah pengelola lembaga pendidikan sendiri untuk mengatur, mengorganisasikan, mengerakkan dan mengontrol pola manajemen pendidikan yang berjalan di lembaga pendidikannya. Maka *output* pendidikan akan sesuai dengan cita-idealistik pendidikan Islam menjadi manusia integral (*insan kamil*) yang mempunyai ketangguhan intelegensi, skill dan spiritual yang tinggi tanpa mereduksi potensi yang lain. Sehingga keberhasilan pendidikan tidak akan linear dengan teori *human capital*, yang mengukur keberhasilan pendidikan pada seberapa besar *rate of return* pendidikan terhadap pembangunan ekonomi, namun mengukur keberhasilan pendidikan pada seberapa besar *rate of return* pendidikan terhadap pembangunan *humanity* berlandaskan pada tatanan ketuhanan.

Deskripsi asa penulis tersebut yang menjadi latar belakang dari kodifikasi buku ini. Dan terakhir penulis ucapkan banyak terima kasih bagi kolega-kolega penulis yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kodifikasi buku ini. Tak lupa pula kami dedikasikan karya ini untuk

teman-teman yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis mengumpulkan beberapa catatan kecil untuk penyusunan buku ini. Semoga buku kecil ini bermanfaat bagi pembaca. Amin ...

Billahi Taufiq wal Hidayah ...

Palangkaraya, Pebruari 2012

Penulis

Daftar Isi

MERANCANG PENDIDIKAN ISLAM FUTURISTIK:

Suatu Pengantar (Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A.).....	ix
Pengantar Penulis.....	xxv
Daftar Isi.....	xxxi

Bagian 1

PENDIDIKAN ISLAM:	1
Menemukan Esensi dari Diskursus	1
A. Pendahuluan	1
B. Membaca Problematika Pendidikan Islam	6
C. Pendidikan Islam:	
Deskripsi Pengantar Diskursus.....	17
D. Penutup	41

Bagian 2

PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENDEKATAN

MULTIDISIPLINER: Suatu Pengantar Kajian Gradual

Menuju Paradigma Global.....	43
A. Pendahuluan	43
B. Pembahasan.....	48
C. Konseptualisasi.....	63
D. Penutup	74

Bagian 3

PEMBARUAN PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM:

Sebuah Upaya Mencari Jalan Keluar dari Kemelut

Paradigma Dualisme-Dikotomis

dalam Pendidikan Islam	77
A. Pendahuluan	77
B. Paradigma Dualisme-Dikotomis dalam Pendidikan Islam	79
C. Upaya Mengatasi Problematika Dualisme-Dikotomis dalam Pendidikan Islam.....	84
D. Telaah Kritis Persoalan Dualisme-Dikotomis dalam Pendidikan Islam.....	94

Bagian 4

KONSEP KEPEMIMPINAN BERBASIS SPIRITUAL

DALAM MENGEMBANGKAN

LEMBAGA PENDIDIKAN (ISLAM)	101
A. Pendahuluan	101
B. Pengembangan Organisasi (<i>Organizational Development/OD</i>)	106
C. Pendekatan Kepemimpinan: <i>Team Building</i>	116
D. Individual Building: Perilaku Inovatif	124
E. <i>The Spiritual Leadership</i>	128
F. Kesimpulan	138

Bagian 5

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

DI ATAS PLATFORM BUDAYA ORGANISASI: Membangun

Madrasah Aliyah Berprestasi.....	141
A. Pengertian Budaya Organisasi	144
B. Tipologi Budaya	147
C. Budaya Organisasi	150

D. Membentuk dan Mempertahankan Budaya	156
E. Budaya Madrasah Aliyah Berprestasi: Menilik Kembali Budaya Lembaga Pendidikan Islam	158
F. Kesimpulan	163

Bagian 6

PESANTREN DI TENGAH ARUS MUTU PENDIDIKAN:

Sebuah Pemikiran Gradual pada Tataran

Teoritis-Normatif	167
A. Prolog:	
Identifikasi Problematika Suatu Keniscayaan.....	167
B. Pesantren:	
Deskripsi Awal tentang Eksistensi Pesantren	173
C. <i>Total Quality Management (TQM)</i>	179
D. <i>Total Quality Management (TQM)</i> dalam Pesantren	186
E. Epilog.....	196

Bagian 7

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)

DAN PROFESIONALISME GURU DI LEMBAGA

PENDIDIKAN ISLAM	199
A. Pendahuluan	199
B. Pengertian Manajemen Mutu Terpadu	201
C. Konsep Manajemen Mutu Terpadu dalam Lembaga Pendidikan	204
D. Guru dan Tantangan Profesionalisme pada Lembaga Pendidikan Islam	207
E. Aktualisasi TQM dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Lembaga Pendidikan Islam	218
F. Kesimpulan	223

Bagian 8	
PEMIKIRAN FILOSOFIS MANAJEMEN	
PENDIDIKAN ISLAM: Suatu Pemikiran Teoritis	
untuk Catatan Epilog	225
DAFTAR PUSTAKA	239
INDEKS	255
RIWAYAT SINGKAT PENULIS	257
RIWAYAT SINGKAT EDITOR	261



Bagian 1

PENDIDIKAN ISLAM:

Menemukan Esensi dari Diskursus

A. PENDAHULUAN

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah
Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya¹*

(Surat Al-Alaq: 1-5, wahyu Tuhan yang pertama kepada Nabi Muhammad)

¹ Sayyid Quth'b, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jilid 24), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 177.

Bias bahan material ilmu dan batas geokultural dalam komunitas manusia perlu di kaji secara kritis-selektif sebagai elan dasar pengembangan wawasan intelektual. Dekonstruksi batas definitif objek dan wilayah ilmu adalah dasar etik seluruh kesaksian (syahadah) ketuhanan secara intelektual yang didasari oleh spirit pemuliaan kemanusiaan (humanitas) tanpa memandang batas-batas geokultural. Sebab tak ada realitas di luar peran Tuhan dan tak ada realitas yang terfregmentasi (terpisah) menjadi subsistem yang eksis dengan eksistensinya sendiri. Seluruh fisis kealaman dan humaniora terkonstruksi dalam kesatuan mistis di bawah paradigma *The Natural Laws* (Sun-nahtullah).

Teks verbal sakral Tuhan yaitu al-Qur'an dan al-Hadist juga teks non-verbal alam natural dan sosial adalah sumber dan bahan material ilmu sebagai kesatuan entitas mistis universum yang tak terpisahkan kecuali bagi kebutuhan analisis ilmiah rasional materialistik. Dengan demikian, *The Natural Laws* merupakan ontologis-metafisis seluruh objek ilmu yang bukan sekedar berdeminsi empiris *an sich*. Ilmu adalah konsep realitas sebagai bentuk kehadiran Tuhan dalam dunia empiris yang disadari oleh subjek ilmu.² Pendekatan-pendekatan kritis dengan formulasi metodologik dapat memasuki dataran objek transenden dan ontos-metafisis dari seluruh realitas dan histories-sosilogis subjek ilmu. Maka ketika problema keilmuan bersumber

² Abdul Munir Mulkhan, "Pemuliaan Kemanusiaan dalam Erika Intelektual Santri", dalam Abdul Munir Mulkhan, *Rekontruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 41.

pada hubungan subjek-objek, formulasi penyusunan akar ilmu dapat dibedakan menjadi beberapa *style* (model) sesuai dengan pandangan dasar (*world view*) mengenai hakikat filosofisnya.

Yang *pertama* adalah pendekatan model dengan asumsi dasar bahwa ilmu adalah konsep mengenai realitas yang tersusun secara hierarkis dan struktural.³ Implikasi dari asumsi ini yaitu bahwa struktur ilmu tersusun secara hierarkis sesuai dengan konseptualisasi pluralnya realitas tersebut. Dan yang *kedua*, berdasarkan pada asumsi dasar bahwa ilmu merupakan simbolisasi kesadaran manusia,⁴ dan dari ini maka muncul struktur ilmu yang akan bersesuaian

³ Pandangan tersebut merupakan *world view* dari filosof sosialis yaitu Karl Mark. Dan dengan pandangan dari aliran sosial tersebut yang terkenal dengan materialisme histories, kita telah disadrkan oleh pandangan tersebut bahwa ternyata sejarah terus bergerak berdasarkan gerak materialnya dan semua perkembangannya menuju pada tiga fase yaitu fase tesis, antitesis dan sintesis. Lebih detailnya lihat Daniel L. Pals, *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 179-223. Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 1018-1028. Ali Mudhofir, *Kamus Filsuf Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 348-352.

⁴ Simbolisasi kesadaran manusia ini pernah dialami oleh nabi Ibrahim, bapak agama Monotheisme dunia yaitu Islam, Kristen dan Yahudi, yang di dalam drama teologisnya nabi Ibrahim ketika mencari Tuhannya tidak dalam lingkaran histories-sosiologis, akan tetapi di atas lingkaran histories-sisiologis. Dan juga pada nabi Muhammad yang di kenal sebagai khatamul anbiya', juga mengalami hal yang sama dengan berkontemplasi di gua Hira' dan turunlah wahyu yang pertama yaitu surat al-Iqra': 1-5. lebih detail tentang nabi Muhammad lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2004), 41-58.

dengan stadium-stadium kesadaran manusia. Dari dua asumsi dasar tersebut, ada yang berpandangan bahwa akar ilmu adalah struktur dan hubungan antara subjek dan objek, hal ini berarti bahwa ilmu adalah pola struktur hubungan itu sendiri yang berada di luar dari subjek maupun objek. Pandangan yang *ketiga* adalah yang lebih banyak bersumber pada hakikat “being” yang antos-fisis *an sich* dan mereduksi sisi lain dari hal “being” yang bersifat ontos-metafisis.

Dan dalam pandangan Aguste Comte (1798-1857), seorang filosof kebangsaan Perancis yang masuk pada aliran Positivistik, membagi pola alam pikiran manusia yang berkembang berdasarkan pada beberapa tahapan yaitu tahapan teologis, metafisis dan positivistik,⁵ atau juga Cornelis Anthonie Van Peursen (1920-), seorang filosof kebangsaan Belanda, membagi perkembangan alam pikiran manusia pada tiga tahapan yaitu tahapan mistis, teologis dan fungsional.⁶ Pola-pola tahapan perkembangan pikiran

⁵ a. tahapan teologis bersifat antropomorfik. Benda-benda merupakan ungkapan dari super naturalisme, bermula dari fetisih kemudian polyteisme dan kemudian menjadi monothoisme. Ini adalah abad monarkhi dan kekuasaan mutlak. Ini merupakan abad kekanak-kanakan; b. tahap metafisik menggantikan kekuatan-kekuatan abstrak atau entitas-entitas manusia. Ini adalah abad nasionalisme dan kedaulatan umum, abad remaja; dan c. tahapan positif berusaha untuk mengungkapkan hubungan yang beragam dalam gereja. Tahap ini menghindari pertanyaan “mengapa” dari teologi dan metafisika. Dan menanyakan bagaimana kaidah-kaidah alam menggantikan sebab-sebab yang mutlak. Ali Mudhofir, *Kamus Filsuf ...* Op. Cit., 102.

⁶ a. tahap mistis ialah sikap manusia yang merasa dirinya di kepung oleh kekuatan gaib disekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam atau kekuasaan kesuburan, seperti yang dipentaskan dalam mitologi-mitologi

alam manusia tersebut bisa dijadikan tangga akar susunan ilmu, artinya akar susunan ilmu dapat di lihat dari tahapan perkembangan pikiran subjek ilmu yang bertransformasi dari tahapan ke tahapan yang lain secara evolutif-gradualistik atau revolutif. Sehingga struktur ilmu ketika mengikuti pola ini adalah tahapan pemikiran itu sendiri. Dan ketika tahapan itu tidak hanya bersifat *histories an sich* tetapi juga bersifat akumulasi kualitatif, maka setiap pemikiran dan perkembangan ilmu akan dimulai dengan konsep mistik atau teologis -integralistik universum-. Akan tetapi, jika kritik ilmu mulai kembali mempertanyakan keabsahan formalitas-normatif pembakuan fungsionalistik atau positivistik, tahapan ilmu mungkin mulai berdaur ulang mencapai suatu tahapan keempat atau bahkan lebih.

Sementara struktur konsep di lihat dari rentang jarak epistemologis terhadap realitas (ontologis/empiris) dapat dibedakan menjadi: konkreta, abstrakta dan illata.⁷ Seluruh konsep merupakan hal yang abstrak namun karena kedekatannya dengan realitas/empiris maka di sebut dengan konkreta, artinya semakin tinggi tingkat abstraksi suatu

dari bangsa primitif; b. tahap ontologis ialah sikap manusia yang tidak lagi hidup dalam kepungan kekuasaan mistis, melainkan secara bebas ingin meneliti segala hal. Manusia mengambil jarak terhadap segala sesuatu (ontologi) dan segala sesuatu menurut perinciannya (ilmu); dan c. tahap fungsional ialah sikap dan alam pikiran manusia modern. Ia tidak begitu terposana oleh lingkungan (mistis), ia tidak lagi kepala dingin mengambil jarak terhadap objek penyelidikannya (sikap ontologis). Manusia justru ingin mengadakan relasi baru. *Ibid.*, 516.

7 Abdul Munir Mulkhan. *Akar Pendidikan Islam Sebagai Ilmu*, dalam Abdul Munir Mulkhan, *Rekonstruksi Peradaban ...* Op. Cit., 97.

konsep dengan realitas empiris di sebut dengan abstraksi dan yang tertinggi adalah illata, dan sedangkan yang dekat dengan realitas empiris/praksis di sebut dengan konkreta. Dan hal ini nantinya mempengaruhi tingkat transformasi suatu ilmu di mana konsep yang semakin berkaitan dengan hal-hal praksis semakin mudah berubah dan tak berlaku karena realitasnya berubah. Akan tetapi, objek ilmu tetap stagnan dengan eksistensinya dan kesatuan mistis realitas universum menjadikan definisi kultural tidak dapat dijadikan dasar reduksi objek ilmu. Pemikiran rasional spekulatif dikembangkan bersama yang empiris, sedangkan yang logika formal kausalistik dikembangkan bersama yang lateral spiritual dan intuitif.

B. MEMBACA PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM

Dengan melihat deskripsi tersebut tentang problematika filosofis tersebut akan semakin urgen dan menarik dalam diskursus pada bidang pendidikan Islam yang secara substansial mengarah pada akar filosofis ontos-metafisisnya. Dan ketika melihat Pendidikan Islam dalam perspektif ontologi adalah suatu upaya pemanusiaan manusia (humanisasi) dengan cara yang manusiawi untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.⁸ Akan tetapi upaya-upaya ke arah terwujudnya konstruksi tersebut ditanggapi secara sinis oleh para ahli, setelah mengamati relevansi Pendidikan Islam secara internal maupun eksternal dengan transformasi yang terjadi di sekelilingnya. Keabsahan konstruksi pendidikan,

⁸ M. Sukidi, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Mikraj, 2005), 104.

termasuk dalam hal ini juga pendidikan islam, sebenarnya telah lama dipertanyakan. Seperti sikap optimis dan ketakjubannya sosok Neil Postman dalam bukunya "Matinya Pendidikan" yang mengatakan bahwa manusia akan berhasil menata masa depannya tanpa harus "menerima" pendidikan.⁹ Bahkan dalam tulisannya "Gagalnya Pendidikan Agama" di harian Kompas pada tanggal 28 Pebruari 2003, Haidar Baqir mengungkapkan kegetirannya tentang pendidikan agama di sekolah-sekolah di Indonesia yang secara general telah di anggap telah gagal.¹⁰ Hal itu merupakan keabsahan universal karena secara histories dinamika Pendidikan Islam tidak berada dalam konteks realitas yang vakum. Pendidikan Islam akan terus berada dalam konteks tertentu yang dinamis dan akan terus mengalami dinamika. Dan ketika dinamika perubahan yang begitu cepat itu akan berimbas pada pendidikan Islam. Dan maka secepat itu pula Pendidikan Islam akan mengalami upaya-upaya dekonstruksi bahkan akan berlanjut pada upaya rekonstruksi. Lebih dari itu, ketika rekonstruksi telah menjadi *consensus*, maka Pendidikan Islam secara otomatis menjelma menjadi konstruksi yang kedua dan akan terjadi lagi langkah-langka dekonstruksi dan rekonstruksi, begitu siklus normatif seterusnya.

⁹ Neil Postman, *Matinya Pendidikan: Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), 161. Juga kumpulan pandangan-pandangan yang agak kontroversial tentang urgensitas dan eksistensi pendidikan adalah Roem Topatimasang, *Sekolah Itu Candu*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

¹⁰ Haidar Baqir, *Gagalnya Pendidikan Agama*, Kompas, 28 Pebruari 2003.

Dan bahkan ada yang mensinyalir bahwa salah satu realitas Pendidikan Islam yang cenderung bersifat normatif hingga kini dapat dengan mudah ditemukan. Mulai dari formulasi tujuan sampai pada isi yang bersifat “melangit”, dalam pengertian, formulasi-formulasi dari Pendidikan Islam cenderung bersifat teosentris dan abstrak.¹¹ Hal ini berarti Pendidikan Islam mengabaikan struktur realitas kemanusiaan yang seharusnya merupakan aspek dari objek dan subjek pendidikan. Aspek “being” profan, yang dalam hal ini adalah manusia dan alam, sering tereduksi pada satu sisi yaitu *God oriented an sich* dan mengabaikan yang realitas nyata yang lain. Kesan ontos-metafisis Pendidikan Islam yang muncul adalah teosentris-normatif yang mengabaikan aspek antroposentis atau aspek fenomena kemanusiaan.

Atau Pendidikan Islam pada tataran aspek epistemologik masih diyakini sebagai sumber bagi moralitas dan kebajikan manusia, sebab sumber suksesi landasan nilai yang utama adalah al-Qur'an dan Hadist. Nilai kebajikan dan keteraturan hanya bisa diperoleh dari lembaga pendidikan pada jalur yang otoritas nilainya diadopsi langsung dari sumber verbal sacral Tuhan yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. Oleh sebab itu, pendidikan yang di luar jalur agama atau pendidikan sekuler di klaim kurang kredibel dalam mengurus persoalan moralitas manusia yang merupakan akibat dari dekandensi nilai kebaikan dan keteraturan. Konklusinya Pendidikan Islam diposisikan begitu sentral sehingga seolah ia dapat

¹¹ Nurul Huda, *Cakrawala Pembebasan: Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 157.

memberi solusi atau alternatif bagi problema kemanusiaan atau moralitas dan perilaku kehidupan bermasyarakat. Dan dalam konteks sekolah atau madrasah paradigma tersebut direfleksikan dengan mengampanyekan tentang urgensinya pendidikan agama di sekolah atau madrasah. Dari tataran realitas tersebut, muncul persoalan yang sangat mendasar yaitu: Bagaimana sesungguhnya Pendidikan Islam diimplementasikan dalam situasi dan waktu yang terus bertransformasi dengan material strukturalnya sendiri? Sedangkan material struktural situasi dan waktu tepat pada stadium di era materialisme, hedonisme dan konsumerisme yang lebih banyak terkait dengan nilai-nilai (*values*).¹² Dengan melihat realitas (*being*) tetap pada *frame* metafisis dengan epistemologik-metodologik yang transendental atau dengan bahasa lain, Pendidikan Islam tetap pada koridor ontos-metafisis dengan epistemologi *scientific paradigm* atau *naturalistic paradigm* tanpa ada dikhotomi antara yang transendental dan profan.

Keseimbangan antara aspek yang transendental dengan yang profan dalam formulasi isi dan tujuan dari Pendidikan Islam tertuang di kerangka terminologi Pendidikan Islam sendiri. Seperti Muhammad Kamal Hasan, yang dikutip oleh Yasmadi memberikan terminologi pendidikan Islam yaitu:

“Terminologi pendidikan Islam berarti suatu proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan yang meliputi intelektual, spritual, emosi dan fisik, sehingga seorang muslim disiapkan dengan baik

¹² M. Amin Abdullah. *Problem Epistemologis-Metodologis Pendidikan Islam*, dalam Abdul Munir Mulkhan, *Rekonstruksi Pendidikan ...* Op. Cit., 57.

untuk melaksanakan tujuan-tujuan kehadirannya oleh Tuhan sebagai hamba dan wakilnya di dunia".¹³

Dan keseimbangan itu sejajar dengan prinsip *khali-fatullah* atau mandataris tuhan di muka bumi ini.

Sedangkan pendidikan Barat yang merupakan kiblat global dari paradigma pendidikan dunia era kontemporer mengalami fluktuasi kritis yang mengandalkan pikiran (*reason*) dan mereduksi landasan wahyu sakral tuhan. Secara historis, akar pendidikan Barat menancap pada pemikiran dan pendidikan Yunani, Romawi, Arabic Learning,¹⁴ Kontribusi Medieval, Kontribusi Renaissance,¹⁵ Reformasi Religi,¹⁶

¹³ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 149.

¹⁴ Tentang peta perjalanan filsafat mulai dari Yunani sampai masuk ke dunia Timur atau diadopsi oleh orang Islam lihat Muhammad Roy, *Ushul Fiq'h Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles Dalam Qiyas Ushul fiq'h*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), 1-10.

¹⁵ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 124-126.

¹⁶ Reformasi Religi merupakan awal dari gerakan *the reason of age* yang bermula dari penemuan Nicolaus Copernicus (1473-1543), seorang ilmuwan yang mengumandangkan teori bahwa matahari sebagai pusat tata surya (*heliosentris*), Johannes Kepler (1571-1630) yang menemukan hukum gerak planet, Galileo Galilei (1564-1626), dan sederet nama-nama lainnya. Sejak abad ini, dimulailah satu proyek besar ambisius oleh masyarakat barat, yaitu apa yang mereka sebut dengan modernisasi. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa pada abad-abad pertengahan, kajian tentang bidang Fisika -baca sains- dimaksudkan untuk membantu memberikan penjelasan teologi-intuitif-religius- akan tetapi revolusi Copernicus situasinya menjadi lain karena terjadinya ketegangan (konfrontatif) antara dua pendapat yaitu Gereja dengan "geosentris" dan Copernicus dengan "Heliosentris". Sebab pada abad pertengahan peran agama (Gereja) mendominasi kinerja

dan Gerakan *The Age of Reason*. Berpangkal dari optimisme filosofis, fungsionalisasi pendidikan dalam konteks *needs for social, politic, economic* dan sebagainya, serta proses dialektika Socratic yang diklaim universalis di era *Ancien Greece* secara faktual menjadi basis bagi ujung hasil kerja pikir yang menformulasikan *Natural Laws*.

Hukum natural ini sebagai puncak dari gerakan *The Age of Enlightenment* yang diprosesi melalui *reason and Scientific method* dengan konsistensi kausalis dogmatisasi rasio atau *supremacy of reason*. Aksioma prima dari *natural laws* menyatakan alam ini berjalan menurut suatu proses keteraturan yang pasti, pandangan ini merupakan pandangan Descartes yang melihat alam semesta materi adalah mesin dan tidak lebih dari sekedar mesin yang bekerja secara mekanik sejalan dengan mekanika Newton,¹⁷ lalu menjadi sumber energi bagi semua tatanan keilmuan Barat. Memberangkatkan prediksi-perediksi keilmuan dari titik keajegan-keajegan yang tergeneralisasikan oleh kesepakatan metodologik telah menjadi credo dalam mengkonstruksi ilmiah dengan paramadigmatikanya.

dari filsafat yang hampir seluruh kerja filsafat untuk Gereja dan di bawah kontrol Gereja. Dan bagi Descartes sendiri akhirnya mengkonstruksi pola pikir dualisme. Descartes membedakan antara *a world of experience* dan *a world of experience* (dunia pengalaman dan dunia luar pengalaman). Kedua terpisah, beda dan tidak terkait. A. Khozin Afandi (pentj.), *Pengetahuan Modern dalam Qur'an ...* Op. Cit., 62.

¹⁷ Ki Ashad Kusuma Jaya, *Serat Bayan Budiman: Limit Memahami Matematika Siti Jenar (Sebuah Pengantar Editor)*, dalam Abdul Munir Mul-khan, *Makrifat Burung Surga dan Ilmu Kesempurnaan Syekh Siti Jenar*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), xiv.

Dengan paradigma *scientific method* yang berlandaskan pada rasionalistik-empirisisme¹⁸ dalam membangun kerangka ilmiahnya, pendidikan Barat membangun frame dasar, tujuan, system dan lain sebagainya dari dasar filsafat pendidikannya. Dengan landasan tersebut, pendidikan Barat mampu membangun *historical humanity civilization* yang maju dan modern dari aspek sains dan teknologinya, namun seperti yang diungkapkan oleh Kilpatrick yang mengutarakan bahwa hasil kajian tentang nilai dan kepercayaan orang Amerika yang berjudul *The Day American Told The Truth* pada tahun 1990 menyatakan bahwa pergaulan bebas dan hubungan seksual sebelum kawin merupakan hal yang sudah lazim dan tak perlu diperbincangkan lagi,¹⁹ artinya pendidikan barat mengalami dekadensi moral dalam format system pendidikannya. Padahal pendidikan Barat dapat di klaim berakar falsafah dan diungkapkan secara ilustratif bagi penyingkapan fenomena *historical background* dari Pendidikan Islam. Namun dalam implementasi-praksisnya pendidikan Barat lebih menekankan pada sisi pengajaran daripada sisi pendidikannya,²⁰ yang pada sisi pengajaran

¹⁸ Perpaduan antara rasionalisme dan empirisme dalam satu paket epistemologi oleh Ahmad Tafsir disebut dengan metode ilmiah (*scientific method*). Ahmad Tafsir. *Filasafat Umum ...* Op. Cit., 25.

¹⁹ Muhammad A. R., *Pendidikan Di Alaf Baru: Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan*, (Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003), 103.

²⁰ Sementara Ainurrofiq Dawam memperingati bahayanya jika ada dikotomisasi pada pendidikan dan pengajaran, yang pertama adalah dikotomisasi, apapun alasannya, adalah mengikuti model strategi politik penjajah kedua, dikotomisasi bertentangan dengan ajaran manapun, yang ketiga, dikhotomisasi sebenarnya hegemonisasi dan dominanisasi rasio-

banyak menekankan pada *transfer of knowledge an sich* daripada aspek *transfer of values and morality*. Pada tataran inilah pendidikan Barat dapat di nilai telah mereduksi sebagian nilai integralistik dari sistem pendidikan Islam yaitu aspek *transfer of values and morality* yang berlandaskan pada wahyu verbal Tuhan (Al-Qur'an dan As-Sunnah/Al-Hadist).

Upaya pendidikan Barat dalam menciptakan atau melahirkan manusia yang cerdas dan memiliki *skill of life and skill of academic* yang matang sangat berhasil dengan memproduksi manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan dan skill-tehnologik. Dengan kecanggihan ilmu pengetahuan sekarang ini membuka ruang dan cakrawala baru dalam tatanan peradaban kehidupan manusia. Betapa tidak, sesuatu yang dahulunya dianggap tabu, misteri dan merupakan wilayah metafisis bahkan teologis, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi riil dan lumrah.²¹ Seiring dengan perjalanan waktu, manusia semakin terpesona dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai produk kerja ratio. Bahkan ironisnya, hanya dikarenakan berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sebagai

nalisme-materialisme, dan yang keempat, dikotomisasi menyebabkan terjadinya aliansi seseorang dari masyarakat. Lihat Ainurrafiq Dawam, "Emoh" Sekolah: Menolak "Komersialisasi Pendidikan" dan "Kanibalisasi Intelektual", Menuju Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003), 38-44.

²¹ Nur Hamzah, *Absurditas Manusia Modern: Sebuah Rekonstruksi Spiritual Manusia Modern*, makalah yang dibentangkan dalam acara *Annual Conference* di Grand Hotel Lembang Jawa Barat pada tanggal 26-30 Nopember 2006, 1.

tawaran dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian hari kian berkembang, manusia telah berani meniscayakan “rasio” yang terbukti telah berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tanpa disadari seiring dengan itu pula ia telah mereduksi keniscayaan realitas lainnya termasuk agama sebagai sumber dari moralitas manusia dengan berbagai elemen spiritual yang terkandung di dalamnya.

Fenomena ini muncul disebabkan oleh landasan dunia pendidikan yang lebih bersandar pada paham materialisme yang mementingkan sisi luar dari manusia dan aliran positivisme yang menekankan pada *link and match* dari sebuah produk pendidikan.²² Oleh sebab itu, pendidikan harus berlandaskan pada nilai filosofis yang tidak mengaliansikan jiwa manusia terhadap humanitasnya sendiri, artinya nilai filosofis pendidikan tersebut harus mampu mengkonstruksi nilai humanitas yang universal seperti nilai humanitas yang bersumber pada spiritual-transendental atau yang terkodifikasi dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (al-Hadist). Beda halnya dengan Yunahar Ilyas dalam bukunya “Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an”, seperti yang dikutip oleh M. Sukidi, mengatakan bahwa pendidikan yang masih sangat dipengaruhi oleh intervensi kekuasaan akan mengakibatkan produk pendidikan lebih banyak melahirkan manusia-manusia robot dan mekanis, dari pada manusia yang imajinatif, kreatif dan berbudaya.²³ Sampelnya adalah pandangan masyarakat Indonesia yang mengklaim bahwa

²² M. Suyudi, *Pendidikan dalam Perspektif ...Op. Cit.*, 211.

²³ *Ibid.*, 212.

pendidikan diinterpretasikan hanya untuk mengejar selembat sertifikat atau ijazah yang diakuinya dengan sekuat tenaga bahkan dengan berbagai cara termasuk cara-cara yang licik.²⁴ Atau masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa UAN menjadi parameter normatif pendidikan Indonesia, dan secara evolutif sistem pendidikan Indonesia pelan-pelan berupaya menciptakan manusia-manusia yang hanya sanggup berhadapan dengan kertas ujian dan tak *capable* berperan sebagai *problem solver* untuk setumpukan krisis multidimensi negara Indonesia.²⁵

Maka kebangkitan -baca peradaban manusia melalui pendidikan- bukan hanya memadukan yang *aqliyah* (intransendental) dengan yang *naqliyah* (transendental), melainkan juga mengorientasikan ilmu bagi upaya pengabdian pada penciptanya, teknologi yang teistik.²⁶ Lingkup keseimbangan (*balance*) antara aspek yang horizontal dan yang vertikal merupakan ranah operasional-aplikatif dan juga merupakan prinsip dasar dari pendidikan Islam.²⁷ Prinsip kesimbangan ini di dalam wahyu verbal Allah yaitu al-Qur'an disinyalir dalam surat Al-'Asr ayat 1-3 yang berbunyi:

²⁴ Ainurrofiq Dawam, "Emoh" Sekolah ... Op. Cit., 31.

²⁵ Syarif Hidayah Santoso, UAN Itu Perlu, Tapi dalam Jawa Pos 8 Mei 2004.

²⁶ Abd. Halim Soebahar, Wawasan Baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 70.

²⁷ *Ibid.*, 75. Bahkan tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan dalam kurikulum pendidikan Islam prinsip keseimbangan juga ditekankan. Lihat Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 520.

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (٣)

Artinya: "Demi Masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran". (Al-'Ashr 103: 1-3)²⁸

Iman adalah unsur yang terkait dengan hal yang spiritual, sementara amal (*action*) adalah yang berkaitan dengan yang material, akan tetapi dalam perspektif Tuhan dua entitas tersebut merupakan satu keterkaitan. Sayyid Quthb dalam tafsirnya "Fi Zhilalil Qur'an" mengatakan bahwa iman adalah indikasi yang menunjukkan fitrah dan selamatnya eksistensi manusia. Ia juga menunjukkan keselarasannya dengan fitrah alam semesta, dan menunjukkan adanya interaksi manusia dengan alam sekitarnya.²⁹ Artinya aspek vertikal dan aspek horizontal merupakan dua entitas yang integral dalam satu kesatuan dan merupakan penyempurna kesempurnaan kemanusiaan manusia. Dalam pandangan pendidikan Islam hal tersebut dikenal dengan prinsip integralistik, artinya manusia dan segala yang ada padanya harus dikembangkan pada satu muara, yakni kebajikan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan.³⁰

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), 1099.

²⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil ...* Op. Cit., 233.

³⁰ Abd. Halim Soebahar, *Wawasan Baru ...* Op. Cit., 74.

C. PENDIDIKAN ISLAM: DESKRIPSI PENGANTAR DISKURSUS

Konsep Pendidikan Islam merupakan sistem dan cara hidup (*style of life*) dalam segala bidang kehidupan manusia, sehingga dalam sejarah hidup umat manusia di muka bumi ini hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat transfer kebudayaan dan juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Karena Pendidikan Islam sudah menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia hingga pada gilirannya dapat menolong manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di hari akhir kelak, maka peran pendidikan mendapat tempat yang sangat krusial di segala aspek kehidupan manusia yang bermuara pada tujuan filosofis hidup manusia sendiri.

Berdasarkan deskriptif di atas, maka untuk memahami pendidikan Islam secara komprehensif dalam mereparasi dan mentransformasi manusia menjadi “Tuhan”, maka perlu di ketahui tentang hal-hal berikut ini: 1). Pengertian Pendidikan Islam; 2). Dasar-dasar Pendidikan Islam; dan 3). Tujuan Pendidikan Islam. Tiga aspek tersebut akan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pendidikan Islam dalam membentuk manusia paripurna (*insan kamil*) sebagai salah satu faktor atau ikon yang sangat urgen dalam eksistensi masyarakat modern.

Maka untuk lebih detail dan komprehensifnya tentang wacana ini, maka penulis mencoba untuk memberikan deskripsi tentang tiga aspek tersebut:

1. Pengertian Pendidikan Islam

Di dalam khazanah pemikiran pendidikan Islam terutama karya-karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat berbagai istilah yang digunakan oleh ulama' dalam memberikan pengertian tentang "Pendidikan Islam" dan sekaligus untuk diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda.

Muhammad S. A. Ibrahimy memberikan definisi bahwa pendidikan Islam adalah: *Islamic education in the true sense of learn, is a system of education wich enables a man to lead his life according of the islamic ideology, so that he may easily mould his life accordance with tenets of Islam.*³¹ Dan menurut Zakiyah Daradjat, pendidikan Islam didefinisikan dengan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan srta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.³² Definisi lain menyebutkan bahwa pendidikan Islam merupakan proses yang mengarahkan manusia pada kehidupan yang baik dan mengangkat derajat kemusiaannya sesuai dengan kemampuan fitrah³³ dan ke-

³¹ Saiful, *Tujuan Pendidikan Islam: Tinjauan Kritis atas Pemikiran Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi* (Laporan Penelitian), (Jember: STAIN Jember, 1999), 10.

³² Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 130.

³³ Fitrah berarti potensi dasar manusia, dalam struktur jasmani dan rohani, Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang, yang dalam psikologi disebut potensialitas atau disposisis, dan menurut aliran psikologi behaviorisme disebut prepotence

mampuan ajarnya (pengaruh dari luar).³⁴ Pendidikan Islam itu menurut Hasan Langgulung, setidaknya tercakup dalam delapan pengertian yaitu, *al-tarbiyah al-diniyah* (pendidikan keagamaan), *ta'lim al-din* (pengajaran agama), *al-ta'lim al-diny* (pengajaran keagamaan), *al-ta'lim al-islamy* (pengajaran keIslaman), *tarbiyah al-muslimin* (pendidikan orang-orang islam), *al-tarbiyah fi al-islam* (pendidikan dalam islam), *al-tarbiyah inda' al-muslimin* (pendidikan dikalangan orang-orang Islam) dan *al-tarbiyah al-Islamy* (pendidikan Islam).³⁵

Para ahli pendidikan Islam biasanya telah menyoroti istilah-istilah tersebut yaitu istilah *At-Ta'diib*, *At-Ta'lim* dan *At-tarbiyah* dari aspek perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Muhammad Athiyyah al-Abrasyi dan Mahmud Yunus menyatakan bahwa istilah *Tarbiyah* dan *Ta'llim* dari segi makna istilah maupun aplikasinya memiliki perbedaan mendasar, mengingat dari segi makna istilah *tarbiyah* berarti mendidik, sementara *ta'llim* berarti mengajar, dua

reflexes (potensi dasar yang secara otomatis dapat berkembang). Lebih detailnya lagi lihat dalam M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2003), 42-52. Dan dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Rum ayat 30, yang mendeskripsikan hubungan antara makna fitrah dengan agama Allah. Hubungan fitrah dengan "din" tidak konfrontatif, malah sebaliknya saling melengkapi. Dan hubungan ini diperjelas lagi pada surat Al-Araf ayat 172, yang menceritakan tentang drama dialog teologis antara manusia dan Allah.

³⁴ Sutrisno, *Revolusi Pendidikan di Indonesia: Membedah Metode dan Teknik Pendidikan Berbasis Kompetensi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2005), 125.

³⁵ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 36.

istilah tersebut secara substansial tidak bisa disamakan.³⁶ Imam Baidawi mengatakan bahwa istilah pendidikan (*tarbiyah*) lebih cocok untuk digunakan dalam pendidikan Islam.³⁷ Sedangkan Abdul Fattah Jalal dari hasil kajiannya memberikan kesimpulan bahwa istilah pengajaran (*ta'llim*) lebih luas jangkauannya dan lebih umum sifatnya dari pada pendidikan.³⁸ Di kalangan penulis Indonesia istilah pendidikan biasanya lebih diarahkan pada pembinaan watak, moral, sikap, dan kepribadian, atau lebih mengarah pada afektif, sementara pengajaran lebih diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan atau menonjolkan dimensi kognitif dan psikomotor. Kajian lainnya berusaha membandingkan dua istilah di atas dengan istilah *ta'dib*, sebagaimana dikatakan oleh Syed Naquib al-Attas, yang lahir di Bogor Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931 dan kini menjadi warga negara Malaysia, seperti yang dikutip oleh Abd. Halim Soebahar³⁹ bahwa dari hasil kajiannya ditemukan bahwa istilah *ta'dib* lebih tepat untuk di gunakan dalam konteks pendidikan Islam, dan kurang setuju terhadap penggunaan istilah *tarbiyah* dan *ta'lim*.

Terminologi di atas, terkesan belum terlihatnya penekanan pada nilai-nilai religius sebagai nilai yang tidak

³⁶ Abd. Halim Soebahar, *Wawasan Baru Pendidikan ...Op. Cit.*, 6.

³⁷ *Ibid.*, 11.

³⁸ *Ibid.*, 4

³⁹ *Ibid.*, 2. Atau lebih detailnya lihat Aminullah El-Hady, *Pendidikan Berwawasan Islam: Tarbiyah Atau Ta'dib (Tinjauan Terhadap Pandangan Naguib Al-Attas)*, dalam *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 4, No. 3, Desember 2001, 67-73.

terlepaskan pada diri manusia dan sebagai nilai kontrol. Untuk itu, para ahli ilmuwan muslim yang lain, mencoba untuk mendefinisikan terminologi pendidikan dalam perspektif Islam yang secara khusus pada beberapa visi antara lain:

M. Arifin, memandang bahwa, pendidikan Islam adalah “suatu proses sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah (anak didik) dengan berpedoman pada ajaran Islam”.⁴⁰ Dan pendidikan Islam merupakan usaha dari orang dewasa (muslim) yang bertakwa, yang secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan fitrah (potensi dasar) anak didik melalui ajaran Islam kearah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan Burlian Somad, seperti yang dikutip oleh Djamaluddin dalam bukunya “Kapita Selektta Pendidikan Islam”, mengatakan bahwa pendidikan Islam sebagai pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang ber-corak diri, berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya adalah mewujudkan tujuan itu, yaitu ajaran Allah.⁴¹ Sedangkan Ahmad D. Marimba, melihat bahwa pendidikan Islam adalah suatu konep yang berupa bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.⁴² Dengan demikian, memungkinkan

⁴⁰ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan...Op. Cit.*, 29.

⁴¹ Djamaluddin, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

⁴² *Ibid.*

anak didik -baca peserta didik- dapat hidup sesuai dengan perkembangan lingkungan di mana ia berada.

Pengertian di atas juga sejalan dengan hasil seminar Islam se-Indonesia tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Mei 1960 di Cipayung-Bogor bahwa Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam”.⁴³ Sedangkan M Kamal Hasan, sebagaimana di kutip Taufiq Abdullah dan Sharon Shiddique, memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah “suatu proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi, dan fisik.”⁴⁴ Sehingga seseorang muslim disiapkan dengan baik untuk melaksanakan tujuan kehadirannya di sisi Tuhan sebagai hamba dan wakilnya dimuka bumi.

Dari pengetahuan yang di bangun oleh ilmuan muslim dalam mendefinisikan pendidikan Islam tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah rangkaian proses sistematis, terencana dan komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada peserta didik, mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik sehingga mampu melaksanakan tugasnya dimuka bumi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyah yang di dasarkan pada ajaran agama (al-Qur'an dan al-Hadist) pada semua dimensi kehidupannya.

⁴³ *Ibid.*, 11.

⁴⁴ Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ga ya Media Pratama, 2001), 93

Dengan dimensi tersebut, akan berimplikasi pada pendidikan itu sendiri, antara lain:

1. Pendidikan di lakukan oleh pendidik yang benar-benar kompeten di bidangnya, tanpa terkelupasnya nilai agama pada dirinya.
2. Pendidikan dilakukan dengan berdasarkan normatif Ilahiyah.
3. Pendidikan di lakukan sesuai dengan potensi anak didik.
4. Pendidikan tidak hanya sekedar berorientasi pada kehidupan duniawi, akan tetapi juga berorientasi pada kehidupan ukhrawi.
5. Pendidikan harus bertanggung jawab penuh pada perkembangan anak didik, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah.
6. Pendidik harus merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan *sunnatullah*.
7. Proses pendidikan harus melihat semua saluran, baik saluran formal, informal, maupun nonformal, dalam upaya mengembangkan pribadi anak didik sehingga mampu menangkai nilai-nilai amoral.

Dari implikasi tersebut di atas, akan terciptalah suatu interaksi yang komunikatif antara pendidik dan anak didik dan masyarakat secara integral dalam upaya meningkatkan generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada khaliknya.

2. Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Dari terminologi pendidikan Islam yang disebutkan, salah satu syarat utama dalam upaya meneruskan dan mengekalkan nilai kebudayaan dan sebuah masyarakat. Dengan demikian, pendidikan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan bagi sebuah masyarakat. Agar pendidikan dapat melaksanakan fungsinya serta bermanfaat bagi manusia, maka perlu acuan pokok yang mendasarinya karena pendidikan merupakan bagian yang terpenting dari kehidupan manusia yang secara kodrati adalah insan pedagogis, maka acuan yang menjadi dasar adalah nilai yang tertinggi dari pandangan hidup suatu masyarakat dimana pendidikan itu dilaksanakan, maka yang menjadi pandangan hidup yang Islami adalah nilai yang transenden, universal dan eternal.

Dasar pendidikan Islam dimaksudkan dalam penelitian ini dapat penulis bagi menjadi dua bagian, yaitu: *dasar ideal* dan *dasar operasional*. Para pemikir muslim membagi sumber atau dasar nilai ideal yang dijadikan acuan dalam pendidikan Islam menjadi empat bagian yaitu: al-Qur'an, Hadits (as-sunnah), alam semesta (*al-kaun*) dan ijtihad (ijma' Ulama). Sedangkan dasar nilai operasional di bagi menjadi enam bagian, yaitu: dasar historis, dasar sosial, dasar ekonomi, dasar politik dan administrative, dasar psikologis dan dasar filosofis.

a. Dasar Nilai Ideal

Seperti yang telah dipaparkan di atas, secara eksplisit keempat sumber dasar nilai ideal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang memiliki perbendaharaan luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia. Menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang diungkapkan oleh Subhi Shalih, yang dikutip oleh Atang Abd. Hakim, al-Qur'an berarti bacaan.⁴⁵ Sedangkan M. Quraish Shihab menambahkan arti al-Qur'an dengan bacaan sempurna.⁴⁶ Pengertian tersebut didasarkan pada sifat al-Qur'an yang difirmankan-Nya dalam al-Qur'an dalam surat al-Qiyamah ayat 17-18 yang menerangkan:

إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨)

Artinya: "Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (didadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu". (QS al-Qiyamah: 17-18)⁴⁷

Ia merupakan sumber pendidikan terlengkap baik itu pendidikan kemasyarakatan (sosial), moral (akhlak), maupun spritual (kerohanian), serta material (kejasmanian) dan

⁴⁵ Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 69. Dan di Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan ... Op. Cit.*, 15.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an ... Op. Cit.*, 3.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan ... Op. Cit.*, 999.

alam semesta. al-Qur'an merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh. Eksistensinya tidak akan pernah mengalami perubahan ia merupakan pedoman normatif-teoritis bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang memerlukan penafsiran lebih lanjut bagi operasional pendidikan Islam.

Bila melihat begitu luas dan persuasifnya al-Qur'an dalam menuntun manusia, yang kesemuanya merupakan proses pendidikan kepada manusia menjadikan al-Qur'an sebagai kitab dasar utama bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Mouricce Bucaille, seorang Dokter ahli bedah kebangsaan Perancis, kagum akan isi dan kandungan al-Qur'an mengatakan bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang objektif dan memuat petunjuk bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern, kandungan ajarannya sangat sempurna dan tidak bertentangan dengan hasil penemuan sains modern.⁴⁸ Atau seorang penulis Marxis, Maxime Rodinson, seperti yang dikutip oleh seorang ilmuwan Islam yaitu Yusuf Qardhawi dalam bukunya "Tuhan Tak terkuburkan", juga kagum pada isi kandungan Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang memberikan proporsi besar pada rasionalisme akal.⁴⁹

Rujukan di atas memberikan kesimpulan yang jelas bahwa orientasinya yang di muat dan dikembangkan al-Qur'an bagi kepentingan manusia dalam melaksanakan amanat dari

⁴⁸ Maurice Bucaille, *Al-Qur'an dan Sains Modern*, dalam A. Khozin Afandi (Peterj.), *Pengetahuan Modern dalam Al-Qur'an*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 18.

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Tuhan Tak terkuburkan: Sebuah Analisis Relevansi Agama di Era Sains*, (Jakarta Timur: Azan, 2001), 3.

Allah. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber tersebut dengan berpegang kepada nilai-nilai al-Qur'an terutama dalam pendidikan Islam sehingga akan mampu mengarahkan dan mengantarkan manusia bersifat dinamis, kreatif, serta mampu mencapai nilai-nilai ubudiyah pada khaliknya. Dengan sikap ini, maka proses pendidikan Islam akan senantiasa terarah dan mampu menciptakan dan mengantarkan *out-putnya* sebagai manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukannya.

Seluruh dimensi ini memiliki misi implikasi kependidikan yang bergaya interatif, motifatif, dan persuatif-dinamis sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh. Proses pendidikan tersebut bertumpu pada kemampuan rohaniyah dan jasmaniah masing-masing individu peserta didik secara bertahap dan berkesinambungan tanpa melupakan kepentingan perkembangan zaman dan nilai-nilai ilahiyah. Semua proses pendidikan Islam ini merupakan proses konservasi dan transformasi serta internalisasi nilai-nilai dalam kehidupan manusia sebagaimana yang diinginkan oleh ajaran Islam. Dengan upaya ini diharapkan peserta didik mampu hidup secara serasi dan seimbang, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

2. Hadits (as-Sunnah)⁵⁰

Ketika merujuk pada sumber utama agama Islam, yakni al-Qur'an, maka akan ditemukan statemen bahwa nabi Muhammad yang dinyatakan sebagai rasul merupakan "Uswah Hasanah" yang paling utama bagi umatnya, yakni yang benar-benar beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Seperti yang diproklamirkan dalam surat al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) rasulullah itu suru tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengaharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah". (QS. Al-Ahzab 33: 21)⁵¹

Atau sebuah ayat dalam surat al-Hasyr 59 ayat 7 menerangkan bahwa apa yang diberikan rasul padamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah.

⁵⁰ Di masa Rasulullah pemeliharaan terhadap sunnah tidak dilakukan seperti terhadap al-Qur'an. Ketika itu beliau tidak memperkenalkan orang menulisnya, sebab masih dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara al-Qur'an dan selainnya. Untuk mencatat wahyu al-Qur'an yang turun, beliau mempunyai sekretaris sebagai pencatat khusus, yaitu Zaid Bin Tsabit. Sunnah atau Hadist baru dibukukan secara resmi pada masa khalifah Umar bin Abd. Aziz dari Bani Umayyah pada akhir abad I Hijrah, atau sekitar 90 tahun setelah Rasulullah wafat. Lihat Nur Rodjiah Kurmen. *Kedudukan Sunnah dan Fenomena Inkarussunnah*, dalam Jurnal Al-Adalah Vol. 4, No. 2, Agustus 2001, 70.

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan ...* Op. Cit., 670.

Dalam paradigma yang sudah lazim antara sunnah dan hadist merupakan dua kata satu arti, artinya sunnah merupakan padanan dari kata hadist. Akan tetapi, ada pula yang membedakan antara hadist dan sunnah. Seperti yang dijelaskan oleh Nur Rodjiah Kurmen bahwa sunnah menurut al-Shalih diartikan secara bahasa dengan jalan atau cara, al-Siba'i mengartikan jalan atau cara yang terpuji maupun yang tercela, sedangkan al-Jurjani mengartikan dengan seperti yang jalan atau cara yang direlakan maupun yang tidak direlakan.⁵² Zakiah Derajat, diungkapkan oleh Saiful, mengartikan al-Sunnah sebagai perkataan, perbuatan ataupun pengakuan rasulullah.⁵³

Dan hadist artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan dan cerita. Menurut ahli hadist, hadist adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan nabi Muhammad atau segala berita yang bersumber dari nabi Muhammad atau segala berita yang bersumber dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, takrir (peneguhan kebenaran dengan alasan), maupun deskripsi sifat-sifat Nabi Saw.⁵⁴ Ada salah satu pendapat yang melimitasi hadist seperti yang diungkapkan oleh Mohammed Reza Modarreseh bahwa hadist dapat berupa satu dari tiga berikut ini: a). Perkataan Rasulullah SAW; b). sikap rasulullah SAW; c). Pernyataan setuju dari Rasulullah SAW dengan cara diam atau membiarkannya.⁵⁵

⁵² Nur Rodjiah Kurmen, *Kedudukan Sunnah ...* Op. Cit., 71.

⁵³ Saiful, *Tujuan Pendidikan Islam ...* Op. Cit., 6.

⁵⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jilid 2), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 41.

⁵⁵ Mohammed Reza Modarreseh, *Syiah dalam Sunnah: Mencari Titik Temu*

Hadits atau as-Sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah di contohkan Nabi dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan dakwah Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu: Hadits *qauliyah*, *fi'liyah* dan *takririyah*. Ini merupakan sumber dan acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Hal ini disebabkan, meskipun secara umum bagian terbesar dari syariat Islam telah terkandung dalam al-Qur'an namun muatan hukum tersebut belum mengatur berbagai dimensi aktifitas kehidupan umat secara terperinci dan analitis.

Dari sinilah dapat dilihat bagaimana posisi Hadist Nabi sebagai sumber atau dasar pendidikan Islam yang utama setelah al-Qur'an. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan Ilahiyah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, maupun yang terdapat dalam al-Qur'an tetapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci.

Untuk memperkuat kedudukan Hadist sebagai sumber atau dasar inspirasi pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat dilihat dari firman Allah yang berbunyi:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Artinya: "Barang siapa yang taat kepada Rasul sesungguhnya ia pun taat kepada Allah". (QS An-Nisa': 80)⁵⁶

yang Terabalkan, (Tanpa kota penerbit: Citra, 2005), 58.

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan ...* Op. Cit., 132.

Dari ayat tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa kedudukan Hadist Nabi merupakan dasar utama yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan pendidikan Islam yang dapat ditiru dan dijadikan referensi teoritis maupun praktis. Robert L Gullick, sebagaimana yang disetir oleh Jalaluddin Rahmat, mengakui akan keberadaan Nabi sebagai seorang pendidik yang paling berhasil dalam membimbing manusia kearah kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, proses yang ditunjukkan dapat dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan pendidikan Islam.⁵⁷

Dalam dataran pendidikan Islam acuan tersebut dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu: *pertama*, sebagai acuan syar'iyah, yang meliputi muatan-muatan pokok ajaran Islam secara tertulis. *Kedua*, acuan operasional aplikatif yang meliputi cara Nabi memainkan peranannya sebagai pendidik dan sekaligus sebagai evaluator yang profesional, adil dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Proses pendidikan Islam yang ditunjukkan Nabi Muhamad SAW. Merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan yang bersifat fleksibel dan universal sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik, kebiasaan (adat istiadat) masyarakat, serta kondisi alam dimana proses pendidikan tersebut berlangsung dengan di balut oleh pilar-pilar akidah Islamiyah.

Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam yang dilakukan Nabi dapat dibagi dua bentuk, yaitu: *pertama*, pola

⁵⁷ Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan...* Op. Cit., 98.

pendidikan saat Nabi di Mekkah, pada masa ini Nabi memanfaatkan potensi akal masyarakat Mekkah yang terkenal cerdas, mengajarnya membaca, memperhatikan dan memikirkan kekuasaan Allah. Baik yang ada di alam semesta maupun yang ada dalam dirinya. Secara konkrit, pemetaan pendidikan pada periode ini dapat dibagi menjadi empat aspek utama yaitu: pendidikan ahlak, dan budi pekerti, pendidikan jasmani, dan menjaga kebersihan. *Kedua*, pola pendidikan saat Nabi di Madinah, secara geografis Madinah merupakan daerah agraris dengan ini pola pendidikan yang diterapkan Nabi lebih berorientasi pada pemantapan nilai-nilai persaudaraan. Dengan ini, pendidikan Islam dapat dijadikan sebagai piranti yang tangguh dan adaptik dalam mengantarkan peserta didiknya membangun peradapan yang bernuansa Islam.

3. Alam Semesta (*al-kaun*)

Dasar pendidikan Islam yang ketiga adalah alam semesta (*al-kaun*) atau yang di sebut pula dengan ayat al-Kauniyah yang selalu dijadikan bahan telaah bagi para kaum intelektual. Bahkan awal turunnya wahyu (al-Qur'an) merupakan perintah membaca yang tercover dalam surat al-Alaq ayat 1-5 dan mengidentifikasi secara kuat, bahwa yang harus di baca pada waktu itu bukanlah al-Qur'an. Karena pada waktu turunnya ayat pertama, al-Qur'an pada waktu itu belum terkodifikasi, bahkan sama sekali tidak ada, tetapi perintah iqra' adalah agar membaca al-Kaun yang harus pula diorientasikan dan dida-

sarkan atas wawasan transendental, wawasan religius, wawasan ketuhanan. Sebab penciptaan al-Kaun tidaklah fregmentalis (parsial), melainkan sistemik, integral, kohoh, teratur, harmonis, dan merupakan universum yang eksak.

4. Ijtihad (Ijma' Ulama)

Ijtihad secara bahasa berarti berusaha secara sungguh-sungguh.⁵⁸ Sedangkan Umar Shihab menyatakan dalam "Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran" bahwa Ijtihad secara etimologis berarti kesulitan atau kerusuhan.⁵⁹ Dan dalam penelitian ini, makna atau pengertian ijtihad bermuara pada pengertian etimologis, seperti yang diungkapkan oleh Umar Shihab bahwa segala daya upaya yang mengarah pada pengkajian, baik dalam ilmu hukum maupun ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu kalam atau ilmu tasawuf, yang semuanya itu dikategorikan sebagai ijtihad. Dengan demikian, orang yang terjun dalam pengkajian tersebut, dikategorikan sebagai mujtahid.⁶⁰

Dalam meletakkan ijtihad sebagai sumber pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses penggalian dan penetapan hukum syari'ah yang dilakukan oleh para mujtahid muslim dengan menggunakan pendekatan nalar dan pendekatan-pendekatan lainnya. Secara independen, guna memberikan jawaban hukum atas berbagai persoalan umat

⁵⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam ... Op. Cit.*, 183.

⁵⁹ Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Di na Utama, 1996), 47.

⁶⁰ *Ibid.*, 49.

yang ketentuan hukumnya secara syari'ah tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Rasulullah. Oleh karena itu, lahan kajian-analitis ijtihad merupakan lahan kajian yang cukup luas, keluasan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang begitu bervariasi dan dinamis, seiring dengan perkembangan tuntutan akselerasi zaman termasuk di dalamnya aspek pendidikan sebagai aspek yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan dinamis manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin mengglobal dan mendesak menjadikan eksistensi ijtihad dalam bidang pendidikan mutlak diperlukan. Sasaran ijtihad pendidikan tidak saja hanya sebatas bidang materi atau isi kurikulum, metode, evaluasi dan bahkan sarana dan prasarana, akan tetapi mencakup seluruh sistem pendidikan terutama pendidikan Islam. Karena media pendidikan merupakan sarana utama untuk membangun pranata kehidupan sosial dan kebudayaan manusia. Indikasi ini memberikan arti bahwa maju mundurnya atau tanggung tidaknya kebudayaan manusia berkembang secara dinamis sangat ditentukan dari dinamika sistem pendidikan yang dilaksanakan. Dinamika ijtihad dalam mengantarkan manusia pada kehidupan yang dinamis harus senantiasa merupakan pencerminan dan penjelmaan dari nilai-nilai serta prinsip pokok al-Qur'an dan Hadist. Proses ini akan mampu mengontrol seluruh aktifitas manusia sekaligus sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya.

Dalam dunia pendidikan sumbangan ijtihad ikut secara aktif menata sistem pendidikan yang dialogis. Cukup besar

peranan dan pengaruhnya dalam menetapkan hukum pendidikan yang ingin dicapai meskipun secara umum rumusan tujuan tersebut telah disebutkan dalam al-Qur'an akan tetapi secara khusus tujuan-tujuan tersebut memiliki dimensi yang harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia pada suatu periodisasi tertentu yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut perumusan sistem pendidikan yang dialogis dan adaptik, baik karena pertimbangan perkembangan zaman maupun perkembangan kebutuhan manusia dengan berbagai potensi dan dimensinya yang dinamis, diperlukan upaya yang maksimal dan sistematis. Proses ijtihad harus merupakan kerja sama yang padu dan utuh, dengan perpaduan tersebut diharapkan akan lahir suatu sistem pendidikan yang utuh dan integral dalam bingkai religius keagamaan. Dengan sistem demikian, akan diperoleh sistem pendidikan yang cukup kondusif baik bagi pengembangan kebudayaan manusia maupun sebagai piranti dalam mengantarkan peserta didik untuk dapat melaksanakan amanatnya. Bila penjelasan diatas dicermati lebih lanjut, maka akan dapat terlihat dengan jelas bahwa eksistensi sumber atau dasar pendidikan Islam baik al-Qur'an, Hadist Rasulullah, maupun ijtihad para ulama merupakan suatu mata rantai yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain secara integral untuk mendapatkan suatu bentuk sistem pendidikan yang ummatik, sebagai langkah lanjut bagi proses mempersiapkan manusia yang berkualitas, baik kualitas intelektual maupun kualitas moral.

3. Tujuan Pendidikan Islam

Melihat posisi sentral manusia dalam proses pendidikan yang melibatkan potensi fitrah, cita rasa ketuhanan dan hakekat serta wujud manusia menurut pandangan Islam, maka tujuan pendidikan Islam adalah untuk aktualisasi dari potensi-potensi kemanusiaan tersebut. Karena potensi yang ada merupakan nilai-nilai ideal yang dalam wujud implementasinya akan membentuk pribadi manusia secara utuh, sempurna dan mandiri. Bahkan tujuan akhir dari Pendidikan Islam adalah untuk perwujudan penyerahan mutlak kepada Allah, pada tingkat individual, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya.⁶¹ Oleh sebab itu, Islam memandang, kegiatan pendidikan merupakan sistem integral yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia dari aspek eksoteris maupun esoteris.

Merujuk hasil kongres sedunia tentang tujuan pendidikan Islam adalah: kedudukan Islam harus mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, diri manusia yang rasional, perasaan dan indra. Karena itu pendidikan harus mencapai pertumbuhan manusia dalam aspeknya: spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa baik secara individual maupun secara kolektif dan mendorong aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan Islam terletak dalam perwujudan ketertundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas maupun seluruh umat manusia. Secara

⁶¹ Majalah Ummi No. 2/V Zulhijjah 1413 H, Juni 1993 M, 30.

analitis tujuan pendidikan Islam yang ingin diwujudkan nampak pada tujuan akhir (*ultimate aims of education*).⁶² Dan Ahmad D. Marimba memberikan merumusan mengenai fungsi tujuan pendidikan Islam yang harus mengenai empat macam yaitu: 1). Mengakhiri usaha; 2). Mengarahkan usaha; 3). Merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik tujuan-tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan utama; 4). Memberikan nilai (sifat) pada usaha-usaha itu.⁶³

Pada tataran konseptual-normatifnya, nilai-nilai yang perlu dikembangkan di dalam tujuan pendidikan Islam adalah nilai-nilai yang bersifat fundamental seperti nilai-nilai sosial, ilmiah, moral dan agama. Pendidikan menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup yang dapat memberikan informasi paling berharga mengenai pegangan hidup masyarakat umat manusia,sertamembantupesertadidikdalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial dalam menghadapi perubahan. Kalau mengutip beberapa pandangan tokoh pendidikan Islam yang meformulasikan tentang tujuan pendidikan Islam seperti Omar Muhammad at-Toumy as-Syaibani yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah perubahan yang diinginkan, yang diusahakan dalam proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dari kehidupan pribadinya atau

⁶² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002), 57.

⁶³ Djamaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 14.

kehidupan masyarakat serta pada alam sekitar di mana individu itu hidup atau pada proses pendidikan itu sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu kegiatan asasi dan sebagai proporsi di antara profesi asasi dalam masyarakat.⁶⁴

Berdasarkan tujuan tersebut memberikan ketegasan bahwa perubahan-perubahan yang diinginkan haruslah menyentuh tiga bidang utama yaitu tujuan-tujuan individual, sosial dan profesionalitas. Sementara menurut al-Ghazali, seperti yang di kutip oleh Djamaluddin dalam bukunya "Kapita Selekta Pendidikan Islam", menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu untuk membentuk manusia menjadi insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁵ Ibnu Taimiyah⁶⁶, lebih menyederhanakan tujuan pendidikan Islam ke dalam tujuan pokok yaitu: *Pertama*, membentuk individu muslim. *Kedua*, membentuk umat muslim dan *Ketiga*, dakwah Islam di dunia. Di samping itu Abbas Mahjub,⁶⁷ menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya serta aplikasinya dalam realitas kehidupan yang bertujuan menciptakan suatu sikap tanggung jawab untuk menghadapi berbagai tantangan dunia nyata. Pengem-

⁶⁴ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan...* Op. Cit., 29. Dan pengklasifikasian tujuan pendidikan Islam menurut al-Toumy lebih detailnya lihat dalam M. Misbahus Salam, *NU dan Transformasi Masyarakat Madani*, (Malang: Pustaka Bayan, 2005), 85-86.

⁶⁵ Djamaluddin, *Kapita Selekta ...* Op. Cit., 15.

⁶⁶ Ahmad Warid Khan, *Membebaskan Pendidikan Islam*, (Tanpa Kota: Istawa, 2002), 178.

⁶⁷ *Ibid.*, 179.

bagian ilmu pengetahuan dan aplikasinya tersebut sebagai bentuk kepedulian pendidikan Islam agar manusia mampu menghadapi kondisi dan situasi sosial budaya yang terus berubah. Begitu juga yang ditegaskan oleh Syaibani, bahwa tujuan pendidikan Islam harus dalam bentuk yang bersifat fisik (*ahdaf jismiyah*), yang bersifat mental (*ahdaf aqliyah*), dan yang bersifat sepiritual (*ahdaf ruhiyah*). Ketiga komponen itu harus mendapat perhatian sama. menurut tafsiran an-Nawawi, ketiga komponen tersebut yaitu fisik, mental dan sepiritual adalah merupakan bagian dari kekuatan iman. Superioritas atribut ragawi merupakan salah satu kualifikasi Thalut untuk menjadi seorang raja. Sebagaimana tersurat secara eksplisit dalam Ayat 247 surat al-Baqarah yang berbunyi:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَآدَهُ بَسْطُهُ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan meng-

anugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui". (QS Al - Baqarah: 247)⁶⁸

Sejarah kekuatan fisik merupakan salah satu tujuan utama, maka pendidikan harus bertujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan fisik menuju kepada pencapaian tubuh yang kuat. Pendidikan juga harus menghindarkan situasi yang memungkinkan terganggunya kesehatan fisik para siswa, dan latihan-latihan yang meningkatkan kesehatan fisik harus ditekankan karena hal ini akan membantu siswa menemukan kebutuhan biologis dari persefektif Qur'ani dan membentuk sikap positif terhadap kebutuhan tersebut.

Tujuan pendidikan Islam yang besar dan universal tersebut, bukan berlangsung temporal, tapi harus berkesinambungan sampai akhir dari babak sejarah kemanusiaan. Keberlangsungan kegiatan ini, tergantung pada manusia pelaksana (implementator), perangkat serta kontinuitas seluruh masyarakat pendidikan dalam merealisasikan konsep pendidikan itu pada tujuan yang benar. Dan formulasi tujuan tersebut sebenarnya merupakan arah dan tujuan pendidikan yang membentuk kepribadian paling tinggi dan merupakan tujuan tertinggi dari proses pendidikan. Karena setiap individu memiliki karakter dan identitas yang berbeda. Idealnya tujuan Pendidikan Islam adalah jangan sampai mengabaikan nilai-nilai moral-transendental, dan tidak hanya terpaku pada ide-ide statis. Tetapi menyertakan

⁶⁸ *Al-Qur'an Terjemah*, Departemen Agama, 60.

tuntutan riil dari kondisi sosial budaya yang berkembang sebagai acuan proses kontekstualisasi Pendidikan Islam.

D. PENUTUP

Dengan demikian pendidikan Islam sangat urgen untuk diaplikasikan sebagai bentuk pendidikan yang ideal dengan tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadist serta ijma ulama'. Bahkan dengan pendidikan Islam pula umat Islam akan mampu membangun peradaban yang telah dicapai dengan tetap berpegang pada dasar etik-legalistik seperti yang telah diterapkan oleh umat Islam abad pertengahan pada waktu itu. Penerapan tersebut bukan berlangsung temporal, tapi harus berkesinambungan sampai akhir dari babak sejarah kemanusiaan. Keberlangsungan kegiatan ini, tergantung pada manusia pelaksana (implementator), perangkat serta kontinuitas seluruh masyarakat pendidikan dalam merealisasikan konsep pendidikan itu pada tujuan yang benar. []



Bagian 2

PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENDEKATAN MULTIDISIPLINER:

**Suatu Pengantar Kajian Gradual
Menuju Paradigma Global**

A. PENDAHULUAN

Perubahan dalam realitas merupakan suatu hukum alam dan juga merupakan “realitas keagungan Tuhan” yang harus disikapi secara *flexible*. Perubahan yang terus bergulir akan mengubah perspektif yang memandang dunia ini penuh keteraturan menjadi dunia yang turbulen. Hal tersebut diindikasikan dengan berubahnya fase *newtonian* menjadi fase *quantum* dan *economical capital* menjadi *intellectual capital*. Perubahan-perubahan ini juga akan berimbas pada realitas konsumtif menuju realitas *reinventor* bahkan juga membangun realitas kompetitif-regional menjadi realitas kompetitif-global.

Perubahan tersebut akan membawa rancangan mekanisme atau aturan tersendiri yang akan menjadi suatu sistem nilai-nilai (*systems of values*) yang “luhur” dan juga menjadi pegangan setiap individu, keluarga, atau kelompok komunitas atau masyarakat tertentu, atau pada gilirannya bangsa dan negara tertentu. Hal ini pernah disinyalir oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdence, futurolog suami istri terkemuka dunia, pada era dekade tahun 90-an yang meramalkan bahwa abad 21 merupakan era baru.¹ Ternyata ramalan dua futurolog dunia tersebut menjadi “kebenaran tak terbantahkan” bahwa perubahan realitas/era telah menjadi era dengan nilai baru. Suatu era dimana yang menjadi bagian global dalam kehidupan manusia adalah fenomena ekonomi global dan informasi. Bahkan pola *relasi* menggantikan *hirarki* sebagai modal utama untuk menyelesaikan semua problema kehidupan.

Begitu juga dengan dunia pendidikan tidak akan lepas dari unsur perubahan, maka sangat wajar jika dari perspektif filosofis, pembelajaran (*learning*) oleh Peter M. Senge diartikan dengan *study and practice constanly*.² Karena hal tersebut tidak lepas dari hukum alam yang akan merongrong pendidikan untuk menapak tangga yang lebih tinggi dan juga menuntut untuk menempatkan eksistensinya sesuai dengan tuntutan realitas. Tetapi walaupun dalam realitas tersebut

¹ Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Benang Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 1.

² Peter M. Senge, *The Fifth Discipline*, (Los Angeles: Currency Doubleday, 1994), 23.

terus mengalir perubahan-perubahan yang menuntut hal lain pada dunia pendidikan dan juga pada manusia tetapi *curiosity* harus tetap menjadi spirit dalam hidup manusia. Artinya kedinamisan realitas harus diimbangi dengan gerakan konstruktif-solutif. Meminjam statemen dari Russel bahwa "*it is better to be clearly wrong than vaguely right*",³ maka sikap seperti itu seharusnya yang dibangun dalam tatanan kehidupan dalam lingkaran pendidikan dan manusia sendiri untuk memunculkan suatu sikap optimistik-selektif dan juga untuk menumbuhkan spirit dalam mencari *problem solving* untuk menjawab tuntutan realitas terhadap pendidikan (*way of life long education*).

Sebenarnya, esensi dari pendidikan itu sendiri adalah pengalihan (transmisi) kebudayaan (ilmu pengetahuan, teknologi, ide-ide, etika dan nilai-nilai spiritual serta estetika) dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam setiap masyarakat atau bangsa.⁴ Proses transmisi ini diharapkan mampu untuk menjadi nilai hidup dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (*Human Resources*) generasi berikutnya untuk menghadapi perubahan era baru.

³ Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 9.

⁴ Sedangkan John Dewey, seperti yang diikuti oleh A. Malik Fadjar mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan hidup (*a necessity of life*), sebagai bimbingan (*a direction*), sebagai sarana pertumbuhan (*a growt*) yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Pendidikan mengandung misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup serta perubahan-perubahan terjadi. A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: LP3NI, 1998), 54.

Oleh sebab itu, dalam tataran ini, sejarah pendidikan mempunyai sejarah yang usianya sesuai dengan alur usia masyarakat pelakunya sendiri, sejak dari pendidikan informal dalam keluarga batih, sampai kepada pendidikan formal dan non-formal dalam masyarakat agraris maupun industri. Artinya, rentang waktu yang dilalui oleh pendidikan sebagai bagian dari sejarah sosial kemanusiaan mempunyai hubungan erat dengan peradaban manusia itu sendiri dan juga rentang waktu perjalanan manusia di muka bumi. Dengan demikian, seperti yang diungkapkan oleh Edward Hallett Carr, yang dikutip oleh Djoko Soerjo, bahwa sejarah (pendidikan) merupakan suatu dialog tiada akhir antara masa kini dan masa lalu.⁵

Selama ini sejarah pendidikan masih menggunakan pendekatan konvensional yang umumnya bersifat diakronis yang kajiannya berpusat pada sejarah dari ide-ide dan tokoh pemikir besar dalam pendidikan, atau sejarah dan sistem pendidikan dan juga lembaga-lembaga, atau sejarah perundang-undangan dan kebijakan umum dalam bidang pendidikan. Pendekatan yang umumnya bersifat diakronis ini dianggap statis, sempit serta terlalu melihat ke dalam. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam pendidikan beserta segala macam masalah yang timbul atau ditimbulkannya, penanganan serta pendekatan baru dalam sejarah pendidikan dira-

⁵ Djoko Soerjo. *Sejarah Sosial Intelektual Islam: Sebuah Pengantar*, dalam Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Intelektual Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 26.

sakan sebagai kebutuhan yang mendesak oleh para sejarawan pendidikan kemudian.

Para sejarawan, khususnya sejarawan pendidikan melihat hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat; antara penyelenggara pendidikan dengan pemerintah sebagai representasi bangsa dan negara yang merumuskan kebijakan (*policy*) umum bagi pendidikan nasional. Produk (output) dari pendidikan menimbulkan mobilitas sosial (vertikal maupun horizontal); masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan yang dampak-dampaknya (positif ataupun negatif) dirasakan terutama oleh masyarakat sebagai konsumen pendidikan.

Fenomena pendidikan tersebut di atas merupakan lingkaran setan yang kita tidak bisa keluar dengan hanya mengadakan satu pendekatan yang bersifat diakronis. Apalagi dalam pendidikan Islam yang sampai sekarang masih mempunyai masalah serius yang dihadapi oleh sebagian besar konseptor pendidikan Islam yaitu rendahnya tingkat kemampuan memahami pendidikan Islam sebagai suatu "ilmu" dan pendidikan Islam sebagai suatu "lembaga pendidikan". Harus diakui, memahami pendidikan Islam sebagai suatu sistem ilmu pengetahuan dan membedakan pengertiannya dengan pendidikan Islam sebagai suatu lembaga pendidikan tidak semudah seperti memahami objek 'ilmu' bersifat abstrak sedangkan 'lembaga pendidikan' bersifat konkrit.

Sehubungan dengan di atas pendekatan sejarah pendidikan (Islam) baru tidak cukup dengan cara-cara

diakronis saja. Perlu ada pendekatan metodologis yang baru yaitu dengan pendekatan interdisipliner. Dalam pendekatan interdisipliner dilakukan kombinasi pendekatan diakronis sejarah dengan sinkronis ilmu-ilmu sosial. Pada era sekarang ini, ilmu-ilmu sosial tertentu seperti antropologi, sosiologi, dan politik telah memasuki "perbatasan" (sejarah) pendidikan dengan "ilmu-ilmu terapan" yang disebut antropologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan politik pendidikan. Dalam pendekatan ini dimanfaatkan secara optimal dan maksimal hubungan dialogis "simbiosis mutualistis" antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial.

Oleh sebab itu, penulis mencoba untuk mendeskripsikan pendidikan Islam dengan pendekatan kombinasi yaitu pendekatan diakronis sejarah dengan sinkronis ilmu-ilmu sosial yaitu sosiologi dan antropologi dengan memunculkan karakteristik-karakteristiknya dan juga tokoh-tokohnya. Serta yang terakhir penulis mencoba untuk memberikan alternatif-solutif tentang pendekatan yang harus digunakan untuk kajian pendidikan Islam ke depannya.

B. PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih detail tentang pendidikan Islam dalam pendekatan multidisipliner yaitu dari pendekatan historis (sejarah), antropologi, dan sosiologi, maka penulis sedikit memaparkan tentang definisi pendidikan dan pendidikan Islam. Dengan pendefinisian tersebut akan tercipta satu konsepsi dan persepsi tentang

pendidikan dan pendidikan Islam yang *intepretable*, karena tergantung penekanan pendefinisiannya. Hal pertama dilakukan dalam memori definisi tersebut adalah memaparkan definisi dari tokoh-tokoh yang selanjutnya penulis menyimpulkan pendapat para tokoh tersebut untuk mendapatkan definisi dari pendidikan Islam sebagai tema sentral dari pembahasan ini.

Menurut Crow and Crow, seperti yang dikutip oleh Fuad Ihsan dalam bukunya “Dasar-Dasar Kependidikan”, mengatakan bahwa pendidikan adalah proses yang berisikan berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.⁷

Sedangkan pendidikan Islam menurut Endang Saifuddin Anshori, seperti yang dikutip oleh Azyumardi Azra, adalah proses bimbingan (pimpinan, tuntutan, usulan) oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa (pikiran,

⁶ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 4.

⁷ *Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) Tahun 2003*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 2.

perasaan, kemauan, intuisi dan sebagainya) dan raga objek didik dengan bahan-bahan tertentu pada jangka waktu tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Sedangkan Muhammad S. A. Ibrahimy, sebagaimana yang dikutip oleh Syaiful dalam Laporan Penelitiannya, memberikan definisi bahwa pendidikan Islam adalah: *Islamic education in the true sense of learn, is a system of education wich enables a man to lead his life according of the islamic ideology, so that he may easily mould his life accordence with tenets of Islam.*⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang membimbing peserta didik pada perkembangan jiwa dan raganya yang berideologi pada ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadist.

1. Pendidikan Islam dalam Pendekatan Sejarah

Sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu, yaitu merekonstruksi apa saja yang sudah dipikirkan, dikerjakan, dikatakan, dirasakan, dan dialami manusia. Namun, perlu ditegaskan bahwa membangun kembali masa lalu bukan untuk kepentingan masa lalu itu sendiri.¹⁰ Sejarah mempunyai

⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002), 6.

⁹ Saiful, *Tujuan Pendidikan Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi* (Laporan Penelitian), Jember: STAIN Jember, 1999), 10.

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 17.

kepentingan masa kini dan, bahkan, untuk masa yang akan datang. Oleh karenanya, orang tidak akan belajar sejarah karena tidak akan ada gunanya. Kenyataannya, sejarah terus ditulis, di semua peradaban dan di sepanjang waktu. Hal ini, sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu sangat urgen.¹¹

Namun dalam sejarah konvensional yang banyak dideskripsikan adalah pengalaman manusia yang menyangkut tentang sistem perpolitikan, peperangan dan juga terdistorsi pada tataran bangun jatuhnya suatu kekuasaan seperti dinasti, khilafah atau kerajaan. Sebaliknya dalam sejarah harus ada upaya rekonstruksi masa lalu yang berhubungan dengan totalitas pengalaman manusia. Maka dengan konsep tersebut, sejarah mempunyai batas-batas definisi yang longgar dibandingkan dengan definisi-definisi ilmu sosial lainnya. Sejarah dapat didefinisikan dengan politik masa lalu, ekonomi masa lalu, masyarakat masa lalu ataupun sebagai sains atau ilmu pengetahuan masa lalu.

Namun kebanyakan sejarah sosial -khususnya tentang pendidikan- masih berkuat pada pembahasan tentang sejarah ekonomi yang menyangkut tentang aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini, Kuntowijoyo berpendapat bahwa

¹¹ *Ibid.*, 19. Dalam hal ini, Kuntowijoyo menjelaskan bahwa sejarah mempunyai nilai guna intrinsik: (1) sejarah sebagai ilmu, (2) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, (3) sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan (4) sejarah sebagai profesi, sedangkan nilai guna ekstrinsik, yakni sebagai pendidikan: (1) moral, (2) Penalaran, (3) politik, (4) kebijakan, (5) perubahan, (6) masa depan, (7) keindahan, dan (8) ilmu bantu, selain berfungsi sebagai (9) latar belakang (10) rujukan, dan (11) bukti.

sejarah sosial mempunyai hubungan erat dengan sejarah ekonomi, sehingga menjadi semacam sejarah sosial ekonomi.¹² Walaupun demikian, ada beberapa tema yang berkaitan dengan sejarah sosial. Ada pengertian bahwa sejarah sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia kecuali masalah-masalah berkaitan masalah politik.¹³

Dari deskripsi tersebut, kita bisa memetakan definisi dari sejarah pendidikan atau terspesifikasi pada pendidikan Islam. Substansi dan tekanan dalam sejarah pendidikan itu bermacam-macam tergantung kepada maksud dari kajian itu: mulai dari tradisi pemikiran dan para pemikir besar dalam pendidikan, tradisi nasional, sistem pendidikan beserta komponen-komponennya, sampai pada pendidikan dalam hubungannya dengan sejumlah elemen problematis dalam perubahan sosial atau kestabilan, termasuk keagamaan, ilmu pengetahuan (sains), ekonomi, dan gerakan-gerakan sosial. Sehubungan dengan itu semua sejarah pendidikan erat kaitannya dengan sejarah intelektual dan sejarah sosial.¹⁴

Maka dalam pengkajian pendidikan Islam melalui pendekatan sejarah, banyak para pakar pendidikan Islam menggunakan pola pemikiran rasionalistik-fenomenologik untuk memahami pesan sejarah pendidikan Islam. Seperti halnya dengan Ibnu Khaldun yang kapasitasnya sebagai

¹² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 39.

¹³ Nor Huda, *Islam Nusantara ... Op. Cit.*, 8.

¹⁴ John E. Talbott, *Education in Intellectual and Social History*, dalam Felix Gilbert & Stephen R. Graubard, ed. *Historical Studies Today*, (New York: W.W., 1992), 210.

seorang pemikir, Ibnu Khaldun memiliki watak yang luar biasa yang walaupun kadang terasa kurang baik. Dalam hal ini Muhammad Abdullah Enan melukiskan kepribadian Ibnu Khaldun yang istimewa itu dengan mencoba memperlihatkan ciri psikologik Ibnu Khaldun, walaupun diakui-nya secara moral ini tidak selalu sesuai. Menurutny ia melihat dalam diri Ibnu Khaldun terdapat sifat angkuh dan egoisme, penuh ambisi, tidak menentu dan kurang memiliki rasa terima kasih. Namun di samping sifat-sifatnya yang tersebut di atas dia juga mempunyai sifat pemberani, tabah dan kuat, teguh pendirian serta tahan uji. Disamping memiliki intelegensi yang tinggi, cerdas, berpandangan jauh dan pandai berpuisi.¹⁵

Menurut beberapa ahli, Ibnu Khaldun dalam proses pemikirannya mengalami percampuran yang unik, yaitu antara dua tokoh yang saling bertolak belakang, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Rusyd.¹⁶ Al-Ghazali dan Ibnu Rusyd bertentangan dalam bidang filsafat. Ibnu Rusyd adalah pengikut Aristoteles yang setia, sedangkan Al-Ghazali adalah penentang filsafat Aristoteles yang gigih. Ibnu Khaldun adalah pengikut Al-Ghazali dalam permusuhan nya melawan logika Aristoteles, dan pengikut Ibnu Rusyd dalam usahanya

¹⁵ Muhammad Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun: His Life and Work*, Peterj: Muhammad Qodari Arif, (Jakarta: Kencana, 1999), 65. Lihat juga dalam Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Islam*, Peterj: Bahrudin Fannani, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 242.

¹⁶ Juwariyah, *Ibnu Khaldun dan Pemikirannya Tentang Filsafat Pendidikan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004), 76.

mempengaruhi massa. Ibnu Khaldun adalah satu-satunya sarjana muslim waktu itu yang menyadari arti pentingnya praduga dan katagori dalam pemikiran untuk menyelesaikan perdebatan-perdebatan intelektual. Barangkali karena itulah seperti anggapan Fuad Baali bahwa Ibnu Khaldun membangun suatu bentuk logika baru yang realistik, sebagai upayanya untuk mengganti logika idealistik Aristoteles yang berpola paternalistik-absolutistik-spiritualistik. Sedangkan logika realistik Ibnu Khaldun ini berpola pikir relativistik-temporalistik-materialistik.¹⁷

Dengan berpola pikir seperti itulah Ibnu Khaldun mengamati dan menganalisa gejala-gejala sosial beserta sejarahnya, termasuk juga aspek pendidikan, yang pada akhirnya tercipta suatu teori kemasyarakatan yang modern. Karya-karya intelektual Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut:

1. Kitab Muqaddimah, yang merupakan buku pertama dari kitab al-'Ibar, yang terdiri dari bagian muqaddimah (pengantar). Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pulalah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Adapun tema muqaddimah ini adalah gejala-gejala sosial dan sejarahnya.
2. Kitab al-'Ibar, wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar, fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi as-Sulthani al-'Akbar. (Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman

¹⁷ Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, Peterj: Osman Ralibi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 49.

Akhir yang mencakup Peristiwa Politik Mengenai Orang-orang Arab, Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja Besar yang Semasa dengan Mereka), yang kemudian terkenal dengan kitab 'Ibar, yang terdiri dari tiga buku: Buku pertama, adalah sebagai kitab Muqaddimah, atau jilid pertama yang berisi tentang: Masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya. Buku kedua terdiri dari empat jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Di samping itu juga mengandung ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syiria, Persia, Yahudi (Israel), Yunani, Romawi, Turki dan Franka (orang-orang Eropa). Kemudian Buku Ketiga terdiri dari dua jilid yaitu jilid keenam dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahasa Barbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi (Afrika Utara).

3. Kitab al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Syarqon wa Ghorban atau disebut al-Ta'rif, dan oleh orang-orang Barat disebut dengan Autobiografi, merupakan bagian terakhir dari kitab al-'Ibar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, karena terpisah dalam bab-bab, tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

2. Pendidikan Islam dalam Pendekatan Antropologi

Antropologi adalah suatu ilmu yang memahami sifat-sifat semua jenis manusia secara lebih komprehensif.¹⁸ Antropologi pertama kali dipergunakan oleh kaum Misionaris dalam rangka penyebaran agama Nasrani dan bersamaan dengan itu pula berlangsung sistem penjajahan terhadap negar-negara diluar Eropa. Pada era dewasa ini, antropologi dipergunakan sebagai suatu hal untuk kepentingan kemanusiaan yang lebih luas. Studi antropologi selain untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri, di negara-negara yang masuk dalam kategori Negara ketiga (Negara berkembang) sangat urgen sebagai "pisau analisis" untuk pengambilan kebijakan (*policy*) dalam rangka pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Sebagai suatu disiplin ilmu yang cakupan studinya cukup luas, maka tidak ada seorang ahli antropologi yang mampu menelaah dan menguasai antropologi secara sempurna dan global. Sehingga, antropologi terfregmentasi menjadi beberapa bagian yang masing-masing ahli antropologi mengkhususkan dirinya pada spesialisasi bidangnya masing-masing. Pada dataran ini, antropologi menjadi amat plural, sesuai dengan perkembangan ahli-ahli antropologi dalam mengarahkan studinya untuk lebih memahami sifat-sifat dan hajat hidup manusia secara lebih komprehensif. Dan hubungan dengan ini pula, ada bermacam-macam antropologi seperti antropologi ekonomi,

¹⁸ Williiam A. Haviland, *Antropologi*, Peterj: RG Soekarjo, (Jakarta: Erlangga, 1988), 3.

antropologi politik, antropologi kebudayaan, antropologi agama, antropologi pendidikan, antropologi perkotaan, dan lain sebagainya. Grace de Raguna, seorang filsuf wanita pada tahun 1941, menyampaikna pidatonya dihadapan *American Philosophical Association Eastern Division*, bahwa antropologi telah memberi lebih banyak kejelasan tentang sifat manusia daripada semua pemikiran filsuf atau studi para ilmuwan di laboratoriumnya.¹⁹

Dan dalam studi kependidikan yang dikaji melalui pendekatan antropologi, maka kajian tersebut masuk dalam sub antropologi yang bias dikenal menjadi antropologi pendidikan. Artinya apabila antropologi pendidikan dimunculkan sebagai suatu materi kajian, maka yang objek dikajiannya adalah penggunaan teori-teori dan metode yang digunakan oleh para antropolog serta pengetahuan yang diperoleh khususnya yang berhubungan dengan kebutuhan manusia atau masyarakat. Dengan demikian, kajian materi antropologi pendidikan, bukan bertujuan menghasilkan ahli-ahli antropologi melainkan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pendidikan melalui perspektif antropologi. Meskipun berkemungkinan ada yang menjadi antropolog pendidikan setelah memperoleh wawasan pengetahuan dari mengkaji antropologi pendidikan.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kedudukan antropologi pendidikan sebagai sebuah disiplin studi yang tergolong baru di tambah kata "Islam" sehingga menjadi "antropologi pendidikan Islam". Hal ini telah menjadi sorotan

¹⁹ *Ibid.*, 5.

para ahli pendidikan Islam, bahwa hal tersebut merupakan suatu langkah yang ada relevansinya dengan isu-isu Islamisasi ilmu pengetahuan.²⁰ Dengan pola itu, maka antropologi pendidikan Islam tentunya harus dikategorikan “sama” dengan ekonomi Islam. Artinya bagaimana bangunan keilmuan yang ditonjolkan dalam ekonomi Islam muncul juga dalam dalam antropologi pendidikan Islam, sehingga muncul pula kaidah-kaidah keilmiahannya yang bersumber dari kitab suci Al-Qur’an dan dari As Sunah. Seperti dalam ekonomi Islam (juga Hukum Islam) yang sejak awal pertumbuhannya telah diberi contoh oleh Nabi Muhammad dan diteruskan oleh para sahabat. Maka antropologi pendidikan Islam, kaidah-kaidah keilmiahannya harus juga bersumber atau didasarkan pada Al Qur’an dan As Sunah. Akan tetapi dalam sejarah kebudayaan Islam belum ada pengakuan terhadap tokoh-tokoh atau pelopor antropologi yang diakui dari zaman Nabi Muhammad atau sesudahnya.²¹

²⁰ Bahkan dalam pengkajian agama yang dikaji dari aspek antropologi telah banyak digunakan dalam rangka menemukan atau mendekati eksistensi kebenaran dari fenomena agama. Bahkan sekarang ini ada kecenderungan untuk melihat Islam secara menyeluruh dengan menonjolkan ciri-ciri Islam lokal. Kajian semacam Marshal Hodgson yang mencoba menggabungkan perjalanan pengumpulan Islam dengan budaya maupun peradaban lokal menunjukkan suatu hasil yang memuaskan. Buku *The Venture of Islam*, tidak saja menghasilkan sebuah peta besar keberagaman Islam, tetapi juga merupakan tantangan tersendiri bagi pengamat Islam untuk menerjemahkan makna keberagaman itu. Di lain pihak, buku itu menyisakan banyak “homework” untuk kita semua bagaimana mengembangkan pemahaman dan kajian Islam di tingkat lokal untuk melihat keragaman dan kekayaan Islam lokal.

²¹ Abd. Shomad. *Selayang Pandang Tentang Antropologi Pendidikan Islam*,

Karakteristik dari antropologi pendidikan Islam adalah terletak pada sasaran kajiannya yang tertuju pada fenomena pemikiran yang berarah balik dengan fenomena Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan Agama Islam arahnya dari atas ke bawah, artinya sesuatu yang dilakukan berupa upaya agar wahyu dan ajaran Islam dapat dijadikan pandangan hidup anak didik (manusia). Sedangkan antropologi pendidikan Islam dari bawah ke atas, mempunyai sesuatu yang diupayakan dalam mendidik anak, agar anak dapat membangun pandangan hidup berdasarkan pengalaman agamanya bagi kemampuannya untuk menghadapi lingkungan.²² Masalah ilmiah yang mendasar pada Pendidikan Agama Islam adalah berpusat pada bagaimana (metode) cara yang seharusnya dilakukan. Sedangkan masalah yang mendasar pada antropologi pendidikan Islam adalah berpusat pada pengalaman apa yang ditemui.

Ibnu Sina, yang kita kenal sebagai tokoh kedokteran dalam dunia Islam ternyata juga merupakan sorang pemerhati pendidikan anak usia dini yang merupakan pengalaman pertama anak. Dalam kitabnya *al-Siyasah*, Ibnu Sina banyak memaparkan tentang pentingnya pendidikan usia dini yang dimulai dengan pemberian "nama yang baik" dan diteruskan dengan membiasakan berperilaku, berucap-kata, dan berpenampilan yang baik serta pujian dan hukuman

dalam www.uin-suka.info/ejurnal/selayang_pandang_tentang_antropologi_pendidikan_islam

²² *Ibid.*

dalam mendidikan anak.²³ Dan juga yang paling urgen adalah penanaman nilai-nilai sosial pada anak seperti rasa belas kasihan (*confession*) dan empati terhadap orang lain.²⁴

Kaya-karya Ibnu Sina yang cukup terkenal antara lain:

1. Al-Syifa', sebuah karya filsafat.
2. Fi Aqşam 'Ulum al-Aqliyyah, sebuah kitab logika.
3. Al-Siyasah
4. Mabhats 'an al-Quwa al-Nafsaniyyah
5. Dan lain sebagainya.

3. Pendidikan Islam dalam Pendekatan Sosiologi

Sosiologi merupakan suatu disiplin ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat.²⁵ Masyarakat, menurut Emile Durkheim seperti yang dikutip oleh Ishomuddin, itu terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang hidup secara kolektif,²⁶ kehidupan tersebut memerlukan interaksi antara satu dengan yang lain, baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan seorang sosiolog yaitu Alvin Bertrand, seperti yang diikuti oleh Bahrein T. Sugihen, memandang sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang hubungan antar manusia (*human*

²³ Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela ...* Op. Cit., 253.

²⁴ *Ibid.*, 257.

²⁵ Menurut Aguste Comte, yang dinamakan masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya sendiri. Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Bandung: Bumi Aksara, 1992), 4.

²⁶ Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, (Malang: UMM Press, 1997), 9.

relationship).²⁷ Dengan demikian, secara esensial sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam hidup ditengah-tengah masyarakat. Unsur utama dalam sosiologi adalah interaksi, masyarakat, proses dan kehidupan manusia.

Dalam prakteknya sosiologi seperti halnya ilmu sosial lainnya telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang salah satunya adalah dalam pertanian sehingga muncul ilmu terapan sosiologi yaitu sosiologi pertanian. Oleh sebab itu, sosiologi juga diterapkan dalam pendidikan yang muncul ilmu terapan yaitu sosiologi pendidikan yang oleh Ary H. Gunawan didefinisikan sebagai sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental.²⁸ Sedangkan oleh S. Nasution, sosiologi pendidikan diartikan sebagai ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik.²⁹

Titik-tolak dari pandangan ini ialah prioritas kepada kebutuhan masyarakat dan bukan kepada kebutuhan individu. Peserta didik adalah anggota masyarakat. Dalam sejarah perkembangan manusia kita lihat bahwa tuntutan masyarakat tidak selalu etis. Versi yang lain dari pandangan ini ialah *developmentalisme*. Proses pendidikan diarahkan kepada pencapaian target-target tersebut dan tidak jarang

²⁷ Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 4.

²⁸ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2000), 45.

²⁹ *Ibid.*, 3.

nilai-nilai kemanusiaan disubordinasikan untuk mencapai target pembangunan. Pengalaman pembangunan Indonesia selama Orde Baru telah mengarah kepada paham developmentalisme yang menekan kepada pencapaian pertumbuhan yang tinggi, target pemberantasan buta huruf, target pelaksanaan wajib belajar 9 dan 12 tahun.

Salah satu pandangan sosiologisme yang sangat populer adalah konsiensialisme yang dikumandangkan oleh ahli pikir pendidikan Ferkenal Paulo Freire, seorang Doktor sejarah dan filsafat pendidikan di Universitas Recife, Brasil dan juga seorang praktisi pendidikan yang banyak menggagas pendidikan liberatif.³⁰ Pendidikan yang dikumandangkan oleh Freire ini yang juga dikenal sebagai pendidikan pembebasan pendidikan adalah proses pembebasan. Konsiensialisme yang dikumandangkan Freire merupakan suatu pandangan pendidikan yang sangat mempunyai kadar politis karena dihubungkan dengan situasi kehidupan politik terutama di negara-negara Amerika Latin. Paulo Freire di dalam pendidikan pembebasan melihat fungsi atau hakikat pendidikan sebagai pembebasan manusia dari berbagai penindasan. Sekolah adalah lembaga sosial yang pada umumnya mempresentasi kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada agar menjaga status quo hukum membebaskan manusia dari tirani kekuasaan. Status quo atau di dalam istilah Paulo Freire "kapitalisme yang licik". Sekolah harus berfungsi membangkitkan kesadaran bahwa manusia adalah bebas.

³⁰ A. Malik Fajar, *Kata Pengantar: Kembali Ke Jiwa Pendidikan, Memperkokoh Wacana Humanisasi Pendidikan Islam*, dalam Imam Tholikhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela ...* Op. Cit., 1-2.

Karya-karya Paulo Freire ini diantaranya adalah: *Pedagogy of The Oppressed* (1970), *Cultural Action of Freedom* (1970), *Education for Critical Consiousness* (1973), *Education: The Practice of Freedom* (1976), *The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation* (1980) dan juga telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (Jakarta: Gramedia, 1980) dan *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta: LP3ES, 1991).³¹

C. KONSEPTUALISASI

Hakikat pendidikan itu dapat dikategorisasikan dalam dua pendapat yaitu pendekatan epistemologis dan pendekatan ontologi atau metafisik. Kedua pendekatan tersebut tentunya dapat melahirkan jawaban yang berbeda-beda mengenai apakah hakikat pendidikan itu sendiri, artinya dengan pendekatan yang berbeda-beda akan melahirkan penekanan yang berbeda-beda pula dalam mendekati satu objek.

Di dalam epistemologi pendidikan yang menjadi masalah adalah akar atau kerangka ilmu pendidikan sebagai ilmu. Pendekatan tersebut mencari makna pendidikan sebagai ilmu yaitu mempunyai objek yang akan merupakan dasar analisis yang akan membangun ilmu pengetahuan yang disebut ilmu pendidikan. Dari sudut pandang tersebut, pendidikan dilihat sebagai sesuatu proses yang interen dalam konsep manusia. Artinya manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses pendidikan.

³¹ *Ibid.*

Dalam konsep epistemologi pendidikan, perbedaan materi pelajaran dan perbedaan sosial-budaya-ekonomi-politik yang dijalani peserta didik dan pendidik itu hanya merupakan manifestasi bentuk luarnya, namun secara substansial sama. Dasar-dasar inilah yang merupakan dasar-dasar *integrated curriculum*. Sedangkan AM. Saefuddin dalam bukunya "Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi" mengatakan bahwa *integrated curriculum*, di sini bisa bermanifestasi berupa pelarutan dua hal yang berbeda untuk dipadukan baik secara substantif maupun normatif yang hasilnya sudah tidak bias dibeda-bedakan jenisnya, ataupun pencampuran di mana hasil perpaduannya masih bias dibedakan baik secara substantif maupun normatif.³²

Berbeda hal dengan Jerome Bruner dalam bukunya "*The Process of Education*" yang mengatakan bahwa "pelarutan" disini berarti "*integrated curriculum*", sedangkan "pencampuran" berarti "*correlated curriculum*".³³ Artinya dalam upaya pembenahan pendidikan tersebut banyak hal yang perlu direkonstruksi atau bahkan didekonstruksi untuk menemukan suatu tatanan pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, perlu adanya pendekatan baru untuk menemukan hakikat pendidikan yang koheren dengan perubahan zaman dan sesuai dengan pola perkembangan peserta didik. Maka, penulis mencoba untuk memetakan dan memberikan pendekatan

³² AM. Saefuddin, *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, (Bandung: Mizan, 1993), 114.

³³ Jerome Bruner, *Proses Pendidikan: Upaya Pembenahan Pendidikan*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), 59.

baru dalam meneropong pendidikan Islam sebagai pendidikan alternatif-solutif.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, berbagai pendapat mengenai hakikat pendidikan dapat digolongkan atas dua kelompok besar yaitu: Pendekatan reduksionisme dan holistik-integratif. Pendekatan reduksionisme melihat proses pendidikan peserta didik dan keseluruhan termasuk lembaga-lembaga pendidikan, menampilkan pandangan ontologis maupun metafisis tertentu mengenai hakikat pendidikan. Teori-teori tersebut satu persatu sifatnya mungkin mendalam secara vertikal namun tidak melebar secara horizontal.

Peserta didik, anak manusia, tidak hidup secara terisolasi tetapi dia hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat tertentu, yang berbudaya, yang mempunyai visi terhadap kehidupan di masa depan, termasuk kehidupan pascakehidupan. Oleh sebab itulah, M Kamal Hasan, sebagaimana di kutip Samsul Nizar, memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah "suatu proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi, dan fisik."³⁴

Pendekatan reduksionisme terhadap hakikat pendidikan, maka dirumuskan suatu pengertian operasional mengenai hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah suatu proses menumbuh-kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang

³⁴ Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ga ya Media Pratama, 2001), 93.

berdimensi lokal, nasional dan global. Rumusan operasional mengenai hakikat pendidikan tersebut di atas mempunyai komponen-komponen sebagai berikut:

1. Pendidikan Merupakan Suatu Proses Berkesinambungan

Proses berkesinambungan yang terus menerus dalam arti adanya interaksi dalam lingkungannya. Lingkungan tersebut berupa lingkungan manusia, lingkungan sosial, lingkungan budayanya dan ekologiannya. Sehingga dalam proses pendidikan adalah proses penyelamatan kehidupan sosial dan penyelamatan lingkungan yang memberikan jaminan hidup yang berkesinambungan.

Proses pendidikan yang berkesinambungan berarti bahwa manusia tidak pernah akan selesai.

2. Proses Pendidikan Berarti Menumbuhkembangkan Eksistensi Manusia

Eksistensi manusia merupakan suatu keberadaan yang interaktif-interkoneksi. Eksistensi manusia harus mempunyai arti dengan hubungan sesama manusia baik yang dekat maupun dalam ruang lingkup yang semakin luas dengan sesama manusia di dalam planet bumi ini. Proses pendidikan bukan hanya mempunyai dimensi lokal tetapi juga berdimensi nasional dan global.

3. Eksistensi Manusia yang Memasyarakat

Proses pendidikan adalah proses mewujudkan eksistensi manusia yang memasyarakat. J. Dewey, seperti yang dikutip oleh Sri Widayati, mengatakan bahwa tujuan pendidikan tidak berada di luar proses pendidikan itu tetapi di

dalam pendidikan sendiri karena sekolah adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Apabila pendidikan diletakkan dalam tempat yang sebenarnya maka ialah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang pada dasarnya adalah kehidupan bermoral.³⁵

4. Proses Pendidikan dalam Masyarakat yang Membudaya

Inti dari kehidupan bermasyarakat adalah nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut perlu dihayati, dilestarikan, dikembangkan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakatnya. Penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai yang hidup, keteraturan dan disiplin para anggotanya. Tanpa keteraturan dan disiplin maka suatu kesatuan hidup akan bubar dengan sendirinya dan berarti pula matinya suatu kebudayaan.

5. Proses Bermasyarakat dan Membudaya Mempunyai Dimensi-Dimensi Waktu dan Ruang

Dengan dimensi waktu, proses tersebut mempunyai aspek-aspek historisitas, kekinian dan visi masa depan. Aspek historisitas berarti bahwa suatu masyarakat telah berkembang di dalam proses waktu, yang menyejarah, berarti bahwa kekuatan-kekuatan historis telah menumpuk dan berasimilasi di dalam suatu proses kebudayaan. Proses pendidikan adalah proses pembudayaan, dan proses pembudayaan adalah proses pendidikan. Menggugurkan pendidikan dari proses pembudayaan merupakan alienasi dari hakikat manusia dan dengan demikian alienasi dari proses humanisasi. Alienasi

³⁵ Sri Widayati, *Hakikat Pendidikan*, (laporan Penelitian), (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 10.

proses pendidikan dari kebudayaan berarti menjauhkan pendidikan dari perwujudan nilai-nilai moral di dalam kehidupan manusia.

Kompenen-kompenen hakikat pendidikan itu harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Islam sebagai langkah awal membangun paradigma pendekatan holistik-integratif. Kurikulum yang oleh J. Galen Saylor dan William M. Alexander dalam bukunya *Curriculum Planning For Better Teaching And Learning*, menjelaskan arti kurikulum dengan "*The curriculum is the sum total of schools efforts to influence learning, whether instruksional the classroom, on the playgroup, or out of school*".³⁶ Ini artinya sesuatu di luar konteks pembelajaran atau konstek sekolah yang masih mempengaruhi atau membawa implikasi logis-konstruktif pada peserta didik dapat kita asumsikan bahwa itu adalah kurikulum. Dan segala sesuatu yang berimplikasi pada peserta didik tersebut harus teraktualisasikan dalam bentuk aplikatif-kongkrit.

Momentum pada aplikatif-kongkrit akan memunculkan *learning by doing*, artinya kurikulum yang sebagai *the sum total of schools* tidak pada hanya ranah kognitif *an sich* tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotorik. Dan pada tataran ini juga suatu kurikulum berdiri pada platform universal, artinya kurikulum terkonstruksi dengan konteks makro atau global tidak pada konteks-spesifik ataupun sebaliknya. Hal ini akan berimplikasi pada dualitas output, sebab ketika konteks diglobalkan atau dispesifikan maka akan memunculkan suatu

³⁶ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 4.

sikap pesimistik-degradasi yang memiskinkan kreatifitas makro atau mikro dan konstruk kehidupan yang destruktif. Hal ini tidak hanya tertuju pada dirinya sendiri tetapi juga pada orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Pada abad pertengahan tepatnya pada abad ke-XI di Madrasah Nizamiyyah terjadi penspesifikan kurikulum yang hanya menekankan pada supremasi *fiq'h an sich*. Semua cabang ilmu agama yang lain diperkenalkan dalam rangka menompang superioritas dan penjabaran hukum Islam. *Fiq'h oriented education* adalah ciri yang menonjol pada masa itu sehingga Madrasah Nizamiyyah benar-benar menjadi model pendidikan yang dikotomi.³⁷ Hal tersebut membuktikan bahwa spesifikasi kurikulum pada hal-hal yang mikro akan membawa konsekuensi atau berdampak pada sub-sub lainnya bahkan akan mengkonstruk *paradigm* dan *mainstream* dikotomik.

Namun dalam konteks pendidikan Islam sendiri, kurikulum yang merupakan *planning of learning* dan dalam tataran idea terbingkai (*frame*) dalam integritas antara hal-hal yang profan dan yang sakral. Bahkan hal tersebut telah menjadi tujuan pendidikan Islam untuk menkonstruk manusia menjadi manusia bertaqwa, manusia yang dapat mencapai *al-falaah*.³⁸ Tetapi kurikulum Islam belum mampu untuk mengkonstruk dan menelorkan manusia yang mampu

³⁷ Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik...* Loc. Cit., 110.

³⁸ Soeroyo, *Antisipasi Pendidikan Islam Dan Perubahan Sosial Menjangkau Tahun 2000*, dalam *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita Dan Fakta*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 1994), 43.

*meintegritaskan ilmu profan yang sekuleristik-rasionalistik dengan ilmu sakralistik yang cenderung pada taken for granted dan wahyuistik (kebenaran mutlak). Performa kurikulum Islam yang memegang konsep *continue education* dan *life long education* terbentur dengan problem klasik yang tetap aktual karena masih sering segar dipersoalkan oleh para pakar pendidikan (Islam) dan telah menjadi *public image* bahwa adanya dikotomik dalam dunia pendidikan Islam. Problema dikotomik ini terkover dalam *classical education paradigm*, dimana konsep paradigma pendidikan klasikal membutuhkan *re-education* atau bahkan *de-education* pada era kontemporer-globalisasi. Problema dikotomik mendorong pada dualitas fundamental dan memfregmentasi atau mengkristalisasi paradigma menjadi dua wilayah yaitu antara *konservatif-status quo* dan *liberal-kontekstual*.³⁹*

Pada liberal-kontekstual menurut pandangan A.C. Ornstein dan Daniel U. Levine, menancapkan pada pemikiran dan pendidikan Yunani, Romawi, *Arabic Learning*, Kontribusi Medieval, *Kontribusi Renaissance*, Reformasi Religi dan gerakan *The Age of Reason*.⁴⁰ Bertolak pada ranah

³⁹ Dua istilah tersebut adalah konstruksi dari penulis sendiri. asumsi penulis berkenaan dengan istilah konservatif-*status quo* bahwa pendidikan Islam masih berpatokan pada *transfer of knowledge an sich* tanpa mengembangkan pada tataran metodologi ilmu pengetahuan. Ini diindikasikan dengan masih berpegang teguhnya para sarjana pendidikan Islam pada nilai klasikalnya, walaupun pada hari ini paradigma tersebut ada pergesaran. Sedangkan istilah liberal-kontekstual adalah pendidikan liberalis-kontekstual yang selalu mengikuti alur ruang dan waktu atau dalam bahasa lain pendidikan liberalis-kontekstual terkonstruksi sesuai dengan tuntutan era.

⁴⁰ Roihan Achwan, *Konstruksi Filosofis Pendidikan Islam*, dalam *Religiusitas*

optimistik-fungsionalistik itulah, liberalis-kontekstual mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan era (*needs era*). Maka dialektika antara *das sollen* dan *das sein*, antara realitas dan idea memunculkan metodologi *supremacy of reason*. Ketika tuntutan era menghendaki manusia instan dengan *human resource* yang tinggi dan juga pada *capability*, pendidikan liberal-kontekstual mampu untuk menghadirkan dan menyajikannya. Akan tetapi karakteristik pendidikan liberalis-kontekstual adalah sebagai refleksi pemikiran dan kultur abad XVIII-XIX yang ditandai dengan isolirnya terhadap agama, sekularisme negara, *materialism*, penyangkalan terhadap wahyu dan penghapusan nilai-nilai etika yang kemudian digantikan dengan pragmatism.⁴¹ Materialisme akan memunculkan sikap hedonistik dan konsekuensinya sikap itu akan melahirkan sikap rasionalistik-empiristik tanpa ada landasan pada humanis-teosentris.

Seharusnya sikap rasionalistik-empiristik dikembangkan dalam frame etiket yang representatif untuk membangun peradaban manusia. Kalau kita sedikit membaca gerakan *the age of enlightenment* yang diprosesi melalui *reason and scientific method* dengan konsistensi kausalis dogmatisasi rasio, maka *intuition* dan *heart* dikalahkan oleh *supremacy of reason* dengan akal payungnya. *Reason*, *brain*, dan *heart* memiliki posisi determinan tanpa ada yang yang dilebihkan antara *position* yang satu dengan yang lainnya. Menurut teori

Iptek, (Bandung: Pustaka Pelajar, 1998), 66.

⁴¹ Amrullah Achmad, *Kerangka Dasar Masalah Paradigma Pendidikan Islam*, dalam *Pendidikan Islam...Op. Cit.*, 86.

dari Muhammad Iqbal bahwa *knowledge is a progressive ideal starting from the knowledge provided by sense; persepction and ending with knowledge provided by heart.*⁴²

Persoalannya adalah karekteristik pendidikan liberalis-kontekstual yang mengedepankan *reason* daripada *intuition*. Sedangkan fungsionalisasi instrumen-instrumen yang dimiliki manusia itu untuk mengungkapkan hal-hal diluar dirinya atau nomena (metafisika) ada pada batas liminitas. Maka energial untuk dapat memberikan kontribusi pada manusia sendiri atau pada peradabannya hanya sebatas liminitas-parsialis. Ketidakmampuan manusia untuk mendeduktifkan dan meninduktifkan penjelajahanya terhadap nomena secara holistik-komprehensif membutuhkan kurikulum atau *planning of learning* yang berdiferensial qur'ani dan sunnatik. Dengan landasan itu nilai-nilai pendidikan yang terancang dalam kurikulum dapat dijadikan sebagai *way of life* yang diyakini sebagai representasi dari kebenaran.

Konservatif-status quo mampu untuk menjawab persoalan-persoalan yang membutuhkan aspek keseimbangan antara *reason* dan *intuition*, sebab konservatif-status quo merupakan representasi dari *planning of learning* yang berdiferensial qur'ani dan sunnatik. Tetapi dengan metodologi klasiknya konservatif-status quo belum mampu atau bahkan tidak akan pernah melahirkan manusia instan yang mempunyai *human resource* dan *capability* yang tinggi. *All round living* mampu dihadirkan pada kehidupan aktual manusia dan mengembangkan aspek kreatif kehi-

⁴² Roihan Achwan, *Konstruksi Filosofis....*Op. Cit., 71.

dupan sebagai suatu uji coba atas keberhasilan suatu lembaga sehingga manusia mampu berkembang dalam kemampuannya yang aktual untuk aktif memikirkan hal-hal yang baik untuk diaktualisasikan.⁴³ Itu seharusnya yang disiapkan atau yang harus mampu diberikan oleh kurikulum untuk mencapai tujuan (*goal*) pendidikan yang mempunyai sifat *integrated* dan *komperhensif*, mencakup ilmu agama dan ilmu umum. Maka ketika sifat *integrated* dan *komperhensif* mampu diwujudkan lahirilah sosok manusia mempunyai *The Conscious of God* dengan *spirit liberating and civilizing*.

Adalah hal yang urgen, ketika kurikulum diintegritaskan agar gap antara *science* yang merupakan representasi dari liberalis-kontektualis dengan *science relegius* dari kubu konservatif-status quo tidak terlalu menganga lebar. Fenomena antara *science* dan *science relegius* menunjukkan bahwa *science* dalam perkembangannya revolutif tetapi sebaliknya *science relegius* dalam perkembangannya evolutif-gradual. Maka penguasaan metodologi dalam suatu ilmu dan juga “dekompartementalisasi”⁴⁴ merupakan langkah kongkrit-solutif. Mengapa hal seperti itu harus dilakukan dengan rancangan dan langkah-langkah kongkrit?. Yang pertama dan paling fundamental ditarik keranah pendidikan sendiri adalah pengkonstruksikan mainstream dan paradigma *integret-ed* atau pada penguasaan epistemologi nondikotomiknya yang natinya mampu untuk menciptakan *konkrit solution*.

⁴³ M. Arifin, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 95.

⁴⁴ Meminjam istilah dari penulis makalah Menimbang Kurikulum IAIN: Kasus Kurikulum 1995 dan 1997 yaitu Masykuri Abdillah. www.ditper-tais.net/artikel/default.asp

Artinya ketika *grand teory* suatu *science* telah dikuasai dan mampu mengkreasikan antara rasionalistik-empiristik dengan *planning of learning* yang berdeferensial qur'anik dan sunnatik maka output sekolah yang berbasiskan agama (Islam) tidak dalam frame skeptisistik. Apalagi saat ini *man-power* dikalahkan oleh *man-mind*, artinya kemampuan berpikir manusia harus merupakan suatu kemahiran dasar (*basic skill*). Kemampuan berpikir tidak bisa diharapkan lahir dengan sendirinya sebagai *by product* dari proses belajar mengajar. Proses pengembangan kemampuan berpikir haruslah merupakan proses yang terintegrasi secara formal dalam struktur proses belajar.⁴⁵

D. PENUTUP

Selama ini studi pendidikan Islam masih menggunakan pendekatan konvensional yang umumnya bersifat diakronis yang kajiannya berpusat pada sejarah dari ide-ide dan tokoh pemikir besar dalam pendidikan, atau sejarah dan sistem pendidikan dan juga lembaga-lembaga, atau sejarah perundang-undangan dan kebijakan umum dalam bidang pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka harus ada pendekatan sejarah pendidikan (Islam) baru yang hanya tidak cukup dengan cara-cara diakronis saja. Perlu ada pendekatan metodologis yang baru yaitu dengan pendekatan interdisipliner.

⁴⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Peran Mahasiswa dalam Mengembangkan Tradisi Akademik di PTA*, Makalah yang dipresentasikan di STAIN Jember 1 September 2003.

Pendekatan interdisipliner tersebut adalah pendekatan holistik-integratif yang berbasiskan pada komponen-komponen hakikat pendidikan dan pola itu harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Islam sebagai langkah awal menuju paradigma pendidikan nondikotomik yang merupakan anak kandung dari pendekatan konvensional yaitu pendekatan yang bersifat diakronis. Maka ketika sifat *integrated* dan *komperhensif* mampu diwujudkan lahirlah sosok manusia yang mempunyai *The Conscious of God* dengan spirit *liberating and civilizing*. []



Bagian 3

PEMBARUAN PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM:

**Sebuah Upaya Mencari Jalan Keluar
dari Kemelut Paradigma Dualisme-Dikotomis
dalam Pendidikan Islam**

A. PENDAHULUAN

Derasnya arus teknologi informasi tidak dapat kita pungkiri, telah menyebabkan terjadinya globalisasi ilmu dan budaya. Hal ini telah membawa perubahan yang amat dahsyat pada hampir semua sendi kehidupan ummat manusia, baik institusi-institusi sosial kemasyarakatan, kenegaraan maupun institusi-institusi lainnya, tak terkecuali institusi pendidikan, tidak luput dari pengaruh arus globalisasi tersebut. Sebagai konsekuensinya, falsafah hidup, keprihatinan, pemikiran dan gagasan, pola tingkah laku dan mekanisme kerja semuanya

ikut berubah. Dalam kondisi yang demikian, pendidikan Islam dituntut untuk mampu memainkan peranannya secara dinamis dan proaktif untuk menjawab tantangan arus modernisasi dan membendung degradasi moral umat Islam. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti.

Dalam perkembangannya, menurut Syafi'i Ma'arif, seperti yang dikutip Moh. Shofan, mengatakan bahwa pendidikan Islam telah melahirkan dua pola pemikiran yang kontradiktif. Keduanya mengambil bentuk yang berbeda, baik pada aspek materi, sistem pendidikan, atau dalam bentuk kelembagaan sekalipun.¹ Dua model yang dimaksud adalah pendidikan Islam yang bercorak tradisional (ketimuran), yang dalam perkembangannya lebih menekankan aspek *doktriner-normatif* yang cenderung *eksklusif-apologetis*. Adapun model yang kedua adalah pendidikan Islam yang modernis (*ala* Barat) yang pada perkembangannya ditengarai mulai kehilangan ruh-ruh mendasarnya (*transendental*).

Munculnya dua model pendidikan tersebut, mengakibatkan terjadinya ambivalensi orientasi pendidikan Islam,² yang salah satu dampak negatifnya adalah adanya paradigma dualisme-dikotomis dalam sistem pendidikan³ di Indonesia, terlebih lagi dalam sistem pendidikan Islam. Persoalan ini akan penulis paparkan dengan menguraikan

¹ Moh. Shofan, *Pendidikan Berparadigma Profetik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), 6.

² A.M. Saifuddin, *Desekularisasi Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), 103.

³ Moh. Shofan, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, dalam Logos, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 4, No. 1 Januari 2005.

paradigma dualisme-dikotomis dalam pendidikan serta upaya-upaya yang telah dilakukan dari problematika yang ditimbulkannya, dan terakhir persoalan ini akan coba dianalisis dan diberikan tawaran solusi untuk keluar dari ke-melut persoalan ini.

B. PARADIGMA DUALISME-DIKOTOMIS DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Paradigma dualisme-dikotomis dalam sistem pendidikan Islam sebenarnya bukanlah merupakan persoalan baru di Indonesia. Persoalan ini sudah terlalu sering di bicarakan di berbagai forum diskusi, seminar, simposium dan lain sebagainya, baik dalam forum formal maupun non-formal, dalam skala kecil (forum terbatas) maupun dalam skala yang lebih luas (nasional). Bahkan permasalahan dikotomik ini bukan hanya melanda pendidikan Islam di Indonesia tapi sudah melanda seluruh negara muslim di seluruh dunia. Berbagai macam upaya sudah dilakukan para pakar pendidikan untuk mengatasi permasalahan ini, namun hingga sekarang, masih belum mendapatkan pangkal tolak pemecahannya.

Menurut Sanaky⁴, akar sejarah munculnya pandangan dualisme pendidikan Islam, setidaknya bersumber dari: *Pertama*, pandangan *formisme*, artinya segala aspek kehidupan dipandang dengan sangat sederhana, yaitu segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan, dan *kedua*, berasal dari warisan penjajah kolonial Belanda.

⁴ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003), 97-98.

Pandangan yang pertama melihat segala sesuatu dari sisi yang berlawanan seperti antara laki-laki-perempuan, kuat-lemah, tua-muda dan lain sebagainya. Pandangan ini kemudian dikembangkan dalam melihat dan memandangi aspek kehidupan dunia dan akhirat serta kehidupan jasmani dan rohani. Dari sini, pandangan dikotomik ini juga mulai menyentuh ke bidang pendidikan sehingga akhirnya muncullah pandangan yang membedakan antara ilmu keakhiratan dan ilmu keduniaan dan kemudian yang pertama disebut ilmu pengetahuan agama dan kedua, ilmu pengetahuan umum, dimana kedua pandangan ini melembaga sebagai pendidikan Islam yang mengambil bentuk madrasah dan pondok pesantren dimana arah keilmuannya lebih ditekankan pada sisi religius dan orientasinya antara lain membentuk ahli agama (baca: ulama atau kyai) dan menjadikan ilmu-ilmu umum sebagai pelengkap. Sedangkan lainnya sebagai pendidikan umum yang mengambil bentuk sekolah umum (SD, SMP, SMA dsb.) yang lebih menitik beratkan pada ilmu duniawi (eksak dan sosial) dan menjadikan ilmu agama hanya sebagai pelengkap. Dengan adanya pemisahan bidang keilmuan tersebut akibatnya akan menimbulkan kepincangan dalam pelaksanaan pendidikan karena realitasnya kemudian ilmu-ilmu umum ini menjadi terabaikan dan bahkan tercampakkan dalam "Sekolah Agama" dan sebaliknya, ilmu agama pun akan terlupakan pada "Sekolah Umum". Pendidikan Islam hanya "mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur." Persoalan dunia di-

anggap kurang penting dan lebih menekankan sisi akhirat saja. Ilmu keagamaan dianggap jalan pintas untuk menuju kebahagiaan akhirat, sementara ilmu pengetahuan umum dianggap terpisah dari agama.⁵ Dengan adanya pandangan yang demikian, akhirnya paham dualisme-dikotomis pun semakin mengakar dalam Pendidikan Islam.⁶

Pandangan yang kedua lebih melihat ke aspek sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Pada zaman kolonial, pemerintah Belanda telah melakukan pemisahan antara pendidikan "umum" di satu pihak dan pendidikan "agama" di pihak lain dalam praktik pendidikannya. Pemisahan ini mengakibatkan kerancuan dan kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Salah satu akibat negatif dari sistem pendidikan yang dikotomis tersebut, arti agama dipersempit ke dalam lapangan teologis yang bersifat normatif, doktriner dan absolutis semata, sehingga peserta didik diarahkan untuk memiliki sikap *commitment* dan dedikasi yang tinggi terhadap agama yang dipelajari.⁷ Sekolah-sekolah agama pun terkotak dalam kubu

⁵ Hal ini dapat dilihat, misalnya, term "ulama" hingga saat ini masih di maknai sebagai orang yang ahli dalam bidang agama saja, baik itu dalam bidang fiqh, tauhid atau tasawuf. Sedangkan orang bergerak dalam bidang pengetahuan umum tidak termasuk dalam yang demikian. Padahal al-Qur'an sendiri mengartikan "ulama" sebagai cendekiawan di banyak bidang, baik itu meteorologi, antropologi, humaniora, sosiologi, biologi dan lain sebagainya. Jadi menurut al-Quran yang berhak menyandang predikat ulama bukan hanya orang yang ahli dalam bidang agama saja. Lihat QS. Asy-Syu'ara/26: 127 dan QS. Fathir/35: 27-28.

⁶ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam ...* Op. Cit., 98.

⁷ Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 39.

tersendiri dan menjadi eksklusif. Sementara kajian-kajian keilmuan yang bersifat empiris, rasional, dan analitis-kritis pun ditinggalkan.

Menurut Azyumardi Azra, seperti yang dikutip oleh Hujair AH. Sanaky, mengatakan bahwa pemahaman yang demikian itu muncul dikalangan umat Islam disebabkan mereka telah mengalami masa penjajahan yang sangat panjang, di mana umat Islam mengalami keterbelakangan dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan terjadi pembenturan umat Islam dengan pendidikan dan kemajuan Barat yang memunculkan kaum intelektual baru yang sering juga disebut "cendikiawan sekuler".⁸ Sebagian besar kaum intelektual tersebut adalah "hasil pendidikan Barat, karena dalam proses pendidikannya, otak mereka telah dicuci (*brain washing*) dari hal-hal yang berbau Islam, akibatnya mereka menjadi terasing dari ajaran-ajaran Islam dan masyarakat Muslim sendiri. Bahkan terjadi gap antara kaum intelektual baru (sekuler) dengan intelektual lama (ulama).⁹ Yang akhirnya berimplikasi terhadap pendidikan Islam, dan itu terus berlangsung hingga saat sekarang ini.

Melihat kondisi yang demikian, maka, menurut Sya-fi'i Ma'arif, konsep dualisme-dikotomis tersebut harus ditumbangkan secara mendasar.¹⁰ Sebab pengaruhnya tidak saja berakibat pada rapuhnya sistem pendidikan Islam

⁸ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam ...* Op. Cit., 99.

⁹ *Ibid.*, 100.

¹⁰ A.Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994), 151.

an sich, tetapi juga menjadi masalah dakwah Islam dan pembangunan kehidupan umat yang Islami sebagai peradaban alternatif.

Sistem pendidikan yang dikotomik, sebagaimana dikatakan Amrullah Achmad, menyebabkan lahirnya sistem pendidikan umat yang *sekularistik, rasionalistik-empirik, intuitif* dan *materialistik*, dan keadaan tersebut tidak mendukung tata kehidupan umat yang mampu melahirkan peradaban Islami.¹¹ Bahkan lebih terinci lagi, Amrullah Achmad, menguraikan akibat dan hal yang berkaitan dengan dikotomi Pendidikan Islam ini bahwa:

"Masalah dikotomi pendidikan Islam tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, kegagalan dalam merumuskan tauhid dan bertauhid. *Kedua*, kegagalan butir pertama di atas, menyebabkan lahirnya syirik yang berakibat adanya dikotomi fikrah Islami. *Ketiga*, dikotomi fikrah Islami, menyebabkan adanya dikotomi kurikulum. *Keempat*, dikotomi kurikulum menyebabkan terjadinya dikotomi dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. *Kelima*, dikotomi proses pencapaian tujuan pendidikan dalam interaksi sehari-hari di lembaga pendidikan menyebabkan dikotomi *abituren* dalam bentuk *split personality* ganda dalam arti kemusyrikan, kemunafikan yang melembaga dalam sistem keyakinan, sistem pemikiran, sikap, cita-cita, dan prilaku yang sering disebut sekularisme. *Keenam*, suasana dikotomik ini, melembaga dalam sistem pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang ditandai dengan tradisi "mengulurkan tangan" ke-

¹¹ Amrullah Achmad, *Kerangka Dasar Masalah Paradigma Pendidikan Islam*, dalam Muslih Usa (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), 52.

luar untuk meminta bantuan dana atau fasilitas tertentu dan dukungan secara politis dengan alasan obyektif atau subyektif; bahwa terjadinya krisis dalam penyelenggaraan pendidikan. *Ketujuh*, lembaga pendidikan akan melahirkan manusia yang berkepribadian ganda, yang justru melahirkan dan memperkokoh sistem kehidupan umat yang *sekularistik, rasionalistik-empirik-intuitif dan materialistik*. *Kedelapan*, tata kehidupan umat yang demikian itu, hanya mampu melahirkan peradaban Barat sekuler yang dipoles dengan nama Islam. *Kesembilan*, dalam proses regenerasi umat, maka tampillah da'i yang berusaha merealisasikan Islam dalam bentuknya yang memisahkan kehidupan sosial-politik-ekonomi-ilmu pengetahuan-teknologi dengan ajaran Islam, agama urusan akhirat dan ilmu-teknologi urusan dunia. Dengan demikian, lengkaplah sudah kegandaan hidup".¹²

Jika demikian jauh dan membahayakannya pengaruh paradigma dikotomis dalam pendidikan Islam, maka sudah seharusnya kita memberikan perhatian yang lebih serius terhadap permasalahan ini. Artinya, dikotomi ilmu ini dijadikan objek proyek dalam wacana keilmuan pendidikan Islam yang dimaksudkan sebagai bagian dari material ilmu pengetahuan pendidikan Islam.

C. UPAYA MENGATASI PROBLMATIKA DUALISME-DIKOTOMIS DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Berdasarkan uraian sebelumnya, terlihat jelas dan nyata dampak yang diakibatkan oleh persoalan dualisme-dikotomis dalam sistem pendidikan Islam. Berbagai cara dan upaya pun telah dilakukan oleh para ahli untuk mengatasi

¹² *Ibid.*, 52-53.

problematika tersebut. Persoalan ini telah menjadi persoalan global yang telah melanda seluruh sitem pendidikan Islam di dunia. Salah satu solusi yang ditawarkan dan sempat menjadi sangat populer serta masih menjadi pembicaraan hangat hingga saat ini adalah ide tentang "Islamisasi ilmu pengetahuan"¹³ yang di usung oleh Ismail Razi al-Faruqi dan kawan-kawan.

Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sebuah upaya untuk menjembatani antara "ilmu pengetahuan agama" dengan "ilmu pengetahuan umum" sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada lagi jurang pemisah di antara keduanya. Islamisasi yang dikehendaki, menurut al-Faruqi, adalah menuangkan kembali pengetahuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam yaitu dengan memberikan definisi baru, mengatur data, mengevaluasi kembali kesimpulan-kesimpulan dan memproyeksikan kembali tujuan-tujuannya.¹⁴

Pada awal munculnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan ini, sempat mengejutkan umat Islam untuk bangun dari tidurnya. Setelah sekian lama umat Islam terbelengu oleh penjajahan budaya Barat yang didasarkan atas pandangan alam sekuler yang mengancam umat Islam. Gagasan ini pun mendapat respon yang cukup besar dari beberapa institusi Islam internasional seperti *International Institute of Islamic*

¹³ Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan ini muncul pada saat persidangan Sedunia Pertama mengenai Pendidikan Islam di Makkah pada tahun 1977.

¹⁴ Isma'il Razi al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, (Bandung: Pustaka, 1984), 36.

Thought (IIIT), Washington Dc., *International Islamic University Malaysia* (IIUM) di Kuala Lumpur, Akademi Islam di Cambridge dan *International Institute of Islamic Thought and Civilization* (ISTAC) di Kuala Lumpur.¹⁵

Namun usaha ke arah proses Islamisasi ilmu pengetahuan ternyata tidak berjalan dengan mulus bahkan menghadapi beberapa tantangan, khususnya dari kalangan cerdik pandai Islam sendiri. Dalam menyikapi hal ini mereka terdiri dari beberapa golongan. *Pertama*, golongan yang sependapat dengan gagasan ini secara teori dan konsepnya dan berusaha menjelmakannya dan menghasilkan karya yang menepati maksud Islamisasi dalam disiplin ilmu mereka. *Kedua*, golongan yang sependapat dengan gagasan ini secara teori dan konsep tetapi tidak mengusahakannya secara praktis. *Ketiga*, golongan yang tidak sependapat dan sebaliknya mencemooh, mengejek dan mempermainkan gagasan ini, mereka lazimnya berpendapat bahwa semua ilmu datangnya dari Allah dan justru itu semua ilmu adalah benar dan secara tabiatnya sudah Islam. *Keempat*, adalah kalangan yang tidak mempunyai pendirian terhadap isu ini. Mereka lebih suka mengikut perkembangan yang dirintis oleh sarjana lain atau pun tidak peduli dengannya.¹⁶

Aktivitas golongan pertama amat penting untuk mengokohkan dan memurnikan lagi konsep ini walaupun mereka

¹⁵ Rosnani Hamim, *Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer: Sejarah, Perkembangan, dan Arah Tujuan*, dalam *Islamia*, Thn II No.9/Juli-September 2005, 29-30.

¹⁶ *Ibid.*, 40.

saling mengkritik ide itu satu sama lain, tetapi mereka tetap terlibat dalam usaha Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Ismail Razi al-Faruqi, Syed Hosein Nasr, Naquib al-Attas, S.A. Ashraf dan lain-lain.

Dalam pandangan al-Attas, Islamisasi adalah "pembebasan manusia, mulai dari *magic*, mitos, animisme dan tradisi kebudayaan kebangsaan, dan penguasaan sekuler atas akal dan bahasanya".¹⁷ Islamisasi merupakan proses pembebasan dan memerdekakan sebab ia melibatkan pembebasan roh manusia yang mempunyai pengaruh atas jasmaninya dan proses ini menimbulkan keharmonisan dan kedamaian dalam dirinya sesuai dengan fitrahnya.¹⁸

Untuk golongan yang kedua dan keempat sebenarnya tidak terlalu menimbulkan masalah dalam Islamisasi ilmu pengetahuan ini. Yang perlu dikhawatirkan, menurut Rosmani Hamim, adalah pendapat golongan ketiga yang percaya bahwa semua ilmu itu sudah Islami, sebab sumber ilmu adalah Allah SWT sendiri. Sehingga mereka sangsi dengan pelabelan Islam atau bukan Islam pada segala ilmu. Dalam pandangan mereka sains itu bersifat universal dan lintas bangsa, agama atau peradaban, oleh karena itu, yang perlu di-Islamkan adalah akalnya bukan ilmunya. Yang termasuk dalam golongan ini seperti Fazlur Rahman, Abdul Salam, Hoodbhoy dan lain-lain.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, 34.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, 41-42.

Sardar, seperti yang dikutip oleh M. Zainuddin, beranggapan bahwa program Islamisasi ilmu pengetahuan itu naif dan dangkal, malah justru yang terjadi adalah pembaratan (westernisasi) Islam. Beliau lantas mempertanyakan, bagaimana para ilmuwan sosial Muslim yang bekerja dalam paradigma yang berbeda bisa diharapkan memadukan disiplin-disiplin mereka dengan ilmuwan sosial Barat?²⁰ Ini merupakan sebuah reaksi ketidaksetujuan Sardar atas salah satu program kerja yang dirumuskan al-Faruqi, yaitu penentuan relevansi Islam bagi masing-masing bidang ilmu modern, tindakan itu dianggap Sardar tidak ubahnya seperti "menempatkan kereta di depan kuda". Bukan Islam yang perlu dibuat relevan dengan pengetahuan modern, melainkan pengetahuan modernlah yang harus relevan dengan Islam.²¹

Dalam pandangan Fazlur Rahman, ilmu pengetahuan Islam tidak bisa diislamkan, karena tidak ada yang salah di dalam ilmu pengetahuan. Masalahnya hanya dalam menyalahgunakannya. Bagi Fazlur Rahman, ilmu pengetahuan memiliki dua kualitas, seperti "senjata bermata dua" yang harus digunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab sekaligus sangat penting menggunakannya secara benar ketika memperolehnya.²² Mengenai Islamisasi ini, Abdus Salam, dalam sebuah pernyataannya mengatakan

²⁰ M. Zainuddin, *Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam* (Malang: Bayu Media, 2003), 160.

²¹ *Ibid.*, 161.

²² Adnin Armas, *Westernisasi dan Islamisasi Ilmu*, *Islamia*, Thn II No.6/Juli-September 2005, 15

bahwa "hanya ada satu sains universal, problem-problemnya dan bentuk-bentuknya adalah internasional dan tidak ada sesuatu seperti sains Islam sebagaimana tidak ada sains Hindu, sains Yahudi atau sains Kristen."²³

Terlepas dari pro-kontra di atas, gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan ini sudah berjalan lebih dari 30 tahun sejak dicanangkannya. Sudah cukup banyak hasil dalam bentuk tulisan yang dilahirkan. Tanpa bermaksud untuk mengatakannya Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai sebuah proses yang "gagal". Namun hingga saat ini, hasil konkrit dari upaya ini belum dirasakan. Sedangkan dari penentang ide Islamisasi pun, hingga saat ini belum memberikan ide yang konkrit sebagai jalan keluar dari problematika dualisme-dikotomis ini.

Saat ini, menurut Rosnani Hamim, stamina bagi Islamisasi ilmu pengetahuan telah berada pada tingkat yang sangat rendah. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, ketiadaan pemimpin yang mempunyai visi pengislaman ilmu pengetahuan. *Kedua*, peristiwa 11 September telah memberikan dampak terhadap institusi pendidikan Islam yang kini dipantau oleh Amerika Serikat sebagai upaya memberantas "terorisme". *Ketiga*, tidak terdapatnya strategi jangka panjang dan jangka pendek yang dirancang institusi berkenaan untuk memahami warganya dari segi falsafah Islamisasi ilmu dan juga penggarapan penggarapan falsafah ilmu warisan Islam dan Barat. *Keempat*, lemahnya intelektual muslim dari segi

²³ *Ibid.*

falsafah-metafisik, epistemologi, nilai, maupun dari segi *tasawwuf*. Kelima, kesibukan intelektual muda membuat penyelidikan empirikal demi kemajuan proyek ini, sehingga waktu mereka sepenuhnya diberikan kepada usaha riset tanpa meninggalkan ruang untuk pemikiran tinggi. Terakhir, kurangnya keyakinan dari sejumlah besar warga akademik terhadap misi ini.²⁴

Selain gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan di atas, di Indonesia sendiri telah ada beberapa usaha yang dilakukan sebagai upaya untuk keluar dari dualisme sistem pendidikan yang di format dalam bentuk kelembagaan. Dan dalam konteks ini lembaga pendidikan Islam adalah Madrasah sebagai salah satunya.

Madrasah sebagai salah satu bentuk kelembagaan pendidikan Islam yang memiliki sejarah cukup panjang.²⁵ Pada mulanya ilmu-ilmu yang diajarkan hanya berkisar sekitar ilmu-ilmu agama (*al-ulum al-diniyyah*), dengan penekanan pada ilmu fiqh, tafsir dan hadits. Sedangkan ilmu-ilmu "keduniaan" (*al-ulum al-dunyawiyyah*), seperti ilmu alam dan eksakta sebagai pengembangan sains dan teknologi tidak mendapat tempat.²⁶

Karena posisi madrasah yang menaruh jarak dengan sains modern dan membatasi diri pada ilmu-ilmu agama agaknya mengancam eksistensinya. Meskipun demikian, jika

²⁴ Rosnani Hamim, *Gagasan Islamisasi Ilmu ...* Op. Cit., 44-45.

²⁵ Selengkapnya tentang madrasah, baca Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

²⁶ Zakiah Daradjat, *Pengantar*, dalam Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya ...* Op. Cit., vii.

dilakukan penyesuaian dengan kecenderungan pendidikan modern, madrasah masih tetap dituntut untuk menampilkan cirinya sendiri yang memperhatikan ilmu agama secara lebih professional. Akhirnya, madrasahpun berada dalam posisi tarik menarik antara keharusan mengajarkan ilmu-ilmu agama secara moderen di satu pihak dan mengembangkan pengajaran ilmu-ilmu non-keagamaan di pihak lainnya. Jika madrasah terlalu konservatif akan mendorong lembaga itu terasing dan bahkan lenyap dari perkembangan modern. Sebaliknya, jika bersikap terlalu akomodatif terhadap kecenderungan pendidikan modern (sekuler), akan menjerumuskan madrasah ke dalam sistem pendidikan yang lepas dari nilai-nilai keislaman.²⁷

Ketika keluar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/1972, yang menyatakan bahwa semua lembaga pendidikan di Indonesia berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk lembaga pendidikan agama. Timbul reaksi yang cukup keras di kalangan umat Islam, mereka khawatir hal tersebut akan menghilangkan eksistensi pendidikan Islam. Berbagai usaha pun dilakukan untuk membatalkannya. Baik dari Departemen Agama sendiri maupun dari Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A). Mereka mengadakan pertemuan yang akhirnya merekomendasikan kepada Menteri Agama untuk disampaikan kepada presiden agar madrasah, sebagai lembaga pendidikan khusus, tetap berada di bawah tanggung jawab Departemen Agama dan "pendidikan umum" di ma-

²⁷ *Ibid.*, viii.

drasah disesuaikan dengan standar pengetahuan umum di sekolah umum setingkat. Dari rekomendasi tersebut akhirnya terbitlah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri). Dalam keputusan ini ditetapkan pendidikan umum di madrasah, dimaksudkan agar mutu ilmiah siswa madrasah setaraf dengan sekolah umum setingkat dalam hal pengetahuan umum, sehingga tamatan madrasah bisa naik ke jenjang yang sama di sekolah umum. Dalam hal ini perbandingan jam pelajaran untuk ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama ditetapkan 70% dan 30%.²⁸

Melalui SKB 3 Menteri tersebut, banyak mata pelajaran umum diberikan di madrasah, setingkat dengan apa yang diberikan di sekolah umum. Oleh karena itu, diharapkan dualisme pendidikan dan dikotomi pengetahuan (ilmu agama dan non agama) secara bertahap dapat terkikis dan pelaksanaannya dapat merubah pandangan banyak kalangan yang keliru. Lembaga pendidikan Islam tidak hanya memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan akhirat, tetapi juga ilmu-ilmu untuk mengapai kesejahteraan hidup di dunia ini.²⁹

Namun dalam perkembangannya, perjalanan madrasah tidak berjalan mulus seperti yang diinginkan. Karena ternyata, *out put* yang dihasilkan oleh madrasah tidak mempunyai kejelasan di segala sisi, baik kualitas, medan kiprah maupun arah dan tujuan jangka panjang dalam

²⁸ *Ibid.*, ix-x.

²⁹ *Ibid.*, x-xi

globalisasi di segala bidang.³⁰ Madrasah hanya menghasilkan lulusan yang serba tanggung di segala bidang, baik dalam bidang umum maupun agama, sehingga kalah bersaing dengan lulusan dari lembaga pendidikan lainnya.

Selain madrasah, pada level yang lebih tinggi saat ini juga digagas usaha untuk mengatasi problematika dualisme-dikotomis dalam sistem pendidikan. Gagasan awal yang muncul pada dekade 1990-an yaitu pemikiran untuk menjadikan IAIN sebagai pusat keunggulan studi keislaman yang direspon dengan pendirian pusat-pusat studi unggulan di IAIN. Kemudian muncul lagi gagasan dalam skala yang lebih besar yaitu mengembangkan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Ini berkaitan dengan isu perlunya Islamisasi ilmu pengetahuan dalam rangka menutupi kehampaan mental dan spiritual dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadi universitas, kemungkinan pengembangan disiplin-disiplin umum dapat dilakukan dan dipadukan dengan tradisi kajian Islam yang sudah berkembang. Gagasan ini juga menolong IAIN dari keterasingan yang lebih jauh dalam tata pergaulan perguruan tinggi. Dengan hanya membatasi pada kajian-kajian keislaman, sementara tidak mampu mengemasnya dalam pendekatan holistik, IAIN akan nampak menjadi perguruan tinggi yang eksklusif.³¹

³⁰ Muslih Usa (ed.), *Pengantar, dalam Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Ilmu, 1991), 7.

³¹ Husni Rahim, *UIN dan Tantangan Meretas Dikhotomi Keilmuan*, dalam M. Zainuddin dan M. In'am Esha (ed.), *Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Upaya Merespon Dinamika Masyarakat Global*, (Malang:

Ditandatangani MoU antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama menandai babak baru dalam pendidikan Islam. Beberapa perguruan tinggi Islam pun akhirnya berubah status menjadi universitas, jurusan-jurusan baru dalam bidang pengetahuan umum dibuka. Hal ini menandai berakhirnya era dualisme-dikotomis dalam pendidikan Islam pada satu sisi. Akan tetapi di sisi lainnya malah semakin mengokohkan problematika dualisme dikotomis itu sendiri. Jurusan baru dalam bidang-bidang non-agama tidak lebih hanya merupakan penambahan silabus "pendidikan umum" dan pelajaran umum dalam lembaga pendidikan agama, karena masing-masing mata pelajaran sesuai dengan kategori keilmuan, berakar pada lingkungan budaya, ideologis, nilai, keyakinan dan epistemologis yang sama sekali berbeda secara *diametris* dan sangat sulit untuk bersatu atau dipertemukan. Bukan hanya itu, dari segi kelembagaan sendiri sudah terlihat dikotomi yang nyata, di mana jurusan-jurusan agama berlandung di bawah Departemen Agama sedangkan jurusan-jurusan umum berlandung di bawah payung Departemen Pendidikan Nasional.

D. TELAAH KRITIS PERSOALAN DUALISME-DIKOTOMIS DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Problematika dualisme-dikotomis dalam pendidikan Islam merupakan persoalan klasik yang masih menjadi pembicaraan hangat hingga saat ini. Berbagai argumen te-

UIN Press, 2004), 50.

lah diungkapkan tentang akibat yang ditimbulkan dari paradigma ini dan berbagai solusi pun telah ditawarkan, baik dari sisi keilmuan maupun bentuk lembaga pendidikan. Akan tetapi persoalan tersebut masih belum terjawab tuntas hingga saat ini.

Ide Islamisasi ilmu pengetahuan yang digaungkan sejak 30-an tahun yang lalu dan telah menjadi pembahasan berbagai kalangan intelektual pun ternyata masih belum menemukan titik yang jelas, beberapa karya tentang Islamisasi ini telah di hasilkan, tetapi belum dirasakan hasil yang konkrit dari upaya tersebut, bahkan pada saat sekarang ini, isu Islamisasi ilmu pengetahuan itu makin meredup dan stamina mereka semakin melemah, intelektual muslim seolah dihadapkan dengan kebuntuan dalam memecahkan persoalan ini. Pro-kontra pun terus saja terjadi. Sehingga jalan untuk memuluskan ide ini semakin sulit dan terhambat. Bahkan, dalam sebuah sentilan kecil, Fazlur Rahman, seperti yang dikutip oleh Moh. Shofa mengatakan bahwa buat apa bersusah payah membuat rencana dan bagan bagaimana menciptakan ilmu pengetahuan Islami. Lebih baik kita manfaatkan waktu, energi dan uang untuk berkreasi.³²

Di Indonesia sendiri, telah coba dilakukan upaya untuk memadukan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum dalam lembaga yang dinamakan Madrasah. Tapi ternyata, upaya ini pun masih sangat jauh untuk dikatakan -tanpa bermaksud meremehkan- "berhasil", *output* yang dihasilkan masih belum bisa memenuhi harapan

³² Moh. Shofan, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan ...* Op. Cit., 11.

umat, mereka kalah bersaing dalam segi kualitas karena pengetahuan yang dimiliki serba tanggung, baik dalam penguasaan "ilmu pengetahuan umum" maupun "ilmu pengetahuan agama". Perubahan status perguruan tinggi Islam (IAIN, STAIN) menjadi universitas pun tampaknya akan mengalami hal yang sama jika tidak mendapat perhatian yang serius dari pihak pengelola.

Upaya integrasi kedua sistem ilmu (ilmu agama dan ilmu umum) bisa jadi malah menambah persoalan lembaga pendidikan Islam semakin ruwet. Karena, hingga saat ini, menurut Mulkhan³³, belum tersusun sebuah konsep ilmu integral ilmiah yang mampu mengatasi dikotomi ilmu umum dan ilmu agama itu sendiri. Dan jika tetap dipaksakan, bisa saja mengakibatkan ambivalensi pada peserta didik yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwanya. Selain integrasi tersebut semakin menambah berat beban peserta didik, akibat lebih lanjut adalah pengembangan kemampuan peserta didik dalam menguasai ilmu akan terkesan lebih lambat dan hasil belajar pun cenderung rendah. Akhirnya, *output* yang dihasilkan lembaga pendidikan Islam akan dipandang "rendah" dan kualitasnya dianggap di bawah lembaga-lembaga pendidikan non keislaman.

Melihat kondisi yang demikian, menurut hemat penulis, yang perlu kita lakukan adalah segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam bentuk kerja yang nyata.

³³ Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritualis Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 188.

Ini bukan berarti kita merumuskan sebuah desain keilmuan yang baru, atau membuat lembaga pendidikan yang berbeda dari apa yang telah ada selama ini. Akan tetapi, perlu adanya upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dari setiap lembaga pendidikan yang ada. Kita lupakan sejenak persoalan dualisme-dikotomis dalam lembaga pendidikan Islam, ini bukan berarti menganggap persoalan dualisme-dikotomis sebagai sebuah persoalan yang tidak penting, tetapi masih banyak persoalan lembaga pendidikan Islam yang harus terlebih dahulu dibenahi. Baik itu persoalan internal maupun eksternal kelembagaan, seperti bangunan sekolah yang kurang memadai, pengajar-pengajar yang kurang berkualitas, kurikulum yang tidak terarah, hubungan lembaga pendidikan dengan lingkungan luar, orang tua serta masyarakat yang belum harmonis dan lain sebagainya.

Dalam pandangan penulis, setiap lembaga pendidikan mempunyai potensi yang sama untuk bisa maju dan berkembang serta menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan berkiprah dengan ke-khas-an mereka masing-masing, baik itu madrasah, pesantren, maupun sekolah-sekolah umum. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut akan bisa berhasil asalkan di dukung paling tidak, menurut Johnson, seperti yang dikutip oleh Nur Kholis,³⁴ oleh empat hal. *Pertama*, sekolah memiliki tujuan yang jelas berkaitan dengan pencapaian akademis; *kedua*, memiliki staf yang bersikap dan berperilaku positif dalam kerjasama dengan koleganya; *ketiga*,

³⁴ Nur Kholis, *Menguak Tabir Keberhasilan Pendidikan: Sebuah Analisis Multidimensional*, dalam Tarbiyah, No.41, Tahun XIII, Januari-Maret 1996, 11.

mempertahankan keseimbangan antara tuntutan akademis dan administratif; *keempat*, mempertahankan hubungan dengan lingkungan luar, orang tua dan masyarakat.

Keempat unsur tersebut merupakan hal terpenting yang harus dibenahi oleh lembaga-lembaga pendidikan Indonesia. Baik itu lembaga pendidikan umum terlebih lagi lembaga pendidikan Islam. Tanpa adanya tujuan pencapaian akademis yang jelas, *out put* yang dihasilkan pun akan berada dalam ketidakpastian. Jika staf tidak berperilaku positif, lembaga pun tidak akan berjalan. Jika tuntutan akademis dan administratif tidak seimbang, perjalanan lembaga akan pincang dan jika tidak terbina hubungan yang baik dengan lingkungan luar lembaga akan terkucilkan.

Selain itu, kurikulum pendidikan pun, menurut McGraw, seperti yang dikutip Nur Kholis,³⁵ paling tidak memiliki tiga ciri yang mendasar. *Pertama*, pengetahuan dasar yang penting harus dapat diperoleh oleh semua siswa terlepas dari latar belakang siswa. Hal ini penting karena kelas seringkali ditempati oleh siswa dengan kemampuan, interest, dan latar belakang yang beragam yang namun demikian memerlukan pengembangan yang seimbang dan merata. Di samping itu sekolah yang didirikan bukanlah hanya untuk sekelompok murid tertentu, tapi ia adalah tempat di mana sejumlah anak mencari ilmu dan keterampilan, jadi pengetahuan dan keterampilan harus dapat dipertoleh semua siswa. *Kedua*, alokasi waktu diseimbangkan untuk semua kurikulum. Keputusan alokasi waktu didasarkan

³⁵ *Ibid.*, 12.

pada keadaan pengetahuan, pelajaran mana yang paling berharga, dan bagaimana siswa belajar terbaik. jadi kalau kurikulum tertentu (misalnya pendidikan agama) dianggap penting tetapi alokasi waktu tidak seimbang, maka hasil yang diinginkan pun tidak akan maksimal. *Ketiga*, koherensi kurikulum. Dalam hal ini berarti bahwa pelajaran yang lalu harus menjadi landasan untuk pelajaran sekarang dan untuk memprediksikan pelajaran yang akan datang. Koherensi akan sangat membantu siswa untuk memahami pengetahuan tertentu secara komprehensif karena sifatnya tidak terpisah-pisah.

Selain itu, para tenaga pengajar dan pimpinan lembaga pendidikan pun tidak kalah penting posisinya dalam membawa keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Selama ini, masih banyak ditemukan di sekolah-sekolah, baik itu lembaga pendidikan umum maupun agama, tenaga pengajar yang berkualitas sangat rendah. Jika ini tidak mendapat perhatian yang serius, akan sangat berimplikasi terhadap perjalanan sebuah lembaga pendidikan. Sebaik apapun program yang dicanangkan, sistem pendidikan yang dirancang, dan kurikulum yang dibuat, jika tidak didukung dengan sumber daya yang memadai tidak akan tercapai dengan baik hasil yang diinginkan.

Selain itu, menarik sekali apa yang pernah disampaikan oleh Zhahir Kechot,³⁶ dosen senior Universitas Kebangsaan Malaysia, bahwa untuk membangun sebuah lembaga pen-

³⁶ Gema, Tabloid Dwibulanan Universitas Islam Negeri Malang, Edisi 16 Nopember-Desember 2004, 5.

didikan yang berkualitas, maka seluruh komponennya harus di mulai dengan insan yang berkualitas. Baik itu tenaga pengajar, karyawan maupun peserta didik yang akan direkrut haruslah orang-orang yang berkualitas. Karena itu, menurut Dato' Kamaruddin Mohd Yusof,³⁷ sebuah lembaga pendidikan haruslah sedini mungkin menciptakan apa yang disebut "*quality culture*", yaitu sebuah budaya yang berorientasi pada kualitas. Di mana seluruh komponen yang terkait dengan lembaga pendidikan tersebut selalu berpikir dan bertindak, berorientasi pada peningkatan kualitas lembaga. Jika hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka persoalan dualisme-dikotomis, bisa jadi bukan lagi sebuah persoalan besar dalam sistem Pendidikan Islam, baik di Indonesia, maupun di dunia. []

³⁷ *Ibid.*, 3.



Bagian 4

KONSEP KEPEMIMPINAN BERBASIS SPIRITUAL DALAM MENGEMBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN (ISLAM)

A. PENDAHULUAN

Pluralisme merupakan realitas hidup dalam masyarakat modern. Berbagai kelompok sosial, organisasi, badan pemerintah, perkumpulan, gerakan-gerakan sosial, partai politik, lembaga kemasyarakatan, termasuk didalamnya lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Masing-masing organisasi atau kelompok mempunyai *interest*, tujuan dan daerah operasi sendiri-sendiri. Maka persaingan, kompetisi dan konflik merupakan realitas nyata yang banyak terjadi di tengah masyarakat modern.¹ Realitas inilah yang menyebabkan ada-

¹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal itu?*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 243.

nya keniscayaan bagi suatu organisasi yang ingin tetap *survive* ditengah masyarakat untuk selalu mengikuti atau merespon perkembangan yang ada, baik yang berasal dari luar organisasi maupun yang berasal dari tuntutan anggotanya. Jika tidak maka ia akan tertinggal dari organisasi lain, ditinggalkan oleh para anggotanya atau bahkan akan "gulung tikar" meski ia telah memiliki sejarah yang panjang.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Warrent Bennis sebagaimana dikutip Adam Ibrahim Indrawijaya:²

"Bila perubahan dalam sistem nilai akan berkelanjutan, maka setiap organisasi harus berusaha belajar untuk lebih responsif, baik terhadap lingkungannya maupun terhadap tuntutan para anggotanya".

Saat ini Kemampuan bertahan suatu organisasi bukan hanya ditentukan atau hanya cukup dengan mengandalkan kharisma dari seorang pemimpin saja, akan tetapi juga kemampuan dari seorang pemimpin untuk merespon segala yang ada dan terjadi disekitarnya serta memiliki *good will* untuk selalu melakukan perubahan dan pengembangan organisasinya. Dalam hal ini seorang pemimpin hendaknya memiliki kecerdasan yang tinggi dalam merespon lingkungannya, karena seorang pemimpin tidak berdiri sendiri dalam memimpin sebuah organisasi melainkan ia terkait dengan faktor lain, yakni situasi (*situation*) termasuk di dalamnya tugas, tekanan, lingkungan, dan lain sebagainya

² Adam I. Indrawijaya, *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 17.

serta pengikut (*followers*) yang didalamnya terdapat norma-norma, nilai-nilai, keterpaduan, dan lain-lain.³ Teori modern memandang suatu organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari lima bagian pokok, yaitu input, proses, output (arus balik) dan lingkungan.⁴ Sebagaimana Sondang P. Siagian menyebutkan bahwa kepemimpinan tidak pernah bergerak dan berfungsi dalam suasana vakum. Ia bersifat situasional, kondisional, temporal dan spatial, atau dengan kata lain banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan seseorang.⁵

Terkait dengan beberapa hal tersebut, maka menurut analisa Adam I. Indrawijaya ada beberapa faktor yang mendorong seorang pemimpin untuk senantiasa merespon lingkungan sekitarnya, diantaranya:⁶

Pertama, Setiap pemimpin organisasi dituntut pertanggungjawabannya (*accountability*) oleh anggota organisasi itu sendiri maupun masyarakat (lingkungan luar organisasi). Hal ini disebabkan karena apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan berdampak atau berpengaruh bukan hanya untuk dirinya, organisasinya akan tetapi juga masyarakat disekitarnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin adalah mengkomunikasikan segala ke-

³ Ginnet Hughes and Curphy, *Leadership: Enhancing The Lesson of Experience 4thEd*, (McGraw Hill Irwin, 2002), 24.

⁴ Dicky Wisnu Ur-Siti Nurhasanah, *Teori Organisasi, Struktur dan Desain*, (Malang: UMM Press, 2005), 117.

⁵ Sondang P. Siagian, *Teknik Menumbuhkan dan Mengembangkan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), 81.

⁶ Adam I. Indrawijaya, *Perubahan dan Pengembangan ...* Loc. Cit., 17-19.

bijakan yang diambil baik kedalam maupun keluar organisasi.

Kedua, Adanya persaingan antar organisasi baik yang sejenis maupun tidak, hal inilah yang kemudian menuntut seorang pemimpin untuk memanfaatkan potensi-potensi manusiawi. Seringkali yang menjadi pemicu timbulnya persaingan adalah materi (misalnya modal, uang, dll) yang jumlahnya terbatas, sementara faktor non materi misalnya potensi manusia kurang diperhitungkan. Padahal sebagaimana diketahui bahwa masing-masing anggota memiliki potensi yang sangat besar dan bervariasi untuk diakui, dihargai eksistensinya serta dimanfaatkan dalam organisasi. Tiap individu dalam organisasi memiliki keanekaragaman potensi (baca: *Multiple Intelligence*) misalnya kecerdasan spasial, kecerdasan linguistic, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan matematik/logic, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan potensi yang dapat memajukan organisasi akan tetapi juga dapat menjadi "bumerang" bagi organisasi jika tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Jika dikelola dengan baik perbedaan tersebut akan menjadi suatu harmoni yang saling menguntungkan antar anggota organisasi yang pada akhirnya akan dapat memajukan organisasi, akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan benturan diantara mereka yang pada akhirnya akan merugikan organisasi. Persaingan jika ditanggapi dan dikelola dengan baik akan dapat menjadi motivator bagi tiap anggota organisasi agar dapat meningkatkan efektivitas serta semangat kerja mereka. Selain itu persaingan antar organisasi

baik yang sejenis maupun tidak seringkali seringkali menimbulkan ketegangan diantara mereka, sehingga diperlukan pola hubungan manusiawi diantara mereka.

Ketiga, Kompleksitas hubungan kerja baik didalam maupun antar organisasi dalam hal ini seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan organisasi lain. Seorang pemimpin harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa ia dan organisasinya "tidak sendiri", artinya Organisasi yang dipimpinnya berada di tengah organisasi lain baik yang sejenis maupun tidak sehingga suatu keharusan bagi suatu organisasi untuk bekerjasama dengan organisasi lain.

Keempat, Setiap organisasi memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin organisasi hendaknya mampu mengintegrasikan berbagai macam kegiatan untuk mencapai beberapa tujuan. Tujuan yang ingin dicapai bisa berasal dari tuntutan anggota maupun dari masyarakat luar. Karena organisasi merupakan kumpulan orang yang bekerjasama yang didalamnya terdapat proses pembagian kerja, terdapat sistem dan struktur yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Meski orang-orang yang menjadi anggota organisasi bekerjasama untuk mencapai tujuan yang bersama, akan tetapi mereka tetap individu yang memiliki tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Dalam hal ini berarti Organisasi harus mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh anggotanya, serta sebagai bagian dari masyarakat maka organisasi juga dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.

Kelima, Dengan semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam organisasi, maka Seorang pemimpin dituntut melakukan hubungan manusiawi dengan anggota organisasinya. Seringkali terlupakan oleh para pemimpin organisasi bahwa yang mereka pimpin adalah manusia bukan robot, sehingga pola interaksi yang dilakukan seringkali bersifat "kaku", kurang manusiawi serta kurang memperhatikan dan menghargai potensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi. Sebagai manusia (anggota organisasi) menuntut untuk diperlakukan secara manusiawi misalnya usaha yang dilakukannya dihargai, perannya dalam organisasi diakui, diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ia miliki, tercukupi kebutuhan dan kesejahteraannya dan lain sebagainya. Intinya seorang pemimpin harus mampu "memanusiakan manusia" yang merupakan nafas suci dari spirit dari makhluk Tuhan.

B. PENGEMBANGAN ORGANISASI (ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT/OD)

Agar suatu organisasi dapat bertahan terhadap lingkungan yang selalu berubah, maka organisasi tersebut harus selalu berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Dari aspek manajemen, upaya untuk meningkatkan keberhasilan organisasi dalam menjawab perubahan lingkungan tersebut di antaranya dengan melakukan pengembangan organisasi.⁷

⁷ [www.depdiknas.go.id/Jurnal/41 Subijanto.htm](http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/41%20Subijanto.htm)-83k

Istilah *Organizational Development* (OD/Pengembangan Organisasi) mulai dikenal pada tahun 1960-an.⁸ *Organizational Development* (OD) menurut Newstorm dan Davis (1997) dalam Husaini Usman⁹ adalah Strategi intervensi yang memanfaatkan proses kelompok untuk berfokus pada budaya organisasi secara menyeluruh dalam rangka melakukan perubahan yang diinginkan. OD diperlukan karena *pertama*, struktur imbalan tidak cukup memperkuat pelatihan konvensional dan *kedua* laju perubahan yang berlangsung cepat.¹⁰

Freud Luthans dalam Hadari Nawawi¹¹ memberikan pengertian bahwa: *Organizational Development* (OD) adalah pendekatan modern dalam manajemen terhadap perubahan dan perkembangan organisasi dari sudut Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pengertian tersebut terkandung dua makna tentang pendekatan modern yakni *Pertama*, OD harus diselenggarakan dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokratis dalam memberdayakan SDM yang dimiliki. *Kedua*, konsep OD sebagai sebuah pendekatan modern, maka OD dalam melakukan perbaikan dan perubahannya

⁸ George Strauss dan Leonard R. Sayles, *Manajemen Personalial: Segi Manusia dalam Organisasi*, Peterj: Grace M Hadikusuma dan Rochmulyati Hamzah, (Jakarta: Gramedia, 1991), 302.

⁹ Husaini Usman, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2004), 206.

¹⁰ Keith Davis, *Human Behavoir at Work: Organizational Behavior, Seventh Edition*, Peterj: Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2004), 246.

¹¹ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 196.

harus memperhatikan atau bahkan beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan dilingkungannya.

Sedangkan Warrent Bennis mengemukakan pengertian OD sebagaimana dikutip Adam I. Indrawijaya:¹²

“Pengembangan organisasi adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang rumit yang dimaksudkan untuk merubah kepercayaan, nilai-nilai dan struktur dari suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat lebih mampu menyesuaikan diri dengan teknologi baru, pasar dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri”.

Sedangkan Richard Beckhart mengemukakan rumusan pengembangan organisasi sebagai berikut:¹³

“Pengembangan Organisasi adalah suatu usaha: 1). Terencana, 2). Mencakup organisasi secara keseluruhan dan 3). Dikelola dari atas untuk, 4). Meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui, 5). Intervensi berencana terhadap proses yang terjadi dalam organisasi dan dengan mempergunakan pengetahuan yang berasal dari ilmu perilaku”.

Dari berbagai definisi tersebut diperoleh suatu pengertian bahwa OD merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh suatu organisasi dalam menjawab segala tantangan, perubahan, tuntutan yang berasal dari dalam maupun luar organisasi melalui usaha yang terencana, mencakup seluruh elemen organisasi (karena organisasi merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat beberapa

¹² Adam I. Indrawijaya, *Perubahan dan Pengembangan ...* Op. Cit., 37.

¹³ *Ibid.*, 37-38.

sub sistem), diawali dari seorang pemimpin (ada *good will* dari pemimpin untuk mengadakan perubahan dan pengembangan), melalui perubahan tersebut diharapkan dapat merubah kepercayaan, nilai-nilai dan struktur dari suatu organisasi sehingga mampu meningkatkan efektifitas organisasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi

Program dan kegiatan PO dalam kepemimpinan untuk meningkatkan efektivitas bertolak dan berpedoman pada filsafat dan nilai-nilai yang jelas mengenai manusia dan kehidupannya. Wendell French PO (dikutip oleh Ach. Mohyi) ¹⁴ Proses OD adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan budaya organisasi terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif dengan tekanan khusus pada budaya tim-tim kerja formal dengan bantuan pengantar perubahan, katalisator dan penggunaan teori serta teknologi ilmiah, berperilaku tanpa, mencakup riset kegiatan.

Dari pengertian tersebut terkait dengan beberapa masalah yang ada dalam organisasi, diantaranya:

1. *Pertama*, Proses pemecahan masalah dan penanganan berbagai macam ancaman serta peluang. Dalam hal ini OD dimulai dengan proses diagnosis terhadap masalah, peluang dan lain sebagainya yang terkait dengan organisasi. Seorang pemimpin dapat melakukan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity and*

¹⁴ Ach. Mohyi, *Teori dan Perilaku Organisasi*, Edit.: Trioningsih dan Ratih Juliati, (Malang: UMM, 1991), 225-226.

- Treat*) terhadap setiap elemen yang terdapat/dimiliki organisasi.
2. *Kedua*, Proses pembaharuan. Setelah teridentifikasi semua masalah, kelemahan, peluang serta hambatan yang ada, sedang dan diperkirakan akan dialami oleh organisasi, maka seorang pemimpin memulai suatu upaya perubahan. Dengan berdasar pada hasil diagnosis yang telah diperoleh maka kebijakan dan pendekatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan dapat membawa perubahan bagi organisasi, baik dari segi struktural maupun perilaku organisasi. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan kinerja anggota organisasi.
 3. *Ketiga*, Manajemen kolaboratif atau manajemen melalui partisipasi bawahan dan pembagian kekuasaan. Dengan diterapkannya manajemen kolaboratif ini, seorang pemimpin akan mendapat banyak masukan atau informasi tentang berbagai hal yang terjadi dalam organisasi yang mungkin tidak/belum diketahui oleh seorang pemimpin, bawahan memperoleh kebebasan untuk mengekspresikan kemampuannya untuk kemajuan organisasi, selain itu ada manfaat lain yang dapat diperoleh ketika seorang pemimpin bersedia mendengar apa yang disampaikan oleh bawahannya diantaranya adalah bawahan tersebut akan merasa dihargai, bawahan akan mempunyai rasa ikut berperan dan memiliki organisasi, dan lain sebagainya. Setelah bawahan merasa ikut memiliki organisasi, maka ia akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap per-

kembangan organisasi, hal inilah yang kemudian menjadi "kekuatan" besar pendorong terjadinya perubahan dan pengembangan organisasi.

4. *Keempat*, Budaya Organisasi. Salah satu yang ingin rubah dalam upaya pengembangan organisasi adalah perilaku organisasi. Adanya budaya organisasi yang baik yang dimiliki oleh setiap anggota, maka akan tercipta hubungan sinergis yang saling mendukung antar anggota dalam organisasi. Budaya organisasi yang perlu dikembangkan adalah saling keterbukaan, kepercayaan, kerjasama, persaingan, dan lain sebagainya.
5. *Kelima*, Riset kegiatan artinya setiap kegiatan harus didahului dengan adanya riset tentang kelebihan, kelemahan, peluang dan hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Keenam, Peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja. Semua upaya yang dilakukan hendaknya senantiasa diarahkan pada peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja yang menjadi tujuan diadakannya pengembangan organisasi. Dua hal ini pula yang dijadikan indikator keberhasilan dari pengembangan organisasi.

Sebagai tolok ukur keberhasilan upaya pengembangan organisasi, maka Husaini Usman mengidentifikasi beberapa Indikator organisasi bermutu dan efektif diantaranya: 1). Berfokus pada pelanggan, 2). Berfokus pada pencegahan masalah, 3). Investasi pada manusia dan menganggap manusia sebagai aset organisasi yang tak ternilai, 4). Memiliki strategi untuk mencapai mutu, 5). Memperlakukan keluhan sebagai

umpan balik untuk memperbaiki diri (responsif), 6). Memiliki kebijakan dalam perencanaan mutu, 7). Mengupayakan proses perbaikan terus-menerus dengan melibatkan semua terkait (partisipatif), 8). Membentuk fasilitator yang ber-mutu (mau dan mampu memimpin proses perbaikan), 9). Mendorong orang yang untuk berinovasi dan berkreasi, 10). Memperjelas peranan dan tanggung jawab setiap orang, 11). Memiliki strategi evaluasi yang obyektif dan jelas, 12). Memiliki rangka jangka panjang, 13). Memiliki rencana jangka panjang, visi dan misi, 14). Memandang mutu sebagai bagian dari kebudayaan, 15). Terbuka dan bertanggung jawab.¹⁵

Sebagai sebuah teori baru tentunya OD memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari seorang pemimpin, agar ia dapat menentukan kebijakan dan pendekatan yang tepat bagi dalam meningkatkan efektifitas organisasi.

Adapun kelebihan dan kekurangan OD menurut Newstrom dan Davis, 1997 dalam Husaini Usman diantaranya adalah:¹⁶

Kelebihan	Kekurangan
<ul style="list-style-type: none">• Perubahan seluruh organisasi• Motivasi lebih besar• Meningkatkan produktivitas• Kualitas kerja lebih baik• Kepuasan kerja lebih besar• Meningkatkan kerja tim	<ul style="list-style-type: none">• Diperlukan banyak waktu• Biaya besar• Menunda periode pembayaran gaji• Kemungkinan gagal• Kemungkinan invasi privasi• Kemungkinan gangguan

¹⁵ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Mengefektifkan ...* Loc. Cit., 211.

¹⁶ *Ibid.*

<ul style="list-style-type: none">• Menanggulangi konflik lebih baik• Komitmen terhadap sasaran• Meningkatkan kemauan berubah• Mengurangi kemangkiran• Pergantian tenaga kerja lebih rendah• Kreasi Pembelajaran individu dan group	<ul style="list-style-type: none">• psikologi• Kemungkinan timbul kompromitas• Menekankan pada proses group daripada kinerja• Kemungkinan konsepnya membingungkan• Sukar dievaluasi• Bertentangan dengan budaya
--	--

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi perlu OD atau tidak dalam upaya meningkatkan efektifitas dan kinerja manusia dalam organisasi maka, OD sebaiknya didahului dengan penelitian, misalnya tentang apa yang diinginkan oleh seorang bawahan?, apa yang tidak disenangi? Kapan dilaksanakan OD?, Bagaimanana caranya?, dan mengapa harus dilakukan *Organizational Development*? Dan lain sebagainya. Hasil dari penelitan tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan atau dasar bagi seorang pemimpin dalam menentukan langkah pengembangan organisasinya.

OD merupakan suatu pendekatan organisasional yang menempatkan organisasi dan manusia dalam organisasi sebagai *tools* atau alat untuk melakukan perubahan. Sedangkan tujuan dilakukannya OD adalah meningkatkan kinerja manusia dalam organisasi dengan menggunakan pendekatan struktural dan behavioral. Pendekatan melalui perilaku organisasi (*Organizational Behavior*) merupakan pendekatan yang sangat penting untuk mengefektifkan sebuah organisasi selain pendekatan struktural. Dalam artian selain menempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuan yang

mereka miliki, dan perilaku mempunyai peranan yang sangat penting artinya seorang pemimpin harus mampu memotivasi kepada bawahannya agar memiliki perilaku organisasi yang baik.

Pengembangan organisasi sedikit banyak akan menyebabkan perubahan dalam tubuh organisasi. Perubahan yang dilakukan oleh seorang pemimpin meski untuk kebaikan organisasi bukan tanpa hambatan. Hambatan itu diantaranya adalah penolakan terhadap perubahan baik dilakukan dari perorangan (anggota organisasi) maupun dari organisasi itu sendiri. Penolakan dari perorangan diantaranya disebabkan oleh karakteristik manusia itu mencakup persepsi, kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan. Sedangkan alasan individu menolak perubahan diantaranya adalah kebiasaan (karena manusia menghadapi realitas kehidupan yang cukup rumit, oleh karena itu manusia membuat kebiasaan yang ia lakukan agar ia tidak perlu berpikir panjang untuk menetapkan pilihan dari banyak keputusan yang harus ia buat setiap hari), keamanan (adanya anggapan bahwa perubahan akan membahayakan posisi mereka dalam organisasi), faktor ekonomi (anggapan bahwa perubahan akan mempengaruhi pendapatan mereka), Kekhawatiran terhadap hal yang tidak diketahui (perubahan yang terjadi terkadang merupakan hal yang baru dan benar-benar belum diketahui, hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dalam diri anggota organisasi), memproses informasi secara selektif (setiap individu membentuk dunia mereka berdasarkan persepsi yang mereka miliki, mereka menolak perubahan terhadap dunia kreasi mereka).

Sedangkan penolakan organisasi bersumber dari kelalaian struktural (Organisasi memiliki mekanisme pengembangan untuk menghasilkan stabilitas, jika terjadi perubahan maka kelalaian ini berfungsi untuk mempertahankan stabilitas), fokus perubahan yang terbatas (organisasi merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat beberapa subsistem, jika terjadi perubahan hanya pada salah satu subsistem saja maka akan menimbulkan goncangan dalam organisasi dan perubahan tersebut akan cenderung terhapus "absurb" oleh subsistem lain atau sistem lain yang lebih besar), kelalaian kelompok (jika individu ingin merubah perilaku mereka, maka norma-norma kelompok mereka dapat berlaku sebagai suatu pembatas, hal ini yang kemudian menyebabkan individu tersebut sulit berubah), ancaman terhadap keahlian (misalnya dengan berkembangnya IT (*Information Teknology*) dapat mempermudah seorang manajer mengakses informasi yang ia butuhkan sehingga hal ini dapat diartikan sebagai sebuah ancaman bagi para pekerja yang memiliki keahlian khusus dalam hal computer), ancaman terhadap hubungan kekuatan yang dibangun (dengan adanya perubahan yang terjadi dalam organisasi misalnya ketika seorang pemimpin menerapkan manajemen partisipasif maka dapat dianggap sebagai suatu ancaman bagi seorang *middle manager* karena sebuah tim akan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang dianggap penting tanpa menunggu instruksi dari atasan), ancaman terhadap alokasi sumber daya yang dibangun (kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber

daya tertentu seringkali melihat perubahan sebagai suatu ancaman, sehingga mereka cenderung merasa puas dengan cara berpikir mereka sendiri).¹⁷

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai penolakan tersebut diantaranya adalah:

1. Pendidikan dan komunikasi (agar tercapai persamaan persepsi tentang perubahan yang dilakukan),
2. Partisipasi (mengajak mereka yang berseberangan untuk berpartisipasi didalamnya),
3. Fasilitas dan dukungan (misalnya dengan memberikan motivasi dan *reward*),
4. Negoisasi (perundingan, musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait) dan lain sebagainya.

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan organisasi atau PO/OD pada dasarnya mengarah pada adanya suatu perubahan dalam tubuh organisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerjanya. Sedangkan tujuan dari perubahan suatu organisasi pada dasarnya ada dua yakni untuk memperbaiki kemampuan organisasi dalam merespon dan beradaptasi dengan perubahan dilingkungannya serta untuk merubah perilaku anggota organisasi.

C. PENDEKATAN KEPEMIMPINAN: TEAM BUILDING

Pada proses pengembangan organisasi salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan Pengembangan tim.

¹⁷ Stephen P. Robbins, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Peterj: Halida dan Dewi Sartika, (Jakarta: Erlangga, 2002), 302-310.

Konsep Pengembangan tim dapat diterapkan pada setiap organisasi. *Team Building* (pembinaan/pengembangan tim) adalah suatu metode untuk memperbaiki efektifitas organisasi pada tim dengan mendiagnosis hambatan prestasi tim dan memperbaiki hubungan antar tim serta menyelesaikan tugas.¹⁸ Dalam sebuah tim yang efektif setiap anggota menjalankan peran khusus yang sesuai dengan bakat terbaik mereka. Ketika para anggota tim tersebut mengintegrasikan keterampilan-keterampilan mereka dengan memberi penekanan pada kekuatan dan kelemahan mereka, tujuan tim umumnya tercapai. Sebagian besar keberhasilan/kemenangan atau kegagalan/kekalahan merupakan hasil dari "kerja tim". Jika kerja sama tim tidak berjalan, pemimpin yang baik dapat mengidentifikasi dimana letak permasalahannya, dan memprakarsai tindakan perbaikan sampai hasil yang diharapkan tercapai.

Absennya kerja tim pada suatu tingkatan atau di antara tingkatan akan membatasi efektifitas organisasi dan akhirnya mematikan organisasi tersebut. Diperlukan usaha untuk membentuk dan memelihara kerja sama tim. Jika seorang pemimpin tidak mengutamakan kerja sama tim, maka efektivitas tidak akan terjadi. Kerja sama tim memerlukan usaha untuk mengembangkannya, dan upaya terus menerus untuk memeliharannya agar hasil yang di peroleh sebanding.¹⁹

¹⁸ James A. F. Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert, Jr, *Manajemen*, Peterj.: Alexander Sindoro, (Jakarta: Prenhalindo, 1996), 115.

¹⁹ Robert B. Maddux, *Team Building: Terampil Membangun Tim Handal*, Peterj.: Kristiyabudi P. Hananto, (Jakarta: Erlangga, 2001), 10-11.

Richard Denny²⁰ mengemukakan pendapat bahwa semua pemimpin dan motivator tim mengetahui tentang hukum motivasi yakni "ketika motivasi tercipta, ia tidak bersifat abadi", maka perlu diciptakan iklim harus cocok. Prinsip ini, tentu saja diterapkan bukan hanya untuk memotivasi diri individu, tetapi juga untuk mengubah kelompok menjadi sebuah tim. Agar menjadi termotivasi dan bahagia didalam pekerjaan, ada lima prinsip yang dapat dilakukan yakni:

1. Mereka seharusnya mampu. Orang harus mampu menyelesaikan pekerjaan atau tugas atau jabatan yang dipercayakan padanya.
2. Mereka harus sesuai untuk jabatannya. Orang seharusnya mampu, melalui pelatihan dan berbagai program pengembangan kepribadian, agar menjadi sesuai dengan peran yang harus mereka mainkan dalam tim mereka.
3. Mereka tidak boleh berpuas diri. Seorang yang menyukai pekerjaannya tidak seharusnya bekerja terlalu berlebihan. Ia harus mencari keseimbangan. Pengimbang sungguh penting didalam memelihara gairah dan efektivitas secara maksimum.
4. Mereka harus merasakan sukses. Sebuah tim, tentu saja tim yang terdiri beragam individu, agar mampu mencapai sukses, harus bahagia dan kebahagiaan itu dapat dikembangkan melalui kemampuan merasakan kenikmatan sukses. Disini sekali lagi kita mengingat hukum

²⁰ Richard Denny, *Sukses Memotivasi: Jurus Jitu Meningkatkan Prestasi*, Penerj.: Pius M. Sumaktoyo, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 79-81.

sukses yang berkata: "mengetahui diri kita sendiri melangkah maju memotivasi kita".

5. Mereka harus mempunyai sikap yang tepat. Dalam Memotivasi Tim, harus diingat bahwa kita sedang membahas gagasan-gagasan yang dapat diberlakukan pada sebuah tim di tempat kerja, juga pada sebuah tim dalam permainan, dan juga pada sebuah tim dalam aktivitas apa pun.

Kompetisi atau persaingan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena kompetisi dapat menyinkap faktor-faktor yang menyebabkan kebinasaan, keterbelakangan dan kelemahan kemudian diantisipasi. Dengan adanya kompetisi juga akan tampak faktor-faktor penyebab pertumbuhan, kemajuan dan kekuatan.²¹ Akan tetapi adanya kompetisi baik antar anggota maupun antar organisasi perlu mendapat perhatian dari seorang pemimpin, karena jika tidak persaingan yang tidak sehat akan berkembang dan pada akhirnya kan merugikan organisasi itu sendiri. Dalam hal ini seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menciptakan persaingan yang sehat agar menjadi pendorong untuk maju dengan tanpa mengabaikan pentingnya menjalin kerjasama.²²

Ada beberapa faktor yang mendorong usaha pembentukan tim yang efektif, diantaranya:²³

²¹ Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen Berbasis Al Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 37-41.

²² Charles J. Keating, *Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya*, Peterj.: A. M. Mangunhadjana, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 32-35.

²³ Adam I. Indrawijaya, *Perubahan dan Pengembangan ...* Op. Cit., 106-107.

1. Makin meningkatnya spesialisasi dalam organisasi. Makin kompleksnya suatu organisasi menuntut makin besar dan tajamnya spesialisasi. Adanya spesialisasi ini bila tidak ditangani dengan baik akan dapat menimbulkan terjadinya cara bekerja kotak-kotak
2. Makin meningkatnya konsepsi partisipasi. Perkembangan teori dan praktek organisasi dan manajemen masa kini antara lain ditandai oleh makin berkembangnya pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Hal ini membawa konsekuensi bahwa manusia tidak hanya diperlakukan sebagai salah satu unsur produksi. Mereka menuntut dan sudah diperlakukan untuk berperan serta dalam keseluruhan proses manajemen atau kegiatan organisasi.
3. Adanya konsepsi sinergi. Sudah tidak dipersoalkan lagi bahwa apabila para anggota organisasi dapat berfikir, bertindak serta bekerja bersama, maka mereka akan dapat menghasilkan suatu yang sering diluar perkiraan orang lain. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa adanya kerjasama yang serius dapat mengembangkan kreatifitas, kemampuan memecahkan persoalan dan perasaan keikutsertaan yang lebih besar.

Selain itu ada sepuluh kunci untuk menciptakan lingkungan yang sesuai bagi tim agar dapat termotivasi secara alamiah. Itu adalah salah satu prinsip besar dalam kepemimpinan yang baik dan bersifat memotivasi, yang tidak berupa sesuatu yang membebani atau memaksa melainkan berupa suatu iklim positif dan alami bagi ungkapan yang

bersifat memotivasi sehingga kerja tim dapat lebih efektif adalah:²⁴

1. *Kondisi kerja yang positif.* Maksudnya adalah bahwa perlengkapan, peralatan dan sistem dimana anggota tim akan bekerja haruslah secara nyata berfungsi baik.
2. *Penegasan tugas,* Semua tim perlu sadar akan penegasan tugas organisasi dan semua manajer yang baik akan membuat penegasan tugas itu sebagai bagian dari budaya organisasi.
3. *Budaya prioritas,* Hendaknya semua anggota tim mengetahui apa yang menjadi prioritas individu di dalam kerja sama ke arah tujuan tim secara utuh.
4. *Sasaran umum.* Harus ada sebuah sasaran umum, sebuah tujuan atau sebuah alasan yang harus diperjuangkan, karena tidak mungkin memotivasi sebuah tim tanpa adanya salah satu dari tiga hal diatas.
5. *Pertahankan energi tinggi.* Orang akan menjadi lebih termotivasi pada saat dia sibuk, akan tetapi hal ini hendaknya tidak diikuti dengan adanya stress dalam pekerjaan.
6. *Ingatlah akan individu.* Sebuah tim adalah sejumlah individu yang saling tergantung dalam keseluruhan hasil prestasinya, meski demikian sebagai individu ia memiliki hak pribadi, misalnya masing-masing individu harus merasa bahwa perlakuan terhadap mereka adalah adil dan pantas, masing-masing individu harus merasa bahwa sumbangan, peran terhadap keberhasilan organisasi diakui, dan lain sebagainya.

²⁴ Richard Denny, *Sukses Memotivasi: Jurus ... Op. Cit.*, 81-87.

7. *Identitas tim*. Hebdaknya seorang pemimpin mampu menciptakan identitas timnya, hal ini akan menimbulkan kebahagiaan dan kebanggaan dari anggota tim.
8. *Sukses harus dinikmati bersama-sama*. Jika tim tersebut memperoleh kesuksesan hendaknya tidak diakui sebagai kesuksesan seorang diantara mereka, misalnya seorang pemimpin, melainkan hasil kerja bersama dan harus dinikmati ataupun dirasakan atau bahkan dirayakan bersama.
9. *Tim yang Positif*. Komunikasi yang terjadi dalam tim sangat mempengaruhi produktifitas organisasi, sehingga jika komunikasi yang terjadi bersifat negatif, maka hal ini dapat merugikan organisasi. Jika individu dalam suatu tim terperangkap dalam saling kritik yang tidak membangun, saling menyalahkan, saling mengeluh dan lain sebagainya, maka seorang pimpinan harus dapat menetralkan atau menjadi mediator, sehingga akan terjadi komunikasi yang positif diantara mereka.
10. *Kepemimpinan yang memotivasi*. Seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi kepada anggota timnya.

Jika tim telah terbentuk dan dikembangkan dengan baik untuk sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam pengembangan organisasi, maka diperlukan adanya suatu tolok ukur yang mencerminkan indikator efektifitas suatu tim. Menurut Adam I. Indrawijaya terdapat Beberapa Indikator yang menunjukkan Efektifitas Suatu Team, yakni:²⁵

²⁵ Adam I. Indrawijaya, *Perubahan dan Pengembangan ...* Op. Cit., 112-114.

1. Rasa saling percaya, tingkat rasa saling percaya dapat diukur dari tingkat kesediaan anggotanya untuk saling berkomunikasi secara terbuka.
2. Adanya keinginan untuk saling membantu, dalam indikator ini terkandung suatu makna bahwa setiap orang selalu ingin menjawab tantangan yang cukup tinggi. Seseorang bersedia menerima suatu tantangan karena ia yakin dapat meminta bantuan rekan sekerjanya bila ia mendapatkan kesulitan.
3. Adanya komunikasi yang terbuka, komunikasi yang terbuka ditandai oleh adanya keterusterangan dalam melakukan komunikasi
4. Adanya tujuan bersama, dalam team semua orang berusaha untuk turut serta menentukan tujuan bersama dan tujuan bersama mereka usahakan diketahui, dimengerti dan dipahami oleh anggota yang lain.
5. Penyelesaian konflik secara terbuka, masing-masing anggota team memahami bahwa dalam suatu kelompok pasti akan timbul konflik dan konflik juga dapat digunakan untuk memajukan organisasi sehingga mereka tidak perlu menyembunyikannya (jika terjadi).
6. Pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang optimal, dalam team yang efektif setiap orang merasa dan yakin bahwa kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama. Sebaliknya setiap orang merasa yakin bahwa ia dapat memanfaatkan potensi rekannya secara optimal pula.

7. Piranti pengawasan dilakukan secara bersama. Masing-masing anggota team merasa ikut bertanggungjawab agar teamnya berjalan dengan semestinya sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan oleh seseorang akan tetapi oleh semua anggota.
8. Adanya iklim organisasi yang bebas dari intrik, terbuka dan sportif. Setiap anggota team mengakui dan menghargai adanya perbedaan yang mereka anggap sebagai suatu kewajiban dan bermanfaat. Implikasinya adalah tidak ada saling memaksakan kehendak diantara anggota dan tercipta suasana kerja yang memungkinkan anggotanya untuk berpikir bebas dan terbuka serta melakukan tindakan yang saling mendukung dan menguntungkan.

D. INDIVIDUAL BUILDING: PERILAKU INOVATIF

Perilaku individu dalam organisasi adalah sikap dan tindakan atau tingkah laku seorang manusia atau individu dalam organisasi sebagai ungkapan dari kepribadian, persepsi dan sikap jiwanya, dimana bisa berpengaruh terhadap prestasi dirinya dan organisasinya.²⁶ Selain seorang pemimpin, agen perubahan dalam organisasi bisa seorang manajer, anggota organisasi maupun konsultan luar. Akan tetapi diantara beberapa agen perubahan tersebut, pemimpin adalah agen perubahan yang utama, karena ia adalah pembuat kebijakan.

Patricia Patton sebagaimana dikutip Johannes Papu menyebutkan bahwa *It took a heart, soul and brains to lead a*

²⁶ Ach. Mohyi, *Teori dan Perilaku ...* Op. Cit., 132.

people.....²⁷ Dalam hal ini berarti seorang pemimpin dalam memimpin hendaknya tidak hanya melibatkan kecerdasan intelektual saja, melainkan juga memakai hati. Pernyataan sangat tepat karena dengan semakin banyak teknologi yang digunakan dalam organisasi terkadang membuat hubungan dalam organisasi berlangsung secara “kaku” dan kurang manusiawi, oleh sebab itu diperlukan pola hubungan yang lebih fleksibel yang pada akhirnya akan tercipta hubungan manusiawi dalam organisasi.

Jika seorang pemimpin telah mampu memposisikan diri sebagai seorang inovator maka ia dapat mengembangkan perilaku anggota organisasi, misalnya untuk pengembangan pribadi anggota dapat dilakukan dengan memberikan motivasi mereka, memberikan *reward*, memberi kesempatan kepada mereka melakukan sesuatu untuk organisasi, dan lain sebagainya yang kesemuanya akan bermuara pada kepercayaan diri, kebanggaan, kebahagiaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan rasa ikut memiliki organisasi. Sedangkan untuk pengembangan pemimpin ia dapat menghasilkan ide-ide, mengkombinasikan ide-ide lama dengan ide-ide baru atau mungkin dapat bertindak sebagai katalisator guna mengembangkan dan menerapkan inovasi-inovasi.²⁸

Dengan berbagai upaya yang dilakukan seorang pemimpin juga hendaknya tidak serta merta merubah apa yang menurut pemikirannya kurang mampu memberikan

²⁷ <http://72.14.203.104/search?q=cache:FndyoH-5wN8J:www.e-psikologi.com/wirusaha/eq>.

²⁸ Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 166-167.

kontribusi kepada organisasi, akan tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang lain, diantaranya faktor komunikasi (baik komunikasi program, proses, monitoring dan evaluating), sosiologis, psikologis dan historis yang melingkupi organisasi sehingga pada saat seorang pemimpin melakukan perubahan tidak akan terjadi gejolak yang besar diantara para anggota organisasi. Intinya seorang pemimpin harus memperhatikan apa yang ada dan terjadi di sekitarnya, memahami tuntutan anggota dan masyarakat disekitarnya, mampu mengkomunikasikan apa yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman diantara pemimpin dan anggotanya yang akan merugikan organisasi.

Stephen P. Robbins mengemukakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan bagi seorang pemimpin dalam memilih suatu pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan tujuan yang dikehendaki, diantaranya adalah:²⁹ *Pertama*, Gunakan persaingan bila tindakan cepat dan tegas itu vital misalnya mengenai isu penting, dimana tindakan tidak populer perlu dilaksanakan; mengenai isu yang vital bagi kesejahteraan bila seorang pemimpin tahu bahwa ia benar; dan melawan orang-orang yang memanfaatkan perilaku tidak kompetitif.

Kedua, Gunakan kolaborasi untuk menemukan pemecahan integratif bila kedua perangkat kepentingan terlalu penting untuk dikompromiskan; bila sasaran anda adalah belajar; menyatukan wawasan-wawasan dari orang-orang

²⁹ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Petrej.: Hadyana Pujaatmaka, (Jakarta: Prenhalindo, 1996), 151-152.

dengan perspektif yang berlainan; untuk memperoleh komitmen dengan memasukkan kepentingan kedalam suatu konsensus; dan untuk bekerja lewat perasaan yang telah mengganggu hubungan. *Ketiga*, Gunakan penghindaran bila ada isu yang sepele, atau ada isu yang lebih penting yang mendesak bila anda mempersepsikan tidak adanya peluang bagi terpauaskannya kepentingan anda; bila gangguan potensial lebih dari mengimbangi manfaat suatu pemecahan; membiarkan orang-orang mendingin dan memperoleh kembali perspektif; bila pengumpulan informasi menggantikan keputusan yang segera; bila orang-orang lain dapat memecahkan konflik dengan lebih efektif; dan bila isu tampak menyinggung atau bersifat gejala dari isu-isu lain.

Keempat, Gunakan akomodasi bila anda dapati anda keliru dan untuk memungkinkan pendirian yang lebih baik didengar, untuk belajar, dan untuk menunjukkan kewajaran; bila isu lebih penting bagi orang lain daripada bagi anda saendiri dan untuk memuaskan orang lain serta memelihara kerjasama; untuk membina kredit sosial untuk isu-isu kelak; untuk meminimalkan kerugian bila anda dikalahkan dan kalah; bila keserasian dan kemantapan teristimewa penting; dan untuk memungkinkan bawahan berkembang dari kekeliruan.

Kelima, Gunakan kompromis bila tujuan penting, tetapi tidak layak mendapatkan upaya pendekatan-pendekatan yang lebih tegas yang disertai kemungkinan gangguan; bila lawan dengan kekuasaan yang sama berkomitmen terhadap

tujuan-tujuan yang secara timbal balik eksklusif (terhadap tujuan kita); untuk mencapai penyelesaian sementara terhadap isu yang rumit; untuk sampai pada pemecahan yang bijaksana karena tekanan waktu dan sebagai suatu cadangan bila kolaborasi atau persaingan tidak berhasil. Perundingan ditunjukkan sebagai kegiatan yang terus menerus dalam kelompok dan organisasi.

E. THE SPIRITUAL LEADERSHIP

Seringkali meski telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektifitas organisasi dan efisiensi kinerja, namun yang terjadi adalah efektifitas kerja diperoleh, akan tetapi hubungan yang terjadi dalam organisasi kurang harmonis. Akibatnya para anggota organisasi merasa hanya dijadikan obyek dan terus dieksploitasi untuk kepentingan organisasi.

Dalam pengembangan organisasi salah satu hal yang ingin diupayakan adalah melakukan hubungan organisasi yang berdasarkan pada asas "memanusiakan manusia". Jika dalam OD manusia diposisikan sebagai obyek sekaligus subyek perubahan, maka harus pula diperhatikan segala potensi yang dimilikinya. Dalam diri manusia terdapat tiga jenis kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual (*Intellectual Quotient*, IQ), kecerdasan emosional (*Emotional Quotient* EQ) dan kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient* SQ).

Kata intelektual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan atau mempunyai kecerdasan tinggi atau totalitas pengertian atau kesadaran, terutama

yang menyangkut tentang pemikiran dan pemahaman.³⁰ Sedangkan menurut J.P Chaplin *Intelegence* (Inteligensi) adalah kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan afektif atau kemampuan menggunakan konsep abstrak secara afektif atau kemampuan memahami pertalian dan belajar dengan cepat sekali.³¹

Abdul Rahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab berpendapat bahwa kecerdasan atau inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan cara tertentu atau kemampuan yang bersifat umum tersebut meliputi berbagai jenis psikis seperti abstrak, berpikir, mekanis, matematis, memahami, mengingat bahasa, dan lain-lain.³²

Dalam pengertian yang lebih luas William Stern, yang dikutip oleh Crow and Crow mengemukakan bahwa Inteligensi berarti kapasitas umum dari seorang individu yang dapat dilihat pada kesanggupan pikirannya dalam mengatasi kebutuhan-kebutuhan baru, keadaan ruhaniah secara umum yang dapat disesuaikan dengan problema-problema dan kondisi-kondisi yang baru didalam kehidupan.³³

³⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 437.

³¹ J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Peterj.: Kartini Kartono, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 253.

³² Abdul Rahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 179.

³³ Lester D. Crow dan Alice Crow, *Psikologi Pendidikan*, Peterj.: Z. Kasijan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 205.

Dengan IQ yang dimiliki oleh anggota organisasi, maka ia akan memiliki kemampuan untuk melakukan kerja atau memberikan kontribusi dalam organisasi dengan rasionalitas atau pemikiran mereka misalnya dengan kemampuan mekanis mereka dapat bekerja dengan efisien, dengan kemampuan bahasa mereka dapat berkomunikasi dengan efektif sehingga tidak terjadi kesalah pahaman, dan lain sebagainya. Poensi-potensi ini juga harus mendapat perhatian dari seorang pemimpin organisasi.

Semenjak dipublikasikannya buku *Emotional Intelligence* oleh Daniel Goleman tahun 1995 banyak masyarakat yang terpengaruh dengan pendapat Goleman tersebut.³⁴ Salovey dan Mayer menggunakan istilah kecerdasan emosi untuk menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain.³⁵ Ciri utama pikiran emosional adalah respon yang cepat tetapi ceroboh, mendahulukan perasaan daripada pemikiran, realitas simbolik yang seperti kanak-kanak, masa lampau diposisikan sebagai masa sekarang, dan realitas yang ditentukan oleh keadaan,³⁶ yang kemudian lebih dikenal dengan insting. Menurut Mc. Dougall sebagaimana dikutip

³⁴ Monty P. Satiadarma dan Fedelis E. Waruwu, *Mendidik Kecerdasan: Pedoman Bagi Orang Tua dan Guru Dalam Mendidik Anak Cerdas*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 24.

³⁵ Aprilia Fajar Pertiwi, dkk, *Mengembangkan Kecerdasan Emosi*, (Jakarta: Yayasan Aspirasi Pemuda, 1997), 16.

³⁶ Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*, Peterj.: Hermaya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 411.

oleh Ali Abdul 'Adzim bahwa insting merupakan potensi fikir yang mendorong seseorang bergerak dan bertindak laku jika menghadapi sikap dan situasi tertentu pula.³⁷

Dari beberapa uraian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa Kecerdasan emosional (EQ) adalah sejumlah kemampuan mengenali emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional dibutuhkan oleh semua orang agar dapat hidup bermasyarakat termasuk didalamnya menjaga keutuhan hubungan sosial, hubungan sosial yang baik akan mampu menuntun seseorang untuk memperoleh sukses di dalam hidup seperti yang diharapkan. Kecerdasan emosional bukan hanya sekedar kemampuan untuk mengendalikan emosi dalam kaitannya dengan hubungan sosial tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan psikofisik, misalnya tentang gaya hidup.

Jika IQ bersandar pada nalar atau rasio, Intelektual dan EQ bersandar pada kecerdasan emosi dengan memberikan kesadaran atas emosi-emosi kita dan emosi-emosi orang lain, maka SQ berpusat pada ruang spiritual (*Spiritual Space*) yang memberi kemampuan pada kita untuk memecahkan masalah dalam konteks nilai penuh makna, sehingga SQ merupakan landasan yang sangat penting sehingga IQ dan EQ dapat berfungsi secara efektif.

³⁷ Ali Abdul Adzim, *Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Perspektif Al Qur'an*, Petrej.: Kalilullah Ahmad Masykur Hakim, (Bandung: CV. Rosda, 2000), 134.

SQ adalah kesadaran dalam diri kita yang membuat kita menemukan dan mengembangkan bakat-bakat bawaan, intuisi, otoritas batin, kemampuan memberadakan yang salah dan benar serta kebijaksanaan.³⁸ SQ adalah inti dari kesadaran manusia. Dengan SQ manusia mampu menyadari siapa diri mereka sesungguhnya dan bagaimana kita memberi makna terhadap hidup manusia dan seluruh dunia manusia.

Untuk memperoleh ketenangan dan kedamaian manusia membutuhkan kecerdasan yang lain yang tertuju pada apa yang disebut oleh Ary Ginanjar dengan *God Spot* atau spiritual center secara transendental.³⁹ Menurut Zohar dan Marshal sebagaimana dikutip oleh Tobroni⁴⁰, SQ merupakan pondasi yang diperlukan bagi keefektifan dua kecerdasan yang lain,” *SQ is the necessary foundation for the functioning of both IQ and EQ.it is our ultimate intelligence*”.

Seorang pemimpin merupakan agen perubahan yang terpenting, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan individu seorang pemimpin diantaranya adalah dengan menerapkan Kepemimpinan Spiritual (*The Spiritual Leadership*). Kepemimpinan spiritual bisa diartikan sebagai kepemimpinan yang sangat menjaga nilai-nilai

³⁸ Monty P. Satiadarma dan Fedelis E. Waruwu, *Mendidik Kecerdasan: Pedoman ... Op. Cit.*, 45.

³⁹ Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ (Emotional Spiritual Quotient) berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, (Jakarta: Arga, 2001), xxxix.

⁴⁰ Tobroni, *The Spiritual Leadership: Pengefektifan Organisasi Noble Industry Melalui Prinsip-Prinsip Spiritual Etis*, (Malang: UMM Press, 2005), 21.

etis dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Mereka melakukan pekerjaan dengan cara memuaskan hati lewat pemberdayaan, memulihkan dan menguntungkan siapa saja yang berhubungan dengannya. Mereka tidak hanya mampu memberikan keuntungan finansial saja, tetapi juga hati dan jiwa mereka dalam bekerja. Mereka terlibat sepenuhnya (*involve*) dalam aktifitas organisasi yang dipimpinnya sebagai bentuk komitmennya yang paling dalam yaitu komitmen spiritualitas. Menurut Percy sebagaimana dikutip oleh Tobroni dalam hal ini mengatakan bahwa:⁴¹

“Dan ketika anda bermukim di rumah spiritualitas, tidak ada lagi jurang menganga dan daerah perbatasan antara keyakinan dan tindakan. Jurang itu diisi dengan esensi dan selaku manusia yang utuh. Anda dan obyek komitmen anda telah menyatu sempurna”.

Dalam memimpin sebuah organisasi, seorang pemimpin tidak dapat hanya dengan mengandalkan atau memperhatikan satu aspek dari ketiga macam potensi yang ia miliki dan yang dimiliki oleh anggota organisasi yang lain. Hal ini menimbulkan munculnya perilaku yang baik dan akan mampu memotivasi anggota organisasi kearah yang efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sedangkan Tobroni mengemukakan karakteristik kepemimpinan spiritual yang berbasis etika religius diantaranya adalah Kejujuran sejati, *fairness* pengenalan diri sendiri, fokus pada amal sholeh, spiritulisme yang tidak dogmatis, bekerja lebih efisien, membangkitkan yang terbaik dalam diri

⁴¹ *Ibid.*

sendiridan orang lain keterbukaan menerima perubahan, visionar tetapi fokus pada persoalan didepan mata, *doing the right thing*, disiplin tetapi tetap fleksibel, santai dan cerdas, dan kerendahan hati.⁴²

Pendekatan kepemimpinan spiritual ini sebenarnya merupakan implikasi dari kepemimpinan dalam Islam. Artinya Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala urusan ummatnya, telah memberikan aturan yang jelas dalam sumber ajarannya yakni Al Qur'an. Dalam Al Qur'an dikemukakan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebagaimana diungkapkan. Senada dengan hal tersebut Jawahir Tanthowi⁴³ mengemukakan beberapa karakteristik pemimpin yakni:

1. Berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif, peka lapang dada dan selalu tanggap.(QS.Al Mujadalah:11)
2. Bertindak adil,jujur dan konsekwen.(QS Annisa':58)
3. Bertanggung jawab.(QS Al An'am:164)
4. Selektif terhadap informasi.(QS Al hujarat:6)
5. Memberikan peringatan.(QS Az Zariat:55)
6. Memberikan petunjuk dan pengarahan.(QS As Saja-dah:24)

Secara lebih rinci sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut Ali Muhammad Taufiq⁴⁴, di antaranya adalah: memiliki pengetahuan dan kemampuan yang

⁴² *Ibid.*, 26.

⁴³ Jawahir Tanthowi, *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), 60-63.

⁴⁴ Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen Berbasis ...* Op. Cit., 37-41.

cukup untuk mengendalikan organisasinya (QS. Al Mulk: 1), Mempunyai keistimewaan yang lebih dibanding dengan orang lain (QS. Al Baqarah: 247), Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. (QS. Ibrahim: 4), Mempunyai kharisma dan wibawa dihadapan manusia (QS. Huud: 91), konsekwen dengan kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu (QS. Ash Shaad: 26), bermu'amalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap yang dipimpinnya, agar orang yang dipimpin simpatik kepadanya (Ali Imran: 159), menyukai suasana saling memaafkan antara pemimpin dan pengikutnya, serta membantu mereka agar terlepas dari kesalahan (QS. Ali Imran: 159), Bermusyawarah dengan para pengikutnya serta meminta pendapat dan pengalaman mereka (QS. Ali Imran: 159), Menertibkan semua urusan dan membulatkan tekad kemudian bertawakkal (menyerahkan urusan kepada Allah) (Ali Imran: 159), Membangun kesadaran akan adanya *muraqabah* (pengawasan dari Allah) sehingga terbina sikap ikhlas dimanapun, walaupun tidak ada yang mengawasinya kecuali Allah (QS. Al Hajj: 41), Memberikan *Takaful Ijtima'i* (Santunan Sosial) kepada para anggota, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang menimbulkan rasa dengki dan perbedaan strata sosial yang dapat merugikan organisasi (QS. Al Hajj: 41), Mempunyai pengaruh (*power*) yang dapat memerintah dan mencegah anggotanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (QS. Al Hajj: 41), Tidak membuat kerusakan di bumi, tidak merusak hubungan sosial (QS. Al Baqarah: 205), bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, sekalipun nasihat itu berasal dari bawahannya (QS. Al Baqarah: 206).

Berikut disampaikan Perbandingan antara kepemimpinan spiritual dengan model kepemimpinan yang lain menurut Tobroni yakni:⁴⁵

Uraian	Kepemimpinan Transaksional	Kepemimpinan Transformasional	Kepemimpinan Spiritual
Hakekat kepemimpinan	Fasilitas, kepercayaan manusia (bawahan)	Amanat dari sesama manusia	Ujian, amanat dari Tuhan dan manusia
Fungsi kepemimpinan	Untuk membesarkan diri dan kelompoknya atas biaya orang lain melalui kekuasaannya	Untuk memberdayakan pengikut dengan kekuasaan keahlian dan keteladanan	Untuk memberdayakan dan mencerahkan iman dan hati nurani pengikutnya melalui jihad (pengorbanan) dan amal shaleh (altruistik)
Etos kepemimpinan	Mendedikasikan usahanya kepada manusia untuk memperoleh imbalan / posisi yang lebih	Mendedikasikan usahanya kepada sesama untuk kehidupan bersama yang lebih baik	Mendedikasikan usahanya kepada Allah dan sesama manusia (ibadah) tanpa pamrih apapun
Sasaran tindakan kepemimpinan	Pikiran dan tindakan yang kasat mata	Pikiran dan hati nurani	Spiritualitas dan hati nurani
Pendekatan kepemimpinan	Posisi dan kekuasaan	Kekuasaan, keahlian dan keteladanan	Hati nurani dan keteladanan
Dalam mempengaruhi yang dipimpin	Kekuasaan, perintah, uang, sistem, mengembangkan interest, transaksional	Kekuasaan, keahlian dan kekuasaan referensi	Keteladanan, mengilhami, membangkitkan, memberdayakan, memanusiakan

⁴⁵ Tobroni, *The Spiritual Leadership ...* Op. Cit., 41.

Cara mempengaruhi	Menaklukkan jiwa dan membangun kewibawaan melalui kekuasaan	Memenangkan jiwa dan membangun kharisma	Memenangkan jiwa, membangkitkan iman
Target kepemimpinan	Membangun jaringan kekuasaan	Membangun kebersamaan	Membangun kasih, menebar kebajikan dan penyalur rahmat Tuhan.

Dalam aplikasinya kepemimpinan spiritual ini akan memunculkan beberapa perilaku yang berbeda dengan kepemimpinan yang lain karena kepemimpinan dalam hal ini bukan hanya dipandang sebagai urusan terkait dengan sesama manusia melainkan juga terkait dengan urusan dengan Tuhan. Menurut analisa Tobroni⁴⁶ dalam kepemimpinan spiritual akan tampak beberapa sikap etis yakni:

1. Sikap etis religius manusia kepada Tuhan, yakni *Iman, Islam, taqwa, Iklash, Tawakkal, Syukr, Shabar, Taubat, Dzikir*.
2. Sikap etis religius yang terkait dengan sesama manusia dapat dibedakan menjadi dua, yakni etika religius yang terkait dengan sifat-sifat pribadi misalnya *Shidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *Fathonah* (cerdas dan cekatan), *kholifah*, *mujtahid* dan *mujahid*, *istiqomah*, *Iffah* (menjaga kehormatan), *Sahiyun* (dermawan), *Adl* (adil) serta etika religius terkait dengan sikap terhadap sesama manusia yakni *Silaturrahmi*, *Ukhuwah* (persaudaraan), *Musawah* (egalitarian), *tawadlu'* (rendah hati), *Husnudzon* (berprasangka baik).

⁴⁶ Tobroni, *The Spiritual Leadership ...* Loc. Cit., 64-106.

3. Sikap Etis religius yang berkenaan dengan aktivitas berkarya dan kepemimpinan, yakni: *Tabligh*, *Ruhul Jihad*, bekerja sebagai ibadah dan *ahsanu a'mala* (bebuat yang terbaik), *Musyarakah* (membentuk tim) dan *ta'awun* (kerjasama), *Al wafa* (menepati janji).

Dari beberapa uraian diatas tidak berlebihan jika Tobroni menyebut kepemimpinan spiritual sebagai puncak kepemimpinan karena dalam kepemimpinan spiritual seorang memimpin dengan menggunakan seluruh potensi kecerdasan, memimpin dengan ruh, memimpin dengan hati, memimpin dengan tangan dan professional.⁴⁷

F. KESIMPULAN

Dari paparan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu organisasi akan senantiasa mengalami dinamika dan perubahan. Perubahan itu dapat terjadi karena adanya faktor pendorong baik yang berasal dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Saat ini, agar suatu organisasi mampu bertahan tidak cukup hanya mengandalkan kharisma seorang pemimpin, maka diperlukan pula kecerdasan dari seorang pemimpin untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi disekitarnya serta melakukan berbagai macam inovasi, baik itu melalui *Organizational Development* (OD), *Team Building* maupun Pengembangan Individu untuk membentuk perilaku *innovative*.

Karena dalam diri manusia terdapat tiga jenis kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual (*intellectual quotient*,

⁴⁷ *Ibid.*, 106.

IQ), kecerdasan emosional (*emotional quotient, EQ*) dan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient, SQ*), maka Selain dari berbagai upaya tersebut terdapat satu model kepemimpinan yang perlu mendapat tanggapan dari seorang pemimpin yakni model kepemimpinan spiritual.

Dalam melakukan perubahan dan pengembangan organisasi hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang lain, diantaranya faktor komunikasi baik tentang program, proses maupun monitoring dan evaluasi), sosiologis, psikologis dan historis yang melingkupi organisasi sehingga pada saat seorang pemimpin melakukan perubahan tidak akan terjadi gejolak yang besar diantara para anggota organisasi. []



Bagian 5

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI ATAS PLATFORM BUDAYA ORGANISASI:

Membangun Madrasah Aliyah Berprestasi

Adanya sebuah gagasan yang memandang bahwa organisasi sebagai suatu budaya -di mana suatu sistem dari makna yang di anut bersama di kalangan para anggotanya- merupakan fenomena yang relati baru. Pemahaman umum yang selama ini berkembang, bahwa organisasi didefinisikan sebagai suatu alat yang rasional untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan sekelompok orang. Didalamnya ada tingkat jabatan, hubungan, wewenang dan seterusnya. Namun organisasi sebenarnya lebih dari itu. Organisasi juga mempunyai kepribadian, sama seperti individu manusia; bisa tegar atau fleksibel, tidak ramah atau mendukung, inovatif dan konservatif.

Para teoritis organisasi akhir-akhir ini, telah mulai mengakui hal ini dengan menyadari pentingnya peran yang dimainkan budaya tersebut dalam kehidupan anggota-anggota organisasi. Meskipun demikian, menarik bahwa asal usul budaya sebagai suatu variabel independen yang mempengaruhi sikap dan perilaku seorang anggota dapat dirunut baik sejak adanya ide pelebagaan. Bila suatu organisasi menjadi lembaga, organisasi itu memiliki kehidupannya sendiri, terlepas pendiriannya ataupun siapapun anggotanya. Fenomena ini bisa dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi di lembaga pendidikan Islam, salah satu contohnya yang terjadi lembaga pendidikan Islam tinggi yaitu bentuk perubahan status yang dialami UIN Malang misalnya, mulai dari IAIN di bawah IAIN Sunan Ampel Surabaya, STAIN, UIIS dan sekarang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pasti ada tradisi-tradisi lama yang tetap dipertahankan.¹ Atau budaya organisasi yang terbentuk di lembaga pendidikan yang setaraf dengan organisasi maju seperti di Madrasah berprestasi yaitu Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang.

Oleh sebab itu, secara praktis, didalam pemahaman tentang budaya adalah dengan adanya suatu kandungan utama yang berkaitan erat antara lain:

1. Budaya berkaitan erat dengan persepsi terhadap nilai dan lingkungannya yang melahirkan makna dan pandangan

¹ Meskipun status lembaga terus mengalami perubahan, namun terdapat berbagai budaya yang terus dipelihara antara lain: jiwa kekeluargaan, pikiran khuznudzan (*positif thinking*) dan keterbukaan. Slamet Raharjo, *Memadu Sains dan Agama Menuju Universitas Islam Masa Depan*, (Kerja sama UIN Malang dengan Bayumedia, 2004), 269.

hidup, yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku.

2. Adanya pola nilai, sikap tingkah laku (termasuk bahasa), hasil karsa dan karya, termasuk segala instrumennya, sistem kerja, teknologi.
3. Budaya merupakan dari pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan serta proses seleksi (menerima atau menolak) norma-norma yang ada dalam cara dirinya berinteraksi sosial atau menempatkan dirinya ditengah-tengah lingkungan tertentu.
4. Dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi dan saling ketergantungan (interdependensi), baik sosial maupun lingkungan non sosial.

Namun, pada ranah ini yang sangat mempengaruhi adalah nilai dan norma aktivitas bekerja yang ada dalam organisasi. Pelembagaan bekerja untuk menghasilkan pemahaman bersama di kalangan anggota mengenai perilaku apa yang tepat dan bermakna. Jadi, bila sebuah organisasi meneruskan keabadian lembaganya, model perilaku yang dapat diterima menjadi sangat jelas dengan sendirinya bagi anggotanya. Ini sebenarnya hal yang sama yang dilakukan kultur organisasi. Dengan demikian, memahami apa yang dimaksud dengan budaya organisasi, bagaimana tipologinya, apa saja fungsinya dan bagaimana budaya organisasi diciptakan dan dipertahankan, akan meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan meramal perilaku dari bawahan pada satu pekerjaan yang professional.²

² Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi Konsep Kontroversi Aplikasi*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1996), 288-289.

A. PENGERTIAN BUDAYA ORGANISASI

Keberadaan budaya di dalam suatu organisasi disebut dengan budaya organisasi tidak bisa dilihat oleh mata namun dapat dirasakan. Budaya organisasi itu bisa dilakukannya keberadaannya melalui perilaku anggota/karyawan di dalam organisasi itu sendiri. Kebudayaan tersebut memberikan pola cara berfikir, merasa, menanggapi, dan menuntun para anggota organisasi dalam mengambil keputusan maupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam organisasi. Oleh karena itu budaya organisasi akan berpengaruh juga terhadap keefektifan organisasi.

Budaya organisasi memiliki banyak definisi di antaranya adalah: nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, falsafah yang menentukan kebijakan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan, cara kerja yang dilakukan ditempat itu, asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, budaya (*culture*) diartikan sebagai: pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah.³ Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi (*tradition*). Dalam hal ini tradisi diartikan sebagai idea-idea umum, sikap dan kebiasaan dari masyarakat yang nampak dalam perilaku sehari-hari yang menjadi kebiasaan dari kelompok dalam masyarakat tertentu.⁴

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1991), 149.

⁴ Soekarto Indrafachrudi, *Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orang*

Budaya organisasi mengacu pada sekumpulan keyakinan bersama, sikap dan tata hubungan serta asumsi-asumsi yang secara eksplisit atau implisit diterima dan digunakan oleh keseluruhan anggota organisasi untuk menghadapi lingkungan luar dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, budaya organisasi mempunyai pengaruh penting terhadap motivasi.⁵

Tampaknya ada suatu kesepakatan yang luas, bahwa budaya organisasi yang sebagian menyebut juga tradisi organisasi mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi yang lain. Sistem makna bersama ini, jika diamati dengan lebih seksama, merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai bahkan dicita-citakan oleh organisasi itu. Riset terbaru mengemukakan tujuh karakteristik primer berikut yang mencerminkan hakikat budaya suatu organisasi.

1. *Inovasi dan pengambilan resiko.* Sejauh mana para anggota (civitas) didorong untuk inovatif dan mengambil resiko
2. *Perhatian ke rincian.* Sejauh mana para anggota (civitas) diharapkan memperlihatkan presisi (kecermatan), analisis dan perhatian kepada rincian dalam kerjanya.
3. *Orientasi hasil.* Sejauh mana manajemen menfokuskan pada hasil, bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu.

Tua Murid dan Masyarakat, (Malang: IKIP Malang, 1994), 20.

⁵ Anthony-Darden-Bedford, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1992), 67.

4. *Orientasi orang*. Sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu.
5. *Orientasi tim*. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim, bukannya individu-individu.
6. *Keagresifan*. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif dan bukannya santai-santai.
7. *Kemantapan*. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan diperhatikannya status quo kontras dari pertumbuhan.⁶

Tiap karakteristik ini berlangsung pada kontinum dari rendah ke tinggi. Maka, dengan menilai organisasi itu berdasarkan tujuh karakteristik ini, akan diperoleh gambaran majemuk dari budaya organisasi itu sendiri. Gambaran ini menjadi dasar untuk pemahaman bersama yang dimiliki para anggota mengenai organisasi itu, bagaimana urusan diselesaikan di dalamnya, dan perilaku apa yang seharusnya dilakukan oleh para anggotanya.⁷ Maka pada ranah ini bisa dikatakan bahwa budaya organisasi merupakan persepsi umum yang diyakini oleh para anggota organisasi. Hal ini bersifat eksplisit ketika didefinisikan budaya sebagai sistem mengenai pengertian yang diterima *secara bersama-sama* (seragam). Setiap individu dengan berbagai latar belakang atau yang berada dalam tingkatan yang berbeda dalam organisasi cenderung untuk menjelaskan bahwa budaya organisasi dalam pengertiannya adalah suatu perilaku yang sama (seragam) dalam suatu organisasi.

⁶ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi Konsep ...* Op. Cit., 289.

⁷ Taliziduh Ndraha, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 4.

Budaya organisasi (*organizational culture*) jika diaplikasikan pada lingkungan manajemen organisasi, lahirlah konsep budaya manajemen (BM). Lebih spesifik lagi, jika BO diaplikasikan pada lingkungan manajemen organisasi madrasah, maka lahirlah konsep budaya manajemen (BM) madrasah.

B. TIPOLOGI BUDAYA

Jefferey Sonnenfeld dari Universitas Emory, telah mengembangkan suatu bagan label yang dapat membantu kita melihat perbedaan antara budaya-budaya dengan organisasi dan manfaatnya mempelajari tingkah laku orang-orang pada budaya itu secara tepat. Dari telaah organisasinya, ia telah mengenali empat tipe budaya berdasarkan bentuknya, yaitu akademi, kelab, tim bisbol dan benteng.

1. *Akademi*, bentuk organisasi sebagai suatu tempat untuk proses yang ajeg (*steady*) yang ingin menguasai benar-benar tiap pekerjaan yang baru diterimanya. Organisasi ini memberikan anggotanya banyak pelatihan istemewa, memadukan dengan seksama dalam tim kerja, memudahkan mereka melewati ribuan pekerjaan terkhusus di dalam suatu fungsi tertentu. budaya ini dikembangkan terutama pada organisasi-organisasi profesional seperti Honda, IBM atau Microsoft Corporation.
2. *Kelab*, bentuk organisasi yang menaruh bingkai tinggi pada kecocokan dalam sistem, kesetiaan dan pada komitmen. Senioritas merupakan kunci dari kelab-kelab. Usia dan pengalaman diperhitungkan. Perbedaannya dengan akademi, kelab menumbuhkan manajer sebagai

generalis. Lembaga Pendidikan Islam (LPI) lebih banyak mengembangkan tipe kelab ini.

3. *Tim bisbol*, organisasi ini berorientasi pada terjalannya kerja sama bagi para pengambil resiko dan innovator. Tim bisbol mencari orang-orang yang berbakat dari segala usia dan pengalaman, kemudian menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan, karena mereka menawarkan insentif substansial yang sangat besar bagi mereka yang sangat berprestasi, loncatan pekerjaan di antara organisasi-organisasi ini merupakan makanan biasa. Organisasi yang cocok dengan gambaran tujuan stabil ini biasa didapat dalam bidang akuntansi, hukum, penarikan investasi dan konsultasi. Inilah yang menjadi pembangkit motivasi dalam Lembaga Pendidikan Islam (LPI), misalnya melalui pengiriman studi ke luar negeri bagi siswa atau guru yang berprestasi, menaikkan jabatan bagi civitas yang berprestasi dan sebagainya.
4. *Benteng*, sementara tim bisbol menghargai keinsentifan, benteng sibuk dengan upaya bertahan hidup (*survival*). Banyak yang dulunya akademi, kelab atau tim bisbol, tetapi terperosok ke dalam masa-masa sulit dan sekarang berupaya mengembalikan nasibnya yang merosot. Benteng tidak banyak menawarkan keamanan pekerjaan, namun organisasi semacam ini menjadi tempat yang mengasyikkan bagi mereka yang *pro status quo*.⁸

Sonnenfeld menemukan bahwa banyak organisasi tidak dapat dikategorikan dalam salah satu dari kategori di atas

⁸ Stephen P. Robbins *Perilaku Organisasi Konsep ...* Op. Cit., 290-291.

karena biasanya satu organisasi memiliki paduan budaya dan tidak diskrit. Biasanya organisasi seperti ini berada dalam masa transisi, seperti yang sedang dialami oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang atau di Perguruan Tinggi Islam sendiri yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, budaya organisasi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Budaya kuat.* Dalam suatu budaya kuat, nilai inti organisasi itu dipegang secara intensif dan dianut bersama secara meluas. Makin banyak anggota yang menerima nilai-nilai dan makin besar komitmen mereka pada nilai-nilai itu, makin kuat budaya tersebut. Konsisten dengan definisi ini, suatu budaya kuat akan mempunyai pengaruh yang besar pula pada perilaku anggota-anggotanya karena tingginya tingkat kebersamaan (*sharedness*) dan intensitas menciptakan suatu iklim internal dari kendali perilaku yang tinggi.
2. *Budaya lemah.* Kebalikan budaya kuat, dalam budaya lemah, tingkat konsistensi anggotanya tidak lagi kuat dan jangkauan budaya yang telah disepakati tidak lagi luas mencakup seluruh anggota-anggotanya. Dalam kondisi ini mudah diramalkan (*predictability*), bahwa tujuan yang hendak dicapai melalui tradisi yang telah disepakati akan sulit terwujud.⁹

⁹ *Ibid.*

C. BUDAYA ORGANISASI

Jika ada program pemerintah yang mengalami hambatan biasanya yang dijadikan kambing hitam adalah budaya. Dikatakan nilai-nilai yang menjadi muatan program belum membudaya. Atau budaya masyarakat yang ada dianggap sulit berubah. Jika ada nilai baru yang penerapannya memerlukan perubahan dan perubahan itu oleh penguasa dianggap dapat merugikan kepentingannya, maka yang dijadikan dasar penolakan terhadap nilai itu adalah budaya, dan lain sebagainya.¹⁰ Demikian halnya, dalam suatu lembaga pendidikan, banyak program yang kurang terlaksana dengan baik karena belum adanya budaya yang kondusif. Cita-cita lembaga pendidikan untuk mewujudkan civitasnya sebagai masyarakat pembaca (*learning society*) kurang berhasil karena belum adanya budaya gemar membaca di kalangan civitasnya.

Dengan demikian, pemahaman tentang budaya organisasi sesungguhnya tidak lepas dari konsep dasar tentang budaya itu sendiri, yang merupakan salah satu terminologi yang banyak digunakan dalam bidang antropologi. Dewasa ini, dalam pandangan antropologi sendiri, konsep budaya ternyata telah mengalami pergeseran makna. Sebagaimana dinyatakan oleh C.A. Van Peursen (1984) bahwa dulu orang berpendapat budaya meliputi segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan yang bersifat rohani, seperti: agama, kesenian, filsafat, ilmu pengetahuan, tata negara dan sebagainya. Tetapi pendapat tersebut sudah

¹⁰ *Ibid.*, 42.

sejak lama disingkirkan. Dewasa ini budaya diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang-orang. Kini budaya dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan sesuatu yang kaku dan statis. Budaya tidak tidak diartikan sebagai sebuah kata benda, kini lebih dimaknai sebagai sebuah kata kerja yang dihubungkan dengan kegiatan manusia.

Riset mengenai budaya organisasi telah berupaya mengukur bagaimana anggota (*civitas*) memandang organisasinya, "apakah organisasi itu mendorong terwujudnya kerja tim?, apakah organisasi ini menimbulkan komitmen?, apakah organisasi ini melimpahkan prakarsa?, dan sebagainya". Pada kerangka ini dapat ditemui suatu bentuk kesepakatan dalam organisasi itu sendiri. Artinya, dalam budaya organisasi ditandai adanya *sharing* atau berbagi nilai dan keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi. Misalnya berbagi nilai dan keyakinan yang sama melalui pakaian seragam. Namun menerima dan memakai seragam saja tidaklah cukup. Pemakaian seragam haruslah membawa rasa bangga, menjadi alat kontrol dan membentuk citra organisasi. Dengan demikian, nilai pakaian seragam tertanam menjadi *basic*.

Setidaknya, riset yang dilakukan oleh Stephen dapat menjelaskan berbagai persoalan seperti yang telah dideskripsikan tersebut. Menurutnya, budaya organisasi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Budaya mempunyai suatu peran menempatkan tapal batas; artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan jangkauannya.
2. Budaya membawa satu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.
3. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas dari pada kepentingan-kepentingan dari individual seseorang.
4. Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para anggota.
5. Akhirnya budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memadu dan membentuk sikap serta perilaku anggotanya.¹¹

Namun kita tidak boleh mengabaikan aspek budaya yang secara potensial bersifat dwifungsional, dalam artian disamping memiliki fungsi positif, kadang suatu budaya yang telah mengakar kuat menimbulkan efek yang negatif. Artinya adalah budaya organisasi memiliki efek ganda pada tataran internalitas organisasi itu sendiri, antara lain:

1. Penghalang Terhadap Suatu Perubahan

Budaya terasa sebagai suatu beban, bilamana nilai-nilai yang ada tidak lagi cocok dengan nilai-nilai yang akan meningkatkan keefektifan suatu organisasi itu. Ini paling

¹¹ *Ibid.*, 290-291.

mungkin terjadi bila lingkungan organisasi kita dinamis, bila bangunan itu mengalami perubahan yang cepat, budaya yang telah berakar dari organisasi itu mungkin tidak lagi tepat.

2. Penghalang Terhadap Keanekaragaman

Budaya yang kuat menyebabkan tekanan yang cukup besar pada para anggota untuk menyesuaikan diri (*conform*). Mereka membatasi rentang nilai dan tatanan yang dapat diterima. Padahal organisasi-organisasi memperlihatkan individu yang beraneka ragam, karena kekuatan alternative yang dibawa mereka ke tempat kerja. Oleh karena itu, budaya yang kuat dapat merupakan beban (*liabilitas*) bila budaya itu dengan efektif menyingkirkan berbagai kekuatan unik tersebut.

3. Penghalang Terhadap Afiliasi

Budaya yang kuat akan menjadi karakteristik suatu organisasi. Bila tidak terdapat kecocokan (kompatibilitas) antar organisasi suatu dengan yang lainnya, maka biasanya sulit untuk mengadakan kerja sama.¹²

Akan tetapi, dalam realitanya lingkungan organisasi tidak pernah stabil, melainkan selalu berubah, sehingga budaya yang dianggap cocok pada kurun waktu tertentu, mungkin tidak akan cocok di waktu yang lain. Implikasinya budaya organisasi harus selalu mengadaptasikan dirinya dengan tuntutan perubahan dari lingkungan. Karena itulah, Kotter dan Heskett mengajukan tipe budaya adaptif dan tidak adaptif.

¹² *Ibid.*, 295-296.

Budaya yang adaptif dan tidak adaptif. Kotter dan Heskett (1992:33) menjelaskan bahwa hanya budaya yang dapat membantu organisasi mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan (adaptif), yang diasosiasikan dengan kinerja tinggi dalam periode waktu yang panjang. Teori ini mengarahkan budaya organisasi untuk senantiasa bersikap adaptif dan inovatif sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Makna terpenting dari hasil penelitian pada teori ketiga ini adalah bahwa perusahaan yang budayanya adaptif secara ideal para manajer pada seluruh tingkatan organisasinya menampakkan kepemimpinan yang memelopori perubahan dalam strategi dan taktik kapan saja diperlukan untuk memuaskan kepentingan para pemegang saham, pelanggan, dan para pegawainya. Sedangkan perusahaan yang budayanya tidak adaptif para manajer pada seluruh tingkatan organisasinya cenderung berperilaku secara hati-hati dan politis untuk melindungi atau memajukan diri sendiri, produknya, atau kelompoknya. Perbedaan budaya adaptif dan tidak adaptif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Budaya Organisasi yang Adaptif dan Tidak Adaptif¹³

	Budaya Adaptif	Budaya Tidak Adaptif
Nilai Inti	Kebanyakan manajer sangat peduli akan pelanggan, pemegang saham, dan pegawainya. Mereka juga sangat menghargai orang dan proses yang dapat menciptakan perubahan yang bermanfaat (misalnya kepemimpinan ke atas dan ke bawah pada hirarki manajemen)	Kebanyakan manajer memperdulikan terutama diri mereka sendiri, kelompok kerja terdekat mereka, atau beberapa produk (teknologi) yang berhubungan dengan kelompok kerja tersebut. Mereka menilai proses manajemen yang teratur dan kurang risikonya jauh lebih tinggi daripada inisiatif kepemimpinan.
Perilaku Umum	Manajer memberi perhatian yang cermat terhadap semua konstituensi mereka, khususnya pelanggan, memprakarsai perubahan bila dibutuhkan untuk melayani kepentingan mereka yang sah, bahkan walaupun menuntut pengambilan beberapa risiko.	Para manajer cenderung berperilaku agak picik, politis, dan birokratis. Akibatnya, mereka tidak cepat mengubah strategi mereka untuk menyesuaikan diri dengan atau mengambil keuntungan dari perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnis mereka.

Secara umum gambaran karakteristik budaya adaptif tercermin dari kualitas seperti kepemimpinan, kewiraswas-taan, penanggung risiko yang bijaksana, pembahasan yang jujur, fleksibel, proaktif terhadap kehidupan organisasi dan kehidupan individu, para anggota organisasi aktif mendukung usaha satu sama lain untuk mengidentifikasi semua masalah dan mengimplementasikan pemecahan masalah

¹³ John P. Kotter dan James L. Heskett, *Corporate Culture and Performance*, (New York: The Free Press, 1992).

yang dapat berfungsi, rasa percaya diri (*confidence*) yang dimiliki bersama, tanpa rasa bimbang, bahwa mereka dapat menata olah secara efektif masalah baru dan peluang apa saja yang akan mereka temui, kegairahan yang menyebar luas, semangat dalam mencapai keberhasilan organisasi, serta para anggota organisasi reseptif terhadap perubahan dan inovasi.

D. MEMBENTUK DAN MEMPERTAHANKAN BUDAYA

Budaya suatu organisasi profit maupun non profit seperti lembaga pendidikan sebut saja Madrasah Aliyah (MA) tidak muncul begitu saja dari suatu kehampaan. Budaya terbentuk melalui tahap-tahap sosialisasi secara sistematis sebagai berikut:

1. Tahap Kedatangan

Kurun waktu pembelajaran dalam proses sosialisasi yang terjadi sebelum seorang anggota (*civitas*) baru bergabung dengan organisasi itu. Mereka datang dengan serangkaian nilai, sikap dan perilaku yang telah dimiliki sebelumnya. Di sinilah muncul heterogenitas budaya.

2. Tahap Orientasi

Tahap dalam proses sosialisasi dimana seorang anggota (*civitas*) baru menaksirkan seperti apa sebenarnya organisasi itu dan menghadapi kemungkinan bahwa harapan dan kenyataan dapat berbeda. Pada tahap ini, sering terjadi konflik antara persepsi semula dengan realitas yang mereka temukan pada organisasi yang baru mereka masuki. Mereka dituntut untuk menyelesaikan berbagai problem tersebut selama masa orientasi berlangsung.

3. Tahap Metamorfosis

Tahap dalam proses sosialisasi di mana seorang anggota (*civitas*) baru menyesuaikan diri pada norma dan nilai kelompok kerjanya. Mereka sudah bisa menghayati dan menerima norma-norma organisasi dan kelompok kerja mereka. Disinilah suatu organisasi akan menerima hasil dari proses sosialisasi yang berupa produktivitas, komitmen dan perputaran.¹⁴

Setelah suatu budaya terbentuk, para anggota dan segala praktik-praktik di dalam organisasi tersebut bertindak untuk mempertahankannya dengan memberikan kepada para anggotanya seperangkat pengalaman yang berisi penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Proses seleksi, kriteria evaluasi kerja, praktek ganjaran keefektifan dan pengembang karier, dan prosedur promosi memastikan bahwa mereka yang dipekerjakan cocok dalam bidang itu, mengimbali mereka yang mendukungnya, dan menghukum (dan bahkan memecat) mereka yang menentangnya. Tiga kekuatan memainkan peranan sangat penting dalam mempertahankan suatu budaya: praktek seleksi sebagai pintu masuk para anggota baru, tindakan manajemen puncak sebagai pemegang kendali dalam mewujudkan budaya organisasi, dan metode sosialisasi sebagai sarana perwujudan komitmen para anggota, produktivitas kerja anggota dan perputaran kerja (komunitas).¹⁵

¹⁴ Stephen P. Robbins, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Edisi 5, (Jakarta: Erlangga, 2002), 288-290.

¹⁵ *Ibid.*, 296-297.

Setelah terbentuk dengan cukup kuat, organisasi akan terus mempertahankan budaya-budaya yang beisi nilai dan norma tersebut dengan pengejawantahan yang konkrit. Oleh sebab itu, pada kerangka ini ada enam karakteristik penting dari budaya organisasi, yaitu: (1) *obeserved behavioral regularities*; yakni keberaturan cara bertindak dari para anggota yang tampak teramati. Ketika anggota organisasi berinteraksi dengan anggota lainnya, mereka mungkin menggunakan bahasa umum, istilah, atau ritual tertentu; (2) *norms*; yakni berbagai standar perilaku yang ada, termasuk di dalamnya tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan; (3) *dominant values*; yaitu adanya nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi, misalnya tentang kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah atau efisiensi yang tinggi; (4) *philosophy*; yakni adanya kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan keyakinan organisasi dalam memperlakukan pelanggan dan karyawan (5) *rules*; yaitu adanya pedoman yang ketat, dikaitkan dengan kemajuan organisasi (6) *organization climate*; merupakan perasaan keseluruhan (*an overall "feeling"*) yang menggambarkan dan disampaikan melalui kondisi tata ruang, cara berinteraksi para anggota organisasi, dan cara anggota organisasi memperlakukan dirinya dan pelanggan atau orang lain.

E. BUDAYA MADRASAH ALIYAH BERPRESTASI: MENILIK KEMBALI BUDAYA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam pemakaian sehari-hari, orang umumnya mensinonimkan pengertian

budaya dengan tradisi. Keduanya mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi-organisasi yang lain. Sistem makna bersama ini, jika diamati dengan lebih seksama, merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai bahkan dicita-citakan oleh organisasi itu, khususnya organisasi madrasah atau lembaga pendidikan Islam.

Pentingnya membangun budaya organisasi di lembaga pendidikan (Islam) terutama berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan (Islam) dan peningkatan kinerja lembaga pendidikan (Islam). Sebagaimana disampaikan oleh Stephen Stolp (1994) tentang *School Culture* yang dipublikasikan dalam ERIC Digest, dari beberapa hasil studi menunjukkan bahwa budaya organisasi di sekolah berkorelasi dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa serta kepuasan kerja dan produktivitas guru. Begitu juga, studi yang dilakukan Leslie J. Fyans, Jr. dan Martin L. Maehr tentang pengaruh dari lima dimensi budaya organisasi di sekolah yaitu: tantangan akademik, prestasi komparatif, penghargaan terhadap prestasi, komunitas sekolah, dan persepsi tentang tujuan sekolah menunjukkan survey terhadap 16.310 siswa tingkat empat, enam, delapan dan sepuluh dari 820 sekolah umum di Illinois, mereka lebih termotivasi dalam belajarnya dengan melalui budaya organisasi di sekolah yang kuat. Sementara itu, studi yang dilakukan, Jerry L. Thacker and William D. McInerney terhadap skor tes siswa sekolah dasar menunjukkan adanya pengaruh budaya organisasi di sekolah terhadap prestasi siswa. Studi yang dilakukannya

memfokuskan tentang *new mission statement, goals based on outcomes for students, curriculum alignment corresponding with those goals, staff development, and building level decision-making*. Budaya organisasi di sekolah juga memiliki korelasi dengan sikap guru dalam bekerja. Studi yang dilakukan Yin Cheong Cheng membuktikan bahwa “*stronger school cultures had better motivated teachers. In an environment with strong organizational ideology, shared participation, charismatic leadership, and intimacy, teachers experienced higher job satisfaction and increased productivity*”.

Demikain halnya dalam lembaga pendidikan Islam, budaya yang dijalankan bahkan yang dicita-citakan berguna untuk menunjukkan suatu karakteristik dari lembaga tersebut. Kasus Madrasah Aliyah 3 Malang atau di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang misalnya, budaya atau tradisi dipahami sebagai perilaku civitas akademika dalam melakukan perannya masing-masing yang didasari oleh adanya kesadaran yang tinggi atas peran yang disandang dan meraih cita-cita bersama. Kesadaran ini dibangun atas dasar pemahaman yang mendalam terhadap visi dan misi yang tercermin dalam pemikiran, sikap dan tindakan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Oleh karena itu, kinetja civitas akademika merupakan cerminan dari tradisi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.¹⁶

Sebagai gambaran, berbagai tradisi yang ingin dikembangkan oleh Madrasah Aliyah Berprestasi harus di-

¹⁶ Universitas Islam Negeri Malang, Visi, Misi dan Tradisi UIN Malang, 2004, 4.

bentuk mulai level bawah sampai level atas yaitu mulai lingkup siswa sampai dengan kepala madrasah sendiri. Nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Performansi Fisik Madrasah Aliyah Berprestasi

Secara fisik, Madrasah Aliyah berprestasi sebagai lembaga pendidikan yang beridentitas dan bernafaskan Islam, harus menampilkan citra yang berwibawa, sejuk, rapi dan indah. Performa gedung yang representatif akan menjadi daya tarik dan juga keefektifan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di madrasah tersebut.

2. Kelembagaan

- a. Memiliki tenaga akademik yang handal dalam pemikiran, penelitian -dalam konteks ini bukan hanya perguruan tinggi yang harus mempunyai semangat penelitian, akan tetapi madrasah juga harus mampu membangun budaya ini- dan berbagai aktivitas ilmiah.
- b. Memiliki manajemen yang kokoh dan mampu menggerakkan seluruh potensi untuk mengembangkan kreativitas warga madrasah dalam mengembangkan budaya akademik yang unggul.
- c. Memiliki kemampuan antisipatif masa depan dan bersikap proaktif di segala lini madrasah.

3. Tenaga Pengajar Madrasah Aliyah Berprestasi

- a. Selalu menampakkan diri sebagai seorang mukmin dan muslim di manapun dan kapanpun ia berada. Dengan landasan tersebut, sosok tenaga pengajar

akan menjadi sosok panutan dan *uswah hasanah* di hadapan siswanya.

- b. Memiliki wawasan keilmuan yang luas serta profesionalisme yang tinggi.
- c. Kreatif, dinamis dan inovatif dalam pengembangan keilmuan.
- d. Bersikap dan berperilaku jujur, amanah dan berakhlak mulia dan dapat menjadi contoh bagi civitas-civitas akademik lainnya.
- e. Berdisiplin tinggi dan selalu mematuhi kode etik profesi.

4. Siswa Madrasah Aliyah Berprestasi

- a. Memiliki performansi sebagai calon pemimpin umat dengan meliki nilai-nilai etik yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadist.
- b. Berdisiplin tinggi.
- c. Haus dan cinta ilmu pengetahuan sebagai ciri ilmuwan Islam yang akan memberi warna bagi peradaban manusia.
- d. Memiliki keberanian, kebebasan dan keterbukaan sebagai pndasi dalam membangun masyarakat madani.
- e. Kreatif, inovatif dan berpandangan jauh ke depan yang visioneratif.

5. Lulusan Madrasah Aliyah Berprestasi

- a. Mandiri.
- b. Siap berkompetisi dengan lulusan madrasah atau sekolah lain. Artinya siap untuk menjadi kompetitor di era global.

- c. Berwawasan akademik global yang ditandai dengan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan agamis.
- d. Mampu memimpin umat menjadi umat yang Islami menuju peradaban madani.
- e. Bertanggung jawab dalam mengembangkan Agama Islam di tengah kehidupan bermasyarakat.

Dari sekian budaya tradisi yang dikembangkan oleh Madrasah Aliyah berprestasi, maka sangat jelas bahwa Madrasah Aliyah berprestasi akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan madrasah lainnya. Budaya dalam hal ini adalah seperangkat nilai yang dipahami bersama dan dicita-citakan dalam rangka mewujudkan produktivitas (dalam hal ini *out put* dan *out come*) sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau bahkan sesuai dengan landasan etik normatif yaitu nilai al-Qur'an dan al-Hadist.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, ada beberapa hal yang perlu penulis simpulkan, antara lain:

1. Budaya organisasi mengacu ke suatu sistem makna yang dianut dan dicita-citakan oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang lain. Budaya dalam pemakaian sehari-hari sering disinkronkan dengan istilah tradisi.
2. Budaya organisasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi: akademi, klub, tim bisbol dan benteng; berdasarkan sifatnya terdiri: budaya kuat dan budaya lemah; dan

berdasarkan prosesnya, terdiri dari: Budaya Sebagai *Input* (BSI), Budaya Sebagai Proses (BSP) dan Budaya Sebagai *Output* (BSO).

3. Budaya mempunyai fungsi positif: a). Sebagai pembeda dengan organisasi lain; b). Membawa identitas bagi anggota organisasi; c). Mempermudah timbulnya komitmen bersama; d). Meningkatkan kemantapan sistem dan perekat sosial; dan e). Sebagai mekanisme pembuat makna dan kedali bagi para anggotanya.
4. Selain itu, budaya yang kuat juga memiliki efek negatif, yaitu: a). Menghalangi terjadinya perubahan; b). Menghalangi timbulnya keanekaragaman; dan c). Menghalangi proses afiliasi.
5. Terbentuknya budaya melalui proses sosialisasi dilakukan melalui tiga tahap, secara sistematis yaitu: 1). Tahap kedatangan; 2) Tahap orientasi; dan 3). Tahap metamorfosis.
6. Dalam konteks Madrasah Aliyah berprestasi, budaya atau tradisi dipahami sebagai perilaku civitas akademika (akademi madrasah) dalam melakukan perannya masing-masing yang didasari atas kesadaran akan peran untuk meraih cita-cita bersama. Budaya atau tradisi lembaga ini tercermin dalam kinerja segenap civitas akademika mulai dari siswa sampai kepala madrasah.

Dengan deskripsi tentang budaya organisasi di Madrasah Aliyah berprestasi memberikan beberapa alternatif yang konstruktif dalam membangun organisasi pendidikan yang efektif. Artinya, masukan konstruktif tersebut bertitik tolak

dari realitas pola budaya organisasi yang ada di madrasah khususnya madrasah Aliyah yang berprestasi dan juga kesimpulan penulis di atas, maka akan dikemukakan saran-saran yang dapat dijadikan penunjang atau langkah preventif dalam mengantisipasi kekurangan yang terjadi pada organisasi pendidikan, yaitu:

1. Bagi Guru

- a. Sebelum menerapkan berbagai strategi dalam membangun budaya organisasi yang konstruktif, diharapkan guru sebagai tenaga pengajar untuk melakukan pembenahan dalam proses pembelajaran untuk menunjang iklim madrasah yang kondusif.
- b. Tenaga pengajar atau guru hendaknya benar-benar terlibat secara langsung terhadap jalannya atau perputaran arus organisasi sebagai bentuk dari kepedulian tenaga pengajar pada madrasah.

2. Bagi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah harus benar-benar pro-aktif ketika guru atau tenaga pengajar atau bahkan karyawan lain menerapkan berbagai strategi dalam membangun organisasi yang efektif dengan memberikan *reward* bagi guru atau karyawan tersebut. []



Bagian 6

PESANTREN DI TENGAH ARUS MUTU PENDIDIKAN:

**Sebuah Pemikiran Gradual
pada Tataran Teoritis-Normatif**

A. PROLOG: IDENTIFIKASI PROBLEMATIKA SUATU KENISCAYAAN

Pesantren sebagai lembaga dakwah Islamiyah memiliki persepsi yang sangat plural. Pesantren dapat dipandang sebagai lembaga ritual, lembaga pembinaan moral, lembaga dakwah dan yang paling penting sebagai institusi pendidikan Islam yang mengalami konjungtur dan romantika kehidupan dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal.¹ Bahkan pesantren juga memiliki dimensi yang paradoksal. Di satu sisi pesantren sebagai lembaga khas Indonesia, namun

¹ Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), viii.

di sisi yang lain pesantren berorientasi internasional dengan Mekkah sebagai pusat orientasinya, dan bukan Indonesia.²

Bahkan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua Islam nusantara telah diakui memiliki andil dan peran yang besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pesantren nusantara telah membuktikan eksistensi dan kiprahnya menjadi dinamisator dalam setiap proses sejarah *nation and character building*. Menurut Harry J. Benda, sejarah Islam Indonesia adalah sejarah perluasan peradaban santri dan pengaruhnya terhadap kehidupan agama, sosial dan politik Indonesia. Bahkan menurut Harry J. Benda, para penguasa yang baru dinobatkan bersandar diri kepada para ahli agama, karena hanya merekalah yang dapat mengesahkan pentahbisan.³ Oleh karenanya keberadaan pesantren tidak bisa dilepaskan dari sejarah Indonesia, karena sejarah pesantren adalah sejarah Indonesia itu sendiri.⁴

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren dari awal berdirinya hingga sekarang tetap eksis, menawarkan pendidikan kepada mereka yang masih buta huruf. Pesantren menjadi institusi satu-satunya yang menjadi milik masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi besar dalam membentuk masyarakat melek huruf (*literacy*) dan melek budaya (*cultural*

² Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kiai NU, Pesantren dan kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usia*, (Yogyakarta: Kutub, 2003), 22.

³ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 33.

⁴ Hasan Muarif Ambari, *Peranan Pesantren dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Banten*, Makalah Simposium Nasional dan Kongres Pemuda Al-Khairiyah se Indonesia, Serang 1992.

literacy). Kontribusi pesantren dalam sistem pendidikan di Indonesia; melestarikan dan melanjutkan sistem pendidikan rakyat; (2) mengubah sistem pendidikan aristokratis menjadi sistem pendidikan demokratis.⁵

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam paling otonom yang tidak dapat diintervensi pihak-pihak manapun kecuali kiai. Kiailah yang mewarnai semua bentuk kegiatan pesantren sehingga menimbulkan perbedaan yang beragam sesuai selaranya masing-masing. Variasi bentuk pendidikan ini juga yang diakibatkan perbedaan kondisi sosi-kultural masyarakat yang mengelilinginya.

Akan tetapi, ketika menginjak abad ke-20, yang sering disebut sebagai zaman modernisme dan nasionalisme, peranan pesantren mulai mengalami pergeseran secara signifikan. Sebagian pengamat mengatakan bahwa semakin mundurnya peran pesantren di masyarakat disebabkan adanya dan begitu besarnya faktor politik Hindia Belanda.⁶ Sehingga, fungsi dan peran pesantren menjadi bergeser dari sebelumnya. Tapi, penjelasan di atas kiranya cukup untuk menyatakan bahwa pra abad ke-20 atau sebelum datangnya modernisme dan nasionalisme, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tak tergantikan oleh lembaga pendidikan manapun. Dan, hal itu sampai sekarang masih tetap dipertahankan.

⁵ Jalaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 9.

⁶ Lebih detail lihat dalam Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985).

Akan tetapi di satu sisi, pesantren yang sekarang memasuki era globalisasi khususnya era yang sangat mementingkan mutu, maka mau tidak mau pesantren harus berhadapan dengan kompetitor lainnya di tengah perkembangan dunia yang kian kompetitif di masa kini dan abad ke-21.⁷ Mayoritas pesantren masa kini terkesan berada di menara gading, elitis, jauh dari realitas sosial. Problem sosialisasi dan aktualisasi ini ditambah lagi dengan problem keilmuan, yaitu terjadi kesenjangan, alienasi (keterasingan) dan differensiasi (pembedaan) antara keilmuan pesantren dengan dunia modern. Sehingga terkadang *out put* (lulusan) pesantren kalah bersaing atau tidak siap berkompetisi dengan lulusan umum dalam urusan profesionalisme di dunia kerja. Dunia pesantren dihadapkan kepada masalah-masalah globalisasi, yang dapat dipastikan mengandung beban tanggung jawab yang tidak ringan bagi pesantren.⁸

Pesantren pada tataran ini memiliki tugas ganda yang harus mampu diwujudkan dalam mencetak *output* yang

⁷ Memasuki milenium baru abad XXI, dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tampak semakin dahsyat dan berimplikasi terhadap dinamika perubahan segi-segi kehidupan lainnya. Theodorson seperti yang dikutip oleh Robert H. Lauer memprediksi, bahwa masyarakat yang menerima teknologi Barat, tanpa terelakkan akan meniru pula pola masyarakat Barat yang mengirimkan teknologi itu. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 19. Hal ini juga berarti bahwa pesantren akan terkena imbas dari implikasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tersebut.

⁸ Jamaludin Malik, *Pemberdayaan Pesantren, Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), xix-xxii.

siap pakai dan memberi warna bagi masyarakat pengguna *out put* pesantren sendiri. Yang pertama; tugas pokok yang dipikul pesantren selama ini, pada esensinya adalah mewujudkan manusia dan masyarakat muslim Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Dalam hal kaitan ini secara lebih khusus lagi pesantren bahkan dapat diharapkan berfungsi lebih dari itu, ia diharapkan dapat memikul tugas yang tak kalah pentingnya yaitu melakukan reproduksi ulama. Dengan kualitas keIslaman, keilmuan, dan akhlaqnya para santri diharapkan mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Di sini pada hakikatnya para santri diharapkan memainkan peran dan fungsi ulama dan pengakuan terhadap keulamaan mereka biasanya pelan-pelan tapi pasti akan datang dari masyarakat, selain itu pesantren juga bertujuan menciptakan manusia muslim yang mandiri dan ini kultur pesantren yang cukup menonjol yang mempunyai swakarya dan swadaya.⁹

Yang kedua; tugas pesantren adalah mencetak ilmuwan yang sesuai dengan kebutuhan zaman khususnya di era teknologi dan komunikasi. Tuntutan ini harus selaras dan tidak mencabut akar tradisi kurikulum pesantren yang cukup konsisten dengan nilai-nilai spiritual. Ini berarti bahwa ada dua wilayah yang sama-sama harus dikonstruksi oleh pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk terus eksis dan survive di tengah era kompetitif berdasarkan mutu. Bahkan pada sisi lain, kondisi tersebut menyebabkan an-

⁹ Ayumardi Azra, *Dilema Pesantren Menghadapi Globalisasi*, dalam Saefullah Maksum (Edit.), *Dinamika Pesantren*, (Jakarta: Yayasan Islam al-Hamidiyah, 1998), 1.

tara tradisi lama dengan unsur-unsur baru yang datang belakangan tidak bisa dipisahkan secara tegas. Meskipun begitu pembagian pesantren menjadi pesantren tradisional dan pesantren modern tetap tak dapat dihindarkan sebab masyarakat memang memandang ada perubahan struktur keilmuan dalam pesantren dibanding masa-masa awal kemunculannya yang hanya mengajarkan kitab-kitab klasik dalam bidang fiqh, teologi, dan tasawuf.

Romantika ini semakin disadari, tantangan dunia pesantren semakin besar dan berat dimasa kini dan mendatang. Paradigma “mempertahankan warisan lama yang masih relevan dan mengambil hal terbaru yang lebih baik” perlu direnungkan kembali. Pesantren harus mampu mengurai secara cerdas problematika kekinian dengan pendekatan-pendekatan kontemporer. Di sisi lain, modernitas, yang menurut beberapa kalangan harus segera dilakukan oleh kalangan pesantren, ternyata berisi paradigm dan pandangan dunia yang telah merubah cara pandang lama terhadap dunia itu sendiri dan manusia.¹⁰

Dalam konteks yang dilematis ini, pilihan terbaik bagi insan pesantren adalah mendialogkannya dengan paradigma dan pandangan dunia yang telah diwariskan oleh generasi pencerahan Islam. Maksudnya, insan pesantren perlu memposisikan warisan masa lalu sebagai “teman dialog” bagi modernitas dengan segala produk yang ditawarkannya. Mereka harus membaca khazanah lama dan baru dalam

¹⁰ Abd A'la, *Pembaharuan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), v-ix.

frame yang terpisah. Masa lalu hadir atau dihadirkan dengan terang dan jujur, lalu dihadapkan dengan kekinian. Boleh jadi masa lalu tersebut akan tampak “basi” dan tak lagi relevan, namun tak menutup kemungkinan masih ada potensi yang dapat dikembangkan untuk zaman sekarang.¹¹

Berdasarkan pada paradigma tersebut, penulis mencoba untuk membaca fenomena tersebut dengan terlebih dahulu mendeskripsikan tentang pesantren, unsur-unsur pesantren dan juga tentang *Total Quality Management* (TQM). Terakhir penulis mencoba untuk mengkonstruksi manajemen pesantren masa depan sebagai bentuk alternatif-solutif dalam menemukan eksistensi pesantren di kancah mutu pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pengguna *output* dan *outcome* pendidikan pesantren.

B. PESANTREN: DESKRIPSI AWAL TENTANG EKSISTENSI PESANTREN

Pesantren berarti tempat para santri.¹² Poerwadarminta mengartikan pesantren sebagai asrama dan tempat murid-murid belajar mengaji.¹³ Louis Ma'lûf mendefinisikan kata pondok sebagai “*khôn*” yaitu “setiap tempat singgah besar yang disediakan untuk menginap para turis dan orang-

¹¹ Abd A'la, *Pembaharuan Pesantren ...* Op. Cit., v-ix.

¹² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 18. Lihat juga Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan ...* Op. Cit., 16.

¹³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 764.

orang yang berekreasi".¹⁴ Pondok juga bermakna "rumah sementara waktu seperti yang didirikan di ladang, di hutan dan sebagainya".¹⁵ Soegarda Purbakawatja juga menjelaskan, pesantren berasal dari kata santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk mempelajari agama Islam.¹⁶ Secara definitif Imam Zarkasyi, mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiyai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwaanya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.¹⁷ Secara singkat pesantren bisa

¹⁴ Louis Ma'lûf, *Kamus Munjid*, (Beirut: Dâr al-Mishria, 1986), 597.

¹⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa ...* Op. Cit., 764

¹⁶ Soegarda Purbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1976), 223. Mengenai asal-usul perkataan "santri" itu ada sekurangnya dua pendapat yang bisa dijadikan acuan. *Pertama*, adalah pendapat yang mengatakan bahwa santri itu berasal dari perkataan satri sebuah kata dalam bahasa Sangsekerta, yang artinya "melek huruf". Agaknya dulu lebih-lebih pada permulaan tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Demak, kaum santri adalah kelas *literary* bagi orang Jawa. Ini disebabkan pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. Posisi ini bisa kita asumsikan bahwa menjadi santri berarti juga menjadi tahu agama melalui kitab-kitab atau paling tidak seorang santri itu bisa membaca al-Quran yang dengan sendirinya membawa sikap serius dalam memandang agamanya. *Kedua*, pendapat yang mengatakan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa persisnya dari kata cantrik yang artinya seorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru itu menetap, tentunya dengan tujuan dapat belajar darinya mengenai suatu keahlian. Sebenarnya kebiasaan cantrik itu masih bisa kita lihat sampai sekarang, tetapi sudah tidak sekental seperti yang sudah kita dengar. Nurcholish Majid, *Bilik-Bilik Pesantren ...* Op. Cit., 19-20.

¹⁷ Amir Hamzah Wirosukarto, dkk, *KH. Imam Zarkasyi dari Gontor Me-*

juga dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.

Menurut pandangan Muhaimin dan Abdul Mujib, istilah pendidikan pesantren berasal dari istilah *Kuttab* yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkembang pada masa Bani Umayyah. Di Indonesia, istilah *Kuttab* lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren.¹⁸ Istilah *kuttab* ini sebenarnya sudah muncul di masa pra-Islam, namun dalam deskripsi ini *kuttab* yang hendak dipakai adalah yang dipakai oleh komunitas Muslim sebagai lembaga pendidikan dasar.

Menurut Ahmad Syalabi, "*kuttab*" merupakan awal mula tempat belajar yang ada di dunia Islam, yang diambil dari kata "*taktib*" yang berarti mengajar menulis, dan memang itulah fungsi *kuttab*. Tetapi, karena yang belajar di *kuttab* adalah anak-anak dan mereka mempelajari al-Qur'an serta pengetahuan agama, maka *kuttab* berarti tempat pengajaran anak-anak. Menurutnya, ada dua jenis *kuttab* yang saling berbeda. Jenis pertama adalah *kuttab* yang hanya mengajarkan dan menulis saja dikarenakan guru-gurunya adalah tawanan perang atau para *zhimmi*, dan jenis kedua adalah *kuttab* yang mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama.

rintis Pesantren Modern, (Ponorogo: Gontor Press, 1996), 56.

¹⁸ Pondok Pesantren yaitu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat kiai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (anak didik) dengan sarana Masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta didukung adanya pondok atau bangunan sebagai tempat tinggal para santri dan mempelajari kitab kuning. Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kjian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 298-299.

Pada masa awal Islam, *kuttab* hanya mengajarkan baca tulis saja dengan menggunakan puisi kuno sebagai buku pelajaran, sedangkan pengajaran tentang agama Islam (terutama al-Qur'an) berlangsung di forum-forum informal. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, *kuttab* justru digunakan untuk kegiatan mengajar al-Qur'an dan ajaran dasar Islam.

Pada mulanya, pendidikan *kuttab* berlangsung di rumah-rumah para guru atau di sekitar pekarangan masjid. Dengan karakteristiknya yang khas, *Kuttab* merupakan wahana dan lembaga pendidikan Islam yang semula sebagai lembaga baca dan tulis sistem *halaqah* (sistem wetonan).¹⁹ Akan tetapi setelah Islam berkembang meluas, institusi *kuttab* pun mengalami perkembangan yang cukup berarti, sehingga ada yang mampu menyediakan fasilitas asrama dan akomodasi bagi para muridnya,²⁰ di Indonesia model seperti ini dikenal dengan istilah Pondok Pesantren.²¹

Kurikulum pendidikan *kuttab* hingga abad ke-4 H masih menunjukkan penekananannya pada pelajaran baca tulis al-Qur'an bagi anak-anak kaum Muslimin.²² Perbedaan pada *kuttab* di tiap tempat terdapat pada penekanan materi pengajarannya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah

¹⁹ Hasan Langgung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), 112.

²⁰ Ahmad Syalabi, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1982), 44-49.

²¹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam ... Op. Cit.*, 23.

²² Hasan Abd al-'Ali, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qur'an al-Rabi' al-Hijri*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t.), 183.

tertentu dan pertimbangan para ulamanya. Misalnya, *kuttab* bagi umat Islam di Maroko lebih menekankan pengajaran al-Qur'an dengan pendekatan onografi (mengenali suatu bentuk kata dalam hubungannya dengan bunyi bacaan). Sementara di Andalusia sangat mengutamakan menulis dan membaca tanpa harus menghafalkannya. Sedangkan di Afrika Utara (Tunisia dan sebagian Libya) lebih mengutamakan segi *qira'at* dari al-Qur'an lalu diikuti dengan seni kaligrafi dan hadits.²³

Dari berbagai keterangan tersebut, baik dari sisi institusi maupun sistem pengajarannya, maka dapat dikatakan bahwa lembaga *kuttab* ini masih berkuat di sekitar mengenalkan anak dengan ilmu membaca dan menulis al-Qur'an serta prinsip-prinsip ajaran Islam.²⁴ Maka konklusinya bisa saja sistem pesantren yang ada di Indonesia merupakan evolusi dari *kuttab* ini. Maka dalam konteks ini Muzayin Arifin mendefinisikan pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan agama yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus), dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *leadership* seorang atau beberapa kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.²⁵

²³ Hasan Asyari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*, (Bandung: Mizan, 1984), 27-28.

²⁴ Sayyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam*, (Cambridge: Harvard University Press, 1968), 66.

²⁵ Muzayin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Umum dan Agama*, (Semarang: Toha Putra, tt.), 104.

Dari beberapa batasan dan definisi para ahli tersebut dapat diketahui bahwa dalam pondok pesantren ada beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan yaitu meliputi: 1). Pondok; 2). Masjid; 3). Santri; 4). Pengajian kitab-kitab Islam klasik dan 5). Kiai.²⁶ Bahkan Zamakhsari Dhofier dalam pengamatannya juga menyederhanakan pesantren ke bentuknya yang paling tradisional, ia menyebutkan ada lima unsur yang membentuk pesantren yaitu pondok, masjid, pengajian kitab klasik, santri dan kiai.²⁷

Saat ini pesantren dari sisi kelembagaan telah mengalami perkembangan dari yang sederhana sampai yang paling maju, sebagaimana yang dikemukakan Soedjoko Prasojo, seperti yang dikutip oleh Kuntowijoyo menyebut setidaknya adanya lima macam pola pesantren. Pola 1 ialah pesantren yang terdiri hanya dari masjid dan rumah kiai. Pola 2 terdiri atas masjid, rumah kiai dan pondok. Pola 3 terdiri atas masjid, rumah kiai, pondok dan madrasah. Pola 4 terdiri atas masjid, rumah kiai, pondok, madrasah dan tempat keterampilan. Pola 5 terdiri atas masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, gedung pertemuan, sarana olah raga, dan sekolah umum. Pesantren yang terakhir inilah yang sering disebut “pesantren moderen”, yang di samping itu juga memiliki fasilitas dan sarana penunjang lainnya.²⁸

²⁶ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi ...* Op. Cit., 44.

²⁷ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi ...* Op. Cit., 5.

²⁸ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi ...* Op. Cit., 173-174.

C. TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)

Istilah kualitas menjadi menderita karena sering digunakan untuk menggambarkan lambang-lambang seperti; kecantikan, kebaikan, kemahalan, kesegaran dan di atas semua itu, kemewahan. Karena itu, kualitas menjadi konsep yang sulit dimengerti dan hampir tidak mungkin ditangani. Bagaimana mungkin menangani sesuatu yang tidak jelas dan mempunyai arti demikian banyak.²⁹ Dalam konteks manajemen kualitas, *quality* itu adalah *goodness of product*, ini dalam perspektif *absolute mind goodness of product*, biasanya produk yang bagus akan berimplikasi pada harga.

Kata kualitas masuk ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, yaitu *quality*, dan kata ini sesungguhnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *qualitas* yang masuk ke dalam bahasa Inggris melalui bahasa Prancis kuno, yaitu *qualite*. Dalam kamus-kamus lengkap (kamus komprehensif) bahasa Inggris, kata itu mempunyai banyak arti. Tiga di antaranya: (1) suatu sifat atau atribut yang khas dan membuat berbeda; (2) standar tertinggi sifat kebaikan; dan (3) memiliki sifat kebaikan tertinggi.³⁰

Menurut Edward Sallis, kualitas itu memang sesuatu yang tarik menarik antara sebagai konsep yang absolut dan relatif. Namun, ia menegaskan bahwa kualitas sekarang ini lebih digunakan sebagai konsep yang absolut. Karena itu, kualitas mempunyai kesamaan arti dengan kebaikan, ke-

²⁹ Edward Sallis, *Total Quality Management ... Op. Cit.*, 35.

³⁰ Daulat P. Tampubolon, *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Ke-21* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 106

indahan, dan kebenaran; atau keserasian yang tidak ada kompromi. Standar kualitas itu meliputi dua, yaitu; kualitas yang didasarkan pada standar produk/jasa; dan kualitas yang didasarkan pada pelanggan (*customer*). Kualitas yang didasarkan pada produk/jasa, memiliki beberapa kualifikasi:³¹ 1). Sesuai dengan spesifikasi, 2). Sesuai dengan maksud dan kegunaannya, 3). Tidak salah atau cacat, dan 4). Benar pada saat awal dan selamanya. Sementara itu, kualitas yang didasarkan pada *customer*, mempunyai kualifikasi; 1). Memuaskan pelanggan (*costomer satisfaction*), 2). Melebihi harapan pelanggan, dan 3). Mencerahkan pelanggan.³² Sedangkan MN Nasution mensinyalir ada empat prinsip utama dalam *Total Quality Management* (TQM), yaitu: kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan.³³

Pengertian lain disampaikan oleh Joseph Juran,³⁴ yang mendefinisikan mutu berdasarkan fungsionalitas. Menurutnya, mutu adalah kesesuaian produk dengan pengguna-

³¹ David L. Goetsch dan Stanley B. Davis, *Quality Management: Introduction* ... Op. Cit., 48-49.

³² Edward Sallis, *Total Quality Management* ... Op. Cit., 22.

³³ MN Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu* ... Op. Cit., 33-34.

³⁴ Joseph Juran adalah guru mutu kedua setelah Deming, yang telah bejasa mengembangkan pemahaman tentang mutu di Jepang. Sumbangan terbesar Juran dalam pengembangan mutu adalah sebagaimana tercantum dalam buku "*Juran, On Quality By Design*" yang disebut dengan Trilogi Juran, yakni: Perencanaan Mutu (*Quality Planning*); Pengeendalian Mutu (*Quality Control*); dan Peningkatan Mutu (*Quality Improvement*). Ini yang membedakan dan menyebabkan Trilogi Juran lebih maju daripada manajemen tradisional pada umumnya yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lihat P. Tampubolon, *Perguruan Tinggi Bermutu* ... Op. Cit., 50-55.

an, seperti sepatu olahraga yang dirancang untuk olahraga, atau sepatu kulit yang dirancang untuk ke kantor atau ke pesta.³⁵ Dalam kerangka pesantren, maka mutu merupakan kesesuaian antara pengguna jasa pesantren yaitu wali santri yang sangat beragam dalam memberikan gambaran eksistensi pesantren baik sebagai pengemban *Islamic values*, *social control* dan *social engineering* dengan *out come* pesantren.

Prinsipnya, dari ketiga guru kualitas tersebut, yaitu Philip Crosby, Edward Deming dan Joseph Juran menyatakan bahwa komitmen yang harus dibangun dalam setiap diri terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa: *Pertama*, kualitas merupakan kunci ke arah program yang berhasil. Kurang perhatian terhadap kualitas akan mengakibatkan kegagalan dalam jangka panjang. *Kedua*, perbaikan-perbaikan kualitas menuntut komitmen manajemen sepenuhnya untuk dapat berhasil. Komitmen kepada kualitas ini harus terus-menerus. *Ketiga*, perbaikan kualitas adalah kerja keras. Tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat. Menuntut perbaikan budaya bagi organisasi secara keseluruhan. *Keempat*, perbaikan kualitas menuntut banyak pelatihan. *Kelima*, perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua karyawan secara aktif, dan komitmen mutlak dari manajemen senior.³⁶

Menurut Crosby, kemutlakan bagi kualitas adalah:

- 1). Kualitas harus disesuaikan sebagai kesesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan, bukan sebagai kebaikan, juga bukan

³⁵ Rudi Suardi, *Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000, Penerapannya untuk Mencapai TQM*, (Jakarta: PPM, 2001), 3.

³⁶ Edward Sallis, *Total Quality Management ... Op. Cit.*, 25.

keistimewaan, 2). Sistem untuk menghasilkan kualitas adalah pencegahan bukan penilaian, 3). Standar kerja harus tanpa cacat, bukan “cukup mendekati tanpa cacat”, 4). Pengukuran kualitas merupakan harga ketidaksesuaian, bukan pedoman. Karena itu, menurut tokoh yang sangat terkemuka dengan gagasan kualitas ini, bahwa manajemen adalah penyebab setidak-tidaknya 80% masalah-masalah kualitas di dalam organisasi. Karena itu, satu-satunya jalan memperbaikinya adalah melalui kepemimpinan manajemen. Crosby memberikan “vaksin kualitas” (*quality vaccine*), yaitu: 1). Tujuan: manajemen merupakan satu-satunya alat yang akan mengubah citra organisasi, 2). Pendidikan: membantu semua komponen organisasi mengembangkan satu pengertian umum tentang kualitas dan memahami peran mereka masing-masing di dalam proses perbaikan kualitas, 3). Penerapan: membimbing dan mengarahkan program perbaikan.³⁷

Tidak berbeda dengan definisi kualitas, bahwa definisi kualitas terpadu (*total*) juga memiliki pengertian yang bermacam-macam. Menurut Departemen Pertahanan Amerika, kualitas terpadu itu mencakup aktivitas perbaikan secara terus menerus yang melibatkan semua orang di dalam organisasi, baik manajer maupun semua staf-stafnya dalam berusaha secara terintegrasi mencapai kinerja yang terus meningkat pada setiap tingkatan.³⁸ Meskipun tidak ada de-

³⁷ Lesley Munro dan Malcolm, *Menerapkan Manajemen Mutu ...* Op. Cit., 334.

³⁸ David L. Goetsch dan Stanley B. Davis, *Quality Management: Introduction ...* Op. Cit., 50.

finisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, dari definisi-definisi yang ada terdapat beberapa persamaan. Artinya, dalam mendefinisikan mutu/kualitas memerlukan pandangan yang komprehensif. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas, yakni:³⁹

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.
3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain).
4. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Jadi, kualitas terpadu pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk melakukan sesuatu yang berusaha untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif organisasi melalui perbaikan terus menerus dalam hal produk, servis, orang, proses dan lingkungannya. Secara sistematis, kualitas total memiliki karakteristik berikut sebagai berikut:⁴⁰ 1). Dasar-dasar yang strategis, 2). Fokus pada pelanggan (internal dan eksternal), 3). Obsesi dengan kualitas, 4). Pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah,

³⁹ Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi, 2009), 3-4

⁴⁰ David L. Goetsch dan Stanley B. Davis, *Quality Management: Introduction ... Op. Cit.*, 51.

5). Komitmen jangka panjang, 6). Kerja tim, 7). Perbaikan proses secara kontinyu, pendidikan dan pelatihan, 9). Kebebasan yang terkontrol, 10). Kesatuan tujuan, dan 11). Pelembutan dan pemberdayaan tenaga.

Pengertian kualitas terpadu tersebut, memberikan kerangka yang jelas bahwa hakekat *Total Quality Management* (TQM) atau manajemen kualitas terpadu sebenarnya adalah filosofi dan budaya (kerja) organisasi (*philosophy of management*) yang berorientasi pada kualitas. Tujuan (*goal*) yang akan dicapai dalam organisasi dengan budaya *Total Quality Management* (TQM) adalah memenuhi atau bahkan melebihi apa yang dibutuhkan (*needs*) dan yang diharapkan atau diinginkan (*desire*) oleh pelanggan.⁴¹ Sedangkan Mars J., seperti yang dikutip oleh Tony Bush dan Marianne Coleman, mendefinisikan *Total Quality Management* (TQM) sebagai sebuah filosofi dengan alat-alat dan proses-proses implementasi praktis yang ditujukan untuk mencapai sebuah kultur perbaikan terus-menerus yang digerakan oleh semua pekerja sebuah organisasi, dalam rangka memuaskan pelanggan.⁴²

Dengan demikian, *Total Quality Management* (TQM) dapat diartikan sebagai pengelolaan kualitas semua komponen (*stakeholder*) yang berkepentingan dengan visi dan misi organisasi. Jadi, pada dasarnya *Total Quality Management* (TQM) itu bukanlah pembebanan ataupun pemeriksaan.

⁴¹ Marshal Sashkin dan Kisser, *Putting Total Quality Management to Work*, (San Francisco: Berret-Kohler Publisher, 1993), 75.

⁴² Tony Bush dan Marianne Coleman, *Manajemen Strategis: Kepemimpinan Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2010), 191-192.

Tetapi, *Total Quality Management* (TQM) adalah lebih dari usaha untuk melakukan sesuatu yang benar setiap waktu, daripada melakukan pemeriksaan (*cheeking*) pada waktu tertentu ketika terjadi kesalahan. *Total Quality Management* (TQM) bukan bekerja untuk agenda orang lain, walaupun agenda itu dikhususkan untuk pelanggan (*customer*) dan klien. Demikian juga, *Total Quality Management* (TQM) bukan sesuatu yang diperuntukkan bagi manajer senior dan kemudian melewatkan tujuan yang telah dirumuskan.⁴³

Prinsipnya, *Total Quality Management* (TQM) adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha atau proses yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. Karena itu, *Total Quality Management* (TQM) memiliki beberapa karakteristik: 1). Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, 2). Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, 3). Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, 4). Memiliki komitmen jangka panjang, 5). Membutuhkan kerja sama tim (*teamwork*), 6). Memperbaiki proses secara berkesinambungan, 7). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, 8). Memberikan kebebasan yang terkendali, 9). Memiliki kesatuan tujuan, 10). Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.⁴⁴

⁴³ Edward Sallis, *Total Quality Management ... Op. Cit.*, 34-35.

⁴⁴ Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Management ... Op. Cit.*, 4.

D. TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DALAM PESANTREN

Agar mutu pendidikan pesantren tetap terjaga dan proses peningkatan mutu pendidikan tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan pesantren tersebut (adanya *benchmarking*/titik acuan standar/patokan). Akan tetapi, kebanyakan pesantren yang ada di Indonesia belum menggunakan sistem manajemen mutu pendidikan. Sistem manajemen mutu yang tepat perlu diterapkan dan dikembangkan. Dalam manajemen mutu, sudah ada tiga sistem yang berkembang, yaitu: 1). Pengawasan Mutu (PM); 2). Jaminan Mutu (JM); dan 3). Manajemen Mutu Terpadu (MMT).⁴⁵

Maka pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran sepanjang waktu dengan kiai sebagai tokoh sentral harus mampu *me-menej* mutu dirinya sendiri. Mutu produk pendidikan pesantren akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga tersebut mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, lembaga pendidikan Islam harus mampu merubah paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktifitas yang berinteraksi didalamnya, seluruhnya mengarah pencapaian pada mutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jerome S. Arcaro menyampaikan bahwa terdapat

⁴⁵ Daulat P. Tampubolon, *Perguruan Tinggi Bermutu ... Op. Cit.*, 111.

lima karakteristik sekolah atau lembaga pendidikan yang bermutu yaitu: 1) Fokus pada pelanggan. 2) Keterlibatan total 3) Pengukuran 4) Komitmen 5) Perbaikan berkelanjutan.⁴⁶ Sedangkan Suryadi Poerwanegara menyampaikan ada enam unsur dasar yang mempengaruhi suatu produk: 1). Manusia; 2). Metode; 3). Mesin; 4). Bahan; 5). Ukuran; 6). Evaluasi Berkelanjutan.⁴⁷

Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana menjelaskan bahwa prinsip dan unsur pokok dalam *Total Quality Management* (TQM), sebagai berikut:⁴⁸ *Pertama*, Kepuasan pelanggan. Kualitas tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi kualitas itu ditentukan oleh pelanggan (internal maupun eksternal). Kepuasan pelanggan harus dipenuhi dalam segala aspek, termasuk harga, keamanan, dan ketepatan waktu.

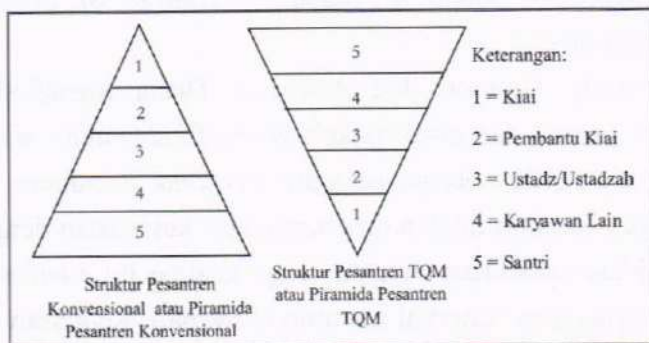
Dengan menempatkan pelanggan pesantren sebagai fokus utama, maka struktur organisasi akan menjadi piramida terbalik. Artinya adalah biasanya susunan organisasi berbentuk kerucut. Kiai ada dibagian atas, menyusul pembantu kiai sebagai pimpinan tengah, ustadz/ustadzah dan karyawan pendukung. Dalam *Total Quality Management* (TQM) bentuk krucut ini harus terbalik. Justru puncak pimpinan (kiai) berada di bawah, yang memberikan

⁴⁶ Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 36.

⁴⁷ Suryadi Poerwanegara, *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 12.

⁴⁸ Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Management ... Op. Cit.*, 14-15.

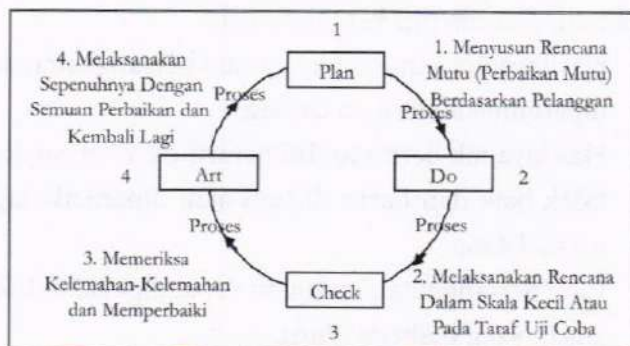
implikasi ia harus menjadi pelayan bagi pimpinan di yang ada level menengah. Begitupun pimpinan menengah harus melayani ustadz/ustadzah, dan ustadz/ustadzah harus melayani kebutuhan santrinya. Sehingga kalau diilustrasikan dalam sebuah gambar akan tampak sebagaimana berikut:



Kedua, respek terhadap setiap orang. Setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreatifitas tersendiri yang unik. Dengan begitu, setiap karyawan dipandang sebagai sumber daya organisasi yang paling bernilai. Karena itu, setiap karyawan dalam organisasi diperlakukan secara baik dan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. *Ketiga*, Manajemen berdasarkan fakta. Organisasi berorientasi pada fakta. Artinya bahwa setiap keputusan organisasi harus didasarkan pada data, bukan pada perasaan (*feeling*). Dua konsep pokok berkaitan dengan fakta; 1). Prioritisasi (*prioritization*), yaitu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Dengan demikian, dengan menggunakan data,

maka manajemen dan tim dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang vital. 2). Variasi (*variation*), atau variabilitas kinerja manusia. Data dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Dengan demikian manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan.

Keempat, Perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan merupakan hal yang penting bagi setiap lembaga. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh.⁴⁹ Lingkaran PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) disebut juga lingkaran Deming, karena Deminglah yang menciptakannya. Lingkaran itu menggambarkan proses-proses yang selalu terjadi dalam setiap kegiatan atau kinerja yang bermutu. Lingkaran itu bisa dilihat dalam gambar berikut:



⁴⁹ Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Management ... Op. Cit.*, 15.

Dalam setiap kegiatan atau usaha perbaikan mutu (kinerja bermutu), ada empat langkah yang dilakukan (empat proses) dan keseluruhannya merupakan lingkaran, yaitu:

1. *Plan* (P): Langkah pertama, menentukan masalah yang akan diatasi atau kelemahan yang akan diperbaiki dan menyusun rencana (solusi) untuk mengatasi masalah itu, yang berarti meningkatkan mutu.
2. *Do* (D): Langkah kedua, melaksanakan rencana pada taraf ujicoba dan memperhatikan semua prosesnya.
3. *Check* (C): Langkah ketiga, mengamati atau meneliti apa yang telah dilaksanakan dan menemukan kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, disamping hal-hal yang sudah benar dilakukan. Berdasarkan kelemahan-kelemahan itu disusun rencana perbaikan untuk dilaksanakan selanjutnya.
4. *Act* (A): Langkah keempat, melaksanakan keseluruhan rencana peningkatan mutu, termasuk perbaikan kelemahan-kelemahan tersebut pada nomor (3). Hasilnya diamati, dan ada tiga kemungkinan:
 - a. Hasilnya bermutu, sehingga cara bersangkutan dapat dipergunakan dimasa datang.
 - b. Hasilnya tak bermutu. Ini berarti cara bersangkutan tidak baik dan harus diganti atau diperbaiki lagi di masa datang.
 - c. Cara bersangkutan mungkin dapat dipakai untuk keadaan yang berbeda (lain).

Dengan demikian, proses sesungguhnya tidak berakhir pada langkah ke (4), tetapi kembali lagi pada langkah pertama

dan seterusnya. Proses-proses berupa lingkaran demikianlah yang terjadi dalam peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

Perbaikan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap kelayakan dan kinerja pesantren. Ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan upaya-upaya untuk memperbaikinya. Penilaian terhadap kelayakan dan kinerja yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pesantren secara berkesinambungan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan manajemen khususnya manajemen mutu pesantren. Dalam manajemen mutu ini sesuai fungsi manajemen yang dijalankan oleh manajer pendidikan di pesantren diarahkan untuk memberi kepuasan kepada pelanggannya (*customer*), baik pelanggan internal, eksternal yang primer, eksternal yang sekunder, dan eksternal yang tersier. Semua itu dilaksanakan agar penyelenggaraan pendidikan dapat memberi jaminan kepada para pelanggannya bahwa pendidikan yang diselenggarakannya adalah pendidikan bermutu.

Manajemen mutu itu pada hakekatnya, menggambarkan kepada semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian hingga kepemimpinan yang menentukan kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab, serta implementasinya melalui alat-alat manajemen, seperti perencanaan, pengendalian, penjaminan dan peningkatan mutu

-baca lingkaran PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) tersebut-. Dalam konsep absolut mutu menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan derajat “baik”nya suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan pelanggan pesantren.

Oleh sebab itu, penempatan pelanggan pesantren sebagai fokus utama akan menjadikan pesantren sebagai “abdi” yang melayani para *customernya*. Dengan demikian, struktur organisasi akan menjadi piramida terbalik yang menempatkan santri sebagai puncak piramida sebagai “tuan” bagi pesantren sendiri. Artinya adalah susunan organisasi berbentuk kerucut yang menempatkan kiai sebagai pucuk pimpinan tertinggi yang berada dibagian atas, menyusul pembantu kiai sebagai pimpinan tengah, ustadz/ustadzah dan karyawan pendukung, akan terbalik menjadi kiai yang menempati suksesi paling bawah sebagai “abdi” yang melayani santri sebagai “tuan”. Dalam *Total Quality Management* (TQM) bentuk kerucut terbalik ini yang menjadi keharusan dalam sistem pelayanan pendidikan pesantren. Konsekuensinya adalah pucuk pimpinan (kiai) berada di bawah, yang memberikan implikasi kiai harus menjadi pelayan bagi pimpinan di yang ada level menengah terutama kebutuhan pembelajaran santrinya, sebab hal ini merupakan keharusan bagi kiai untuk membentuk produk-produk santri yang berkualitas. Begitupun pimpinan menengah harus melayani ustadz/ustadzah, dan ustadz/ustadzah harus melayani kebutuhan santrinya.

Bersamaan dengan perkembangan masyarakat yang kian kompetitif, maka institusi pendidikan pesantren dituntut mampu memberikan atau menghasilkan produk yang berkualitas. Produk di institusi pendidikan pesantren utamanya berbentuk jasa⁵⁰. Dalam konteks ini, jasa sebagai produk layanan dalam organisasi pendidikan yang memenuhi kualitas atau mutu dapat dilihat dari beberapa aspek berikut; 1). Komunikasi (*communication*, yaitu komunikasi antara penerima jasa dengan pemberi jasa, 2). Kredibilitas (*credibility*), yaitu kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa, 3). Keamanan (*security*), yaitu keamanan terhadap jasa yang ditawarkan, 4). Pengetahuan kustomer (*knowing the customer*), yaitu pengertian dari pihak pemberi jasa pada penerima jasa atau pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan pemakai jasa, 5). Standar (*tangibles*, yaitu bahwa dalam memberikan pelayanan kepada kustomer harus dapat diukur atau dibuat standarnya, 6). Reliabilitas (*reliability*), yaitu konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji para penerima jasa, 7). Tanggapan (*responsiveness*), yaitu

⁵⁰ Jasa adalah meliputi segenap kegiatan ekonomi yang menghasilkan *output* (keluaran) berupa produk atau konstruksi (hasil karya) nonfisik, yang lazimnya dikonsumsi pada saat diproduksi dan memberi nilai tambah pada bentuk (*form*) seperti kepraktisan, kecocokan/kepantasan, kenyamanan, dan kesehatan, yang pada awalnya menarik cita rasa pada pembeli pertama. Sementara itu dalam konteks tulisan ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang bersifat kompleks karena bersifat padat karya dan padat modal. Artinya, dibutuhkan banyak tenaga kerja yang memiliki *skill* khusus dalam bidang pendidikan dan padat modal karena membutuhkan infrastruktur (peralatan) yang lengkap.

tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa, kompetensi (*competence*), yaitu kemampuan atau keterampilan pemberi jasa yang dibutuhkan setiap orang dalam organisasi untuk memberikan jasanya kepada penerima jasa, 9). Akses (*access*), yaitu kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh pihak penerima jasa, dan 10). Tata krama (*courtesy*), yaitu kesopanan, respek, perhatian, dan kesamaan dalam hubungan personel. Sementara itu, kualitas jasa juga memiliki beberapa sifat atau karakteristik, antara lain: 1). Subyektif, 2). Umumnya berukuran afektif, 3). Mengutamakan keperhatian, 4). Terdiri dari non-materi -bisa berupa reputasi, sikap, tata krama, dan lain-lain, 5). Tidak dapat dihitung secara kuantitatif, tetapi hanya bisa diyakini, dipercaya dan sebagainya.⁵¹

Dalam *Total Quality Management* (TQM) keberhasilan pesantren diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Pesantren dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan sama atau melebihi harapan pelanggan. Dilihat jenis pelanggannya, maka pesantren dikatakan berhasil jika:

1. Santri puas dengan layanan pesantren, antara lain puas dengan pelajaran yang diterima, puas dengan perlakuan oleh ustadz/ustadzah maupun kiai, puas dengan fasilitas yang disediakan oleh pesantren. Pendek kata, santri menikmati situasi pesantren.

⁵¹ DW. Ariani, *Manajemen Kualitas*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999), 9.

2. Orang tua santri puas dengan layanan terhadap anaknya maupun layanan kepada orang tua, misalnya puas karena menerima laporan periodik tentang perkembangan santri maupun program-program pesantren.
3. Pihak pemakai/penerima lulusan (sekolah/madrasah, perguruan tinggi umum maupun agama, industri, masyarakat) puas karena menerima lulusan dengan kualitas sesuai harapan
4. Ustadz/ustadzah dan karyawan pesantren puas dengan pelayanan pesantren, misalnya pembagian kerja (*job description*), hubungan antar ustadz/ustadzah/karyawan/kiai, gaji/honorarium, dan sebagainya.

Beragamnya kondisi lingkungan pesantren dan bervariasi kebutuhan santri di dalam proses pembelajaran ditambah lagi dengan kondisi geografi pesantren yang ada di Indonesia yang sangat kompleks, seringkali tidak dapat diapresiasi secara komprehensif oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu di dalam proses peningkatan mutu pendidikan pesantren perlu dicari alternatif pengelolaan pesantren. Hal ini mendorong lahirnya konsep manajemen peningkatan mutu berbasis pesantren. Manajemen alternatif ini memberikan kemandirian -walaupun fakta riilnya pesantren sejak awal berdirinya sudah mandiri atau otonom- kepada pesantren untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, tetapi masih tetap mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadist serta kebijakan pendidikan nasional. Konsekwensi dari pelaksanaan program ini adanya komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yaitu orang tua/

masyarakat, ustadz/ustadzah, kiai, santri dan staf atau karyawan lainnya di satu sisi dan pemerintah di sisi lainnya sebagai partner dalam mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan pesantren.

E. EPILOG

Perbaikan berkesinambungan atas kinerja organisasi pesantren secara menyeluruh hendaknya dijadikan sebagai sasaran tetap dari organisasi. Proses berkesinambungan adalah prinsip dasar di mana mutu menjadi pusatnya. Proses ini merupakan pelengkap dan yang menghidupkan prinsip orientasi proses dan prinsip fokus pada pelanggan. Sehingga dalam konteks ini, perbaikan berkesinambungan merupakan hal yang penting untuk peningkatan mutu pendidikan pesantren. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCA (*plan, do, check, act*).

Sehingga keputusan yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pendapat atau informasi lisan seringkali menimbulkan bias. Manajemen hendaknya membangun kebiasaan menggunakan fakta dan hasil analisis sebelum melakukan pengambilan keputusan. Fakta dapat diperoleh dengan wawancara, kuisioner, jajak pendapat, pengujian, analisis statistik, dan lain-lain yang memberikan hasil yang obyektif. Sehingga dalam mengerjakan sesuatu yang berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan dalam kerangka yang pasti, tepat waktu, dan seketika.

Maka pada tataran ini kemudian melahirkan hubungan simbiosis-mutualisme antara pesantren dan orang tua santri

sebagai pemasoknya yang saling bergantung dan saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan keduanya untuk menciptakan nilai. Organisasi manajemen mutu yang sukses menjalin hubungan yang kuat dengan para pemasok dan pelanggan untuk menjamin terjadinya perbaikan mutu pendidikan pesantren secara berkesinambungan dalam menghasilkan *out put* yang handal.

Prinsip-prinsip tersebut akan membentuk pola sistem manajemen pesantren yang *open system* pada peningkatan mutu pendidikan, sehingga produk pesantren mampu dikonstruksi untuk memiliki kemampuan yang tinggi dalam merespons tantangan dan tuntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu, dalam ranah nasional maupun internasional. Maka manajemen pesantren harus membuka diri dalam melihat perkembangan zaman yang juga akan merubah permintaan pelanggan terhadap mutu pendidikan. Di samping itu pesantren juga proaktif dan memberikan ruang bagi pembenahan dan pembaharuan sistem pendidikan pesantren dengan senantiasa apresiatif sekaligus selektif dalam menyikapi dan merespons perkembangan dan pragmatisme budaya yang kian menggejala. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan lain bagaimana seharusnya pesantren men-siasati fenomena tersebut. []



Bagian 7

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DAN PROFESIONALISME GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

A. PENDAHULUAN

Sampai dasawarsa terakhir yaitu di penghujung abad ke-20, dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dengan rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorientasi pada proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan,

baik industri, perbankan, telekomunikasi maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlaq, moral dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap lembaga pendidikan khususnya pada lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Ada anggapan bahwa pendidikan tidak lagi mampu menciptakan mobilitas sosial mereka secara vertikal, karena madrasah tidak menjanjikan pekerjaan yang layak. Madrasah kurang menjamin masa depan anak yang lebih baik. Perubahan paradigma baru pendidikan kepada mutu (*quality oriented*) merupakan salah satu strategi untuk mencapai pembinaan keunggulan pribadi anak bangsa.

Abad ke-21 merupakan momentum yang penuh tantangan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kita perlu mencari model baru manajemen pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan sekolah terlebih madrasah. Tak ada salahnya jika kita mempelajari usaha-usaha di bidang pendidikan dalam beberapa dekade terakhir abad ke-20 di negara maju, seperti Amerika, Jepang dan Inggris. Negara-negara tersebut merasa perlu menerapkan strategi baru di bidang manajemennya salah satunya dengan TQM (*Total Quality Management*) atau manajemen mutu terpadu dalam bidang pendidikan. Sebagai suatu sistem, TQM tidak hanya

mengikis problem pendidikan, tetapi sekaligus sebagai model yang mengutamakan perbaikan berkelanjutan. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan mengutamakan pencapaian harapan pelanggan melalui upaya perbaikan terus menerus, pembagian tanggung jawab dengan pegawai dalam rangka mengurangi pelajar yang keluar dari sekolah (*droup out*), tidak naik kelas dan tidak lulus.

Mengingat pentingnya TQM dalam pelaksanaan pendidikan yang berorientasi pada mutu (*quality oriented*), maka yang paling banyak berperan dalam hal ini adalah pendidik (guru) dalam upaya menyiapkan peserta didiknya yang berkualitas dan bermutu dalam berbagai aspek, baik dalam aspek keilmuan, keahlian dan keterampilan serta aspek *akhlaqul karimah*nya. Mengingat pentingnya peranan pendidik (guru), maka pembinaan dan pengembangan secara terus menerus terhadap pendidik (*continous improvement*) harus terus dilakukan agar supaya tercipta guru yang profesional dalam bidangnya, sehingga dengan mudah dapat menciptakan mutu lulusan yang sesuai dengan visi, misi dan target yang telah ditentukan oleh lembaganya.

B. PENGERTIAN MANAJEMEN MUTU TERPADU

Para ahli manajemen mengemukakan bahwa *Total Quality Management (TQM) is a philosophy and a methodology which assists institutions to manage change and to set their own agendas for dealing with the plethora of new external pressures*. Pendapat tersebut menekankan bahwa manajemen mutu terpadu merupakan suatu filsafat dan metodologi yang membantu berbagai institusi, terutama industri dalam me-

ngelola perubahan dan menyusun agenda masing-masing untuk menanggapi tekanan-tekanan faktor eksternal.¹

Bahkan dalam mendefinisikan kualitas produk, ada beberapa pakar utama dalam manajemen mutu terpadu (*Total Quality Manajemen*) yang saling berbeda pendapat, tetapi maksudnya sama. Diantara beberapa definisi tersebut adalah:

1. Menurut Crosby, kualitas adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produksi jadi.
2. Menurut Feigenbaum, kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.
3. Menurut Garvin, kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah sehingga kualitas produk juga harus berubah atau disesuaikan. Dengan perubahan kualitas produk tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan tugas, serta

¹ Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 29.

perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen.²

4. Sedangkan menurut Cafee dan Sherr menyatakan bahwa manajemen mutu terpadu adalah suatu filosofi komprehensif tentang kehidupan dan kegiatan organisasi yang menekankan perbaikan berkelanjutan sebagai tujuan fundamental untuk meningkatkan mutu, produktivitas dan mengurangi pembiayaan.³

Dari beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa *Total Quality Manajement* (TQM) memfokuskan pada suatu proses atau sistem pencapaian tujuan organisasi yang berorientasi pada *quality assurance, contract conformance, continous improvement and costumers driven*.⁴ Dengan dimulai dari proses perbaikan mutu, maka TQM diharapkan dapat mengurangi peluang membuat kesalahan dalam menghasilkan produk, karena produk yang baik adalah harapan para pelanggan. Jadi rancangan produk diproses sesuai dengan prosedur dan teknik untuk mencapai harapan pelanggan. Penggunaan metode ilmiah dalam menganalisis data diperlukan sekali untuk menyelesaikan masalah dalam peningkatan mutu. Partisipasi semua pegawai digerakkan agar mereka memiliki motivasi dan kinerja yang tinggi dalam mencapai tujuan kepuasan pelanggan.

² M.N. Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Manajement)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 16.

³ Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu ... Op. Cit.*, 29.

⁴ Stephen Murgatroyd and Colin Morgan, *Total Quality Manajement and The School*, (Buckingham – Philadelphia: Open University Press, 1994), 45.

C. KONSEP MANAJEMEN MUTU TERPADU DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN

Mengacu pada pengertian tentang TQM (*Total Quality Management*) atau manajemen mutu terpadu, dapat diketahui bahwa dalam manajemen mutu terpadu menekankan pada dua konsep utama. Pertama, sebagai suatu filosofi perbaikan terus menerus (*continous improvement*),⁵ dan kedua berhubungan dengan alat-alat dan teknik seperti "*brainstorming*" dan "*force field analysis*" (analisis kekuatan lapangan), yang digunakan untuk perbaikan kualitas dalam tindakan manajemen untuk mencapai kebutuhan dan harapan pelanggan.

Berarti manajemen mutu dalam pendidikan dapat saja disebutkan "mengutamakan pelajar" atau "program perbaikan sekolah", yang mungkin dilakukan secara kreatif dan konstruktif. Penekanan yang paling penting bahwa mutu terpadu dalam programnya dapat mengubah kultur sekolah. Para pelajar dan orang tuanya menjadi tertarik terhadap perubahan yang ditimbulkan manajemen mutu terpadu melalui berbagai program perbaikan mutu.

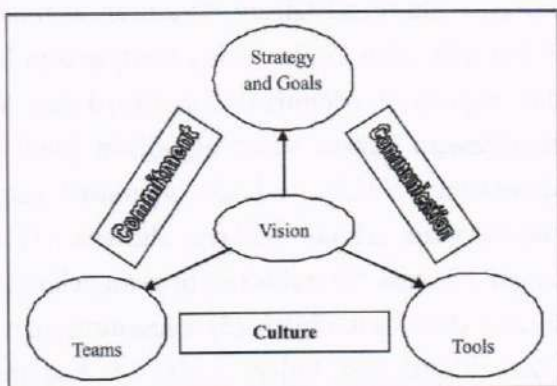
Aktualisasi *Total Quality Management* (TQM) dalam lembaga pendidikan didasarkan pada lima kata kunci, yaitu: 1). Visi (*vision*); 2). Strategi dan tujuan (*strategy and goals*); 3). Tim (*teams*); 4). Alat (*tools*); dan 5). Three Cs of TQM (3 Cs), yang meliputi budaya (*culture*), komitmen (*commitment*), dan komunikasi (*communication*). Kelima kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁵ Herbert, *Total Quality Manajement in Bussiness School*, (Autumn: The Faculty ViewPoint, 1995), 20-22.

1. Visi (*vision*). Visi merupakan suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, yaitu angan-angan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi yang sifatnya masih abstrak dan merupakan cermin masa depan.
2. Strategi dan tujuan (*strategy and goals*). Strategi merupakan program luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi, respon organisasi pada lingkungannya sepanjang waktu. Tujuan (*goals*), merupakan sasaran yang diusahakan untuk dicapai oleh suatu lembaga. Lembaga seringkali mempunyai lebih dari satu sasaran, di mana sasaran merupakan elemen dasar dari suatu lembaga.
3. Tim (*teams*), terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi menuju ke sasaran yang sama.
4. Alat (*tools*) adalah sarana fisik seperti komputer, buku, printer atau berupa rumus, bagan, diagram, grafik dan sebagainya yang berfungsi untuk memecahkan persoalan yang ada.
5. *Three Cs of TQM* (3Cs) yang meliputi:
 - a. Budaya (*culture*) adalah aturan-aturan, asumsi-asumsi dan nilai-nilai implisit yang menyatukan lembaga atau organisasi. Menurut Murgatroyd dan Morgan, menjelaskan bahwa suatu organisasi *Total Quality Management* (TQM) adalah organisasi yang telah menciptakan sebuah budaya, dimana (1) inovasi sangat dihargai, (2) status merupakan pelengkap bagi kinerja dan kontribusi, (3) kepemimpinan merupakan fungsi aksi, bukan posisi, (4) hadiah dibagi

rata atas kerja tim, (5) pengembangan program belajar dan pelatihan dipandang sebagai suatu yang penting bagi kelanjutan organisasi atau lembaga, (6) pemberdayaan kembali dalam mencapai tujuan yang menantang dengan didukung oleh pengembangan dan kesuksesan yang berkelanjutan yang memungkinkan keadaan dalam memotivasi diri.

- b. Komitmen (*commitment*), dalam arti yang luas adalah mengambil resiko guna mencapai tujuan, bekerja dengan sistematis demi menjaga yang lain dan kesempatan untuk memotivasi dan berkembang.
- c. Komunikasi (*communication*), dalam menjalankan organisasi TQM dengan sukses, komunikasi di dalam dan antar anggota kuat, simpel atau sederhana dan efektif serta berdasarkan kenyataan dan saling memahami, bukan berdasarkan rumor atau asumsi. Artinya, komunikasi berjalan dengan apa adanya, tidak mengada-ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



D. GURU DAN TANTANGAN PROFESIONALISME PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu. Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan (*vocational*), yang kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh tiga hal: keahlian, komitmen, dan keterampilan,⁶ yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme.⁷

Senada dengan hal itu, secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

⁶ Hamzah B. Uno mendefinisikan keterampilan adalah kemampuan dalam melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental. Hamzah B. Uno, *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 130.

⁷ Mc Leod, seperti yang dikutip oleh Muhibbin Syah mengatakan bahwa profesional adalah kata sifat dari kata "*profession*" (pekerjaan) yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional kurang lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesi dengan menggunakan profesiensi sebagai mata pencaharian. Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 230.

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (pasal 39 ayat 1).⁸

Lantas, acuan normatif ini ditindaklanjuti dengan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 Ayat 1: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".⁹

Profesi kependidikan dan/atau keguruan pada kenyataannya dapat disebut sebagai profesi yang sedang tumbuh (*emerging profession*) yang tingkat kematangannya belum sampai pada apa yang telah dicapai oleh profesi-profesi tua (*old profession*) seperti: kedokteran, hukum, notaris, farmakologi, dan arsitektur. Selama ini, di Indonesia, seorang sarjana pendidikan atau sarjana lainnya yang bertugas di institusi pendidikan dapat mengajar mata pelajaran apa saja, sesuai kebutuhan (*need*) atau kekosongan guru mata pelajaran di sekolah itu, cukup dengan "surat tugas" dari kepala sekolah.

Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab lemahnya profesi guru di Indonesia. Adapun kelemahan-kelemahan lainnya yang terdapat dalam profesi keguruan di Indonesia setelah dipetakan, antara lain berupa: (1) Masih rendahnya kualifikasi pendidikan guru dan tenaga kependidikan; (2)

⁸ *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2007), 25.

⁹ *Ibid.* Hal: 73

Sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang belum terpadu; (3) Organisasi profesi yang rapuh; serta (4) Sistem imbalan dan penghargaan yang kurang memadai.

Keterpurukkan profesi guru tersebut diperparah dengan pengakuan masyarakat terhadap eksistensi guru yang kurang mendapatkan apresiasi, sebab kenyataannya masyarakat masih tetap mengakui profesi guru lebih rendah dibandingkan dengan profesi dokter dan hakim. Nana Sudjana, seperti yang dikutip oleh Moh. Uzer Usman mengatakan bahwa rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi guru disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya pandangan sebagian masyarakat, bahwa siapa pun dapat menjadi guru asalkan ia berpengetahuan.
2. Kekurangan guru di daerah terpencil, memberikan peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai keahlian menjadi guru.
3. Banyak guru yang belum menghargai profesinya, apabila berusaha mengembangkan profesinya itu. Perasaan rendah diri karena menjadi guru, penyalahgunaan profesi untuk kepuasan dan kepentingan pribadinya, sehingga wibawa guru semakin merosot.¹⁰

Namun secara riil, eksistensi dan esensi guru dalam lingkup pendidikan sangat urgen. Apalagi bagi suatu bangsa yang sedang membangun, terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa ditengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan akselerasi teknologi yang semakin

¹⁰ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 2.

canggih dan segala pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk mengadaptasikan diri. Hal itu berarti, posisi guru semakin akurat para guru melaksanakan fungsinya, semakin terjamin terkonstruksinya dan juga terbina kesiapan dan keandalan seseorang manusia pembangunan. Dengan kata lain, potret dan wajah diri wajah bangsa di masa depan tercermin dari "potret diri"¹¹ para guru masa kini, dan gerak maju dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para guru di tengah-tengah masyarakat.

¹¹ Dalam hal ini, secara esensial guru yang mempunyai tingkat kualitas diri yang tinggi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi profesional, sedangkan menurut Muhibbin Syah diklasifikasikan menjadi tiga kompetensi yaitu kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor. Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan ...* Op. Cit., 130. Dengan kepribadian dan Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan, maka kualitas pendidikan suatu bangsa akan terjamin untuk masa yang akan datang. Dari kualitas Sumber Daya Manusia dan output Perguruan Tinggi inilah, H. A. R. Tilaar mengatakan harus adanya upaya kontrol lembaga Pendidikan Tinggi terhadap outputnya. H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 99. Akan tetapi dalam upaya yang kongkrit-praksis untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Depdiknas telah terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan Indonesia. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan juga Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia.

Dalam konteks pembelajaran yang merupakan tugas pokok guru, maka tugas guru dalam rangka mengoptimalkan adalah sebagai fasilitator yang mampu mengembangkan kemauan belajar peserta didik, mengembangkan kondisi belajar yang relevan agar tercipta suasana belajar secara wajar dengan penuh kegembiraan dan mengadakan pembatasan positif terhadap dirinya sebagai seorang pengajar. Tanggung jawab guru yang terpenting ialah merencanakan dan menuntut peserta didiknya melakukan kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan.¹² Dengan demikian pembelajaran bersifat *pupil centered* dan guru berperan sebagai *manager learning*.¹³ Untuk menghasilkan sebuah pembelajaran, pendidik memiliki peran yang sangat urgen, sebab guru merupakan pengelola proses pembelajaran.

Dengan demikian, guru dalam proses pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan berfungsi sebagai mediator dalam penyampaian materi-materi yang diajarkan kepada peserta didik, untuk kemudian ditindak lanjuti oleh peserta didik dalam kehidupan nyatanya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dalam proses pembelajaran ini, untuk menjadi guru yang profesional, hendaknya guru memiliki dua kategori, yaitu *capability* dan *loyalty*, artinya guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang

¹² Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 127.

¹³ Nasution, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, (Bandung: Jemmars, 1986), 10.

mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi dan memiliki loyalitas keguruan, yakni loyal kepada tugas-tugas keguruan yang tidak semata-mata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah kelas.¹⁴

Pekerjaan guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Menurut Usman, tugas profesi guru meliputi: mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan kepada anak didik. Sementara tugas sosial guru tidak hanya terbatas pada masyarakat saja, akan tetapi lebih jauh guru adalah orang yang diharapkan mampu mencerdaskan bangsa dan mempersiapkan manusia-manusia yang cerdas, terampil dan beradab yang akan membangun masa depan bangsa dan negara. Semakin akurat para guru melaksanakan fungsinya, semakin terjamin tercipta dan terbinanya sumber daya manusia yang andal dalam melakukan pembangunan bangsa.¹⁵

Secara sederhana tanggung jawab guru adalah mengarahkan dan membimbing para murid agar semakin meningkat pengetahuannya, semakin mahir keterampilannya dan semakin terbinakan dan berkembang potensinya. Dalam hubungan ini ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa

¹⁴ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana, 2004), 112.

¹⁵ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional ... Op. Cit.*, 7.

guru yang baik adalah guru yang mampu melaksanakan *inspiring teaching*,¹⁶ yaitu guru yang melalui kegiatan mengajarnya mampu mengilhami murid-muridnya. Melalui kegiatan mengajar yang dilakukannya seorang guru mampu mendorong para siswa agar mampu mengemukakan gagasan-gagasan besar dari murid-muridnya.

Persoalan guru dalam dunia pendidikan senantiasa mendapat perhatian besar dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah memandang mereka sebagai media yang sangat penting, artinya bagi pembinaan dan pengembangan bangsa. Mereka adalah pengemban tugas-tugas sosial kultural yang berfungsi mempersiapkan generasi muda sesuai dengan cita-cita bangsa. Sementara masyarakat memandang pekerjaan guru merupakan pekerjaan istimewa yang berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lain.¹⁷ Dalam pandangan masyarakat, pekerjaan guru bukan semata-mata sebagai mata pencaharian belaka yang sejajar dengan pekerjaan tukang kayu atau pedagang atau yang lain. Pekerjaan guru menyangkut pendidikan anak, pembangunan negara dan masa depan bangsa.

Masyarakat menaruh harapan besar pada guru guna melahirkan generasi masa depan yang lebih baik. Mereka diharapkan menjadi suri tauladan bagi anak didiknya dan mampu membimbing mereka menuju pola hidup yang menjunjung tinggi moral dan etika. Guru telah diposisikan

¹⁶ Mochtar Buchori, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Rerungan*, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Perss, 1994), 37.

¹⁷ Oemar Hamalik, *Sistem dan Prosedur Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan*, (Bandung: Trigenda Karya, 1991), 23.

sebagai faktor terpenting dalam proses belajar mengajar. Kualitas dan kompetensi guru dianggap memiliki pengaruh terbesar terhadap kualitas pendidikan.¹⁸ Oleh sebab itu, sudah sewajarnya apabila guru dituntut untuk bertindak secara profesional dalam melaksanakan proses belajar mengajar guna meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka lakukan. Tuntutan seperti ini sejalan dengan perkembangan masyarakat modern yang menghendaki bermacam-macam spesialisasi yang sangat diperlukan dalam masyarakat yang semakin lama semakin kompleks. Tuntutan kerja secara profesional juga dimaksudkan agar guru berbuat dan bekerja sesuai dengan profesi yang disandangnya.

Berbicara tentang kerja yang profesional mengharuskan kita untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian profesi sebagai bentuk dasar kata profesional tersebut. Menurut Volmer dan Mills bahwa pada dasarnya profesi adalah sebagai suatu spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh melalui studi dan training, bertujuan men-*suplay* keterampilan melalui pelayanan dan bimbingan pada orang lain untuk mendapatkan bayaran (*fee*) atau (*salary*) gaji. Dalam prespektif sosiologi, bahwa profesi itu sesungguhnya suatu jenis model atau tipe pekerjaan ideal, karena dalam realitasnya bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya.

Sedangkan profesionalisme adalah proses usaha menuju kearah terpenuhinya persyaratan suatu jenis model pekerjaan ideal berkemampuan, mendapat perlindungan, memiliki kode etik profesionalisasi, serta upaya perubahan

¹⁸ Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1999), 96.

struktur jabatan sehingga dapat direfleksikan model profesional sebagai jabatan elit. Sedangkan profesi itu sendiri pada hakekatnya adalah sikap bijaksana (*informend responsiveness*) yaitu pelayanan dan pengabdian yang dilandasi oleh keahlian, kemampuan, teknik dan prosedur yang mantap diiringi sikap kepribadian tertentu.¹⁹

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa sebuah profesi mengandung sejumlah makna yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan
2. Profesi dipilih oleh seseorang atas kesadaran yang dalam
3. Dalam profesi terkandung unsur pengabdian

Dengan demikian, bekerja secara profesional berarti bekerja secara baik dan dengan penuh pengabdian pada satu pekerjaan tertentu yang telah menjadi pilihannya. Guru yang profesional akan bekerja dalam bidang kependidikan secara optimal dan penuh dedikasi guna membina anak didiknya menjadi tenaga-tenaga terdidik yang ahli dalam bidang yang menjadi spesialisnya. Hal ini dengan sendirinya menuntut adanya kemampuan atau keterampilan kerja tertentu. Dari sisi ini, maka keterampilan kerja merupakan salah satu syarat dari suatu profesi. Namun tidak setiap orang yang memiliki keterampilan kerja pada satu bidang tertentu dapat disebut sebagai profesional. Keterampilan kerja yang profesional didukung oleh konsep dan teori terkait. Dengan dukungan teori ini memungkinkan orang yang bersangkutan tidak saja

¹⁹ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2000), 197.

menguasai bidang itu, akan tetapi juga mampu memprediksi dan mengontrol suatu gejala yang dijelaskan oleh teori itu. Atas dasar inilah, maka pekerjaan profesional memerlukan pendidikan dan latihan yang bertaraf tinggi yang kalau diukur dari jenjang pendidikan yang ditempuh memerlukan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.²⁰ Dengan berbekal profesionalisme yang tinggi pada setiap tersebut, maka dunia pendidikan di Indonesia akan menjadi terangkat.

Namun dewasa ini, dunia pendidikan kita sedang dilanda krisis “profesionalisme guru”, khususnya yang terjadi pada lembaga pendidikan Islam, karena disebabkan oleh berbagai hal. Hal tersebut menjadi belenggu bagi terciptanya suatu tatanan pendidikan yang mapan dalam upaya penciptaan mutu lulusan yang *capabel* di bidang keilmuannya, skillnya dan bahkan akhlaqnya.

Krisis profesionalisme guru dalam dunia lembaga pendidikan Islam disebabkan karena kurangnya kesadaran guru akan jabatan dan tugas yang diembannya serta tanggung jawab keguruannya. Guru hanya menganggap “mengajar” sebagai kegiatan untuk mencari nafkah semata atau hanya untuk memperoleh *salary* dan sandang pangan demi *survival* fisik jangka pendek, agaknya akan berbeda dengan cara seseorang yang memandang tugas atau pekerjaannya sebagai *calling profesio* dan amanah yang hendak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.²¹

²⁰ Muhammad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 22-23.

²¹ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 118.

Disamping itu munculnya sikap malas dan tidak disiplin waktu dalam bekerja dapat bersumber dari pandangannya terhadap pekerjaan dan tujuan hidupnya. Karena itu, adanya etos kerja yang kuat pada seseorang guru memerlukan kesadaran mengenai kaitan suatu pekerjaan dengan pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh dan memberinya keinsyafan akan makna dan tujuan hidupnya.

Hal yang mempengaruhi terhadap lemahnya sikap profesionalisme dan etos kerja guru disebabkan oleh dua faktor penting:

1. Faktor pertimbangan internal, yang menyangkut ajaran yang diyakini atau sistem budaya dan agama, semangat untuk menggali informasi dan menjalin komunikasi
2. Faktor pertimbangan eksternal yang menyangkut pertimbangan historis, termasuk di dalamnya latar belakang pendidikan dan lingkungan alam di mana ia hidup, pertimbangan sosiologis atau sistem sosial di mana ia hidup dan pertimbangan lingkungan lainnya, seperti lingkungan kerja lainnya.

Dalam konteks pertimbangan eksternal, terutama yang menyangkut lingkungan kerja, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi semangat kinerja guru, yaitu: (1) volume upah yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang (2) suasana kerja yang menggairahkan atau iklim yang ditunjang dengan komunikasi demokrasi yang serasi dan manusiawi antara pimpinan dan bawahan (3) penanaman sikap dan pengertian di kalangan pekerja (4) sikap jujur dan dapat dipercaya dari kalangan pimpinan terwujud dalam kenyataan

(5) penghargaan terhadap *need for achievement* (hasrat dan kebutuhan untuk maju) atau penghargaan terhadap yang berperstasi (*reward and punishment*) dan (6) sarana yang menunjang bagi kesejahteraan mental dan fisik.²²

E. AKTUALISASI TQM DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Tuntutan agar guru bekerja secara profesional tidak mungkin diabaikan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan zaman. Guna memenuhi tuntutan tersebut, maka diperlukan aktualisasi *Total Quality Management* (TQM) dalam proses penyiapan dan peningkatan profesionalisme guru pada lembaga pendidikan Islam. Dalam memenuhi tuntutan profesional yang berlandaskan pada *Total Quality Management* (TQM), maka dalam hal ini guru diharapkan memiliki suatu kompetensi tertentu yang dapat mengarah kepada perbaikan secara terus menerus (*continous improvement*), menjamin terhadap kualitas pengajaran dan pembelajarannya (*quality assurance*) dan kepuasan konsumen pendidikan (*costumer satisfaction*). Kompetensi yang dimaksud adalah hal-hal yang memiliki indikator sebagai berikut:

1. Kompetensi ditunjang oleh latar belakang pengetahuan
2. Kompetensi dapat dikenali dari adanya penampilan dalam melakukan pekerjaan itu sesuai dengan tuntutan
3. Dalam melakukan kegiatan itu digunakan prosedur dan teknik yang jelas dan nalar

²² *Ibid.*, 119.

4. Dapat dikenalnya hasil pekerjaan yang dicapai

Dengan melihat indikator tersebut di atas, dapat dipahami bahwa kompetensi menggambarkan adanya ketrampilan dan kecakapan khusus yang ditunjang oleh konsep atau teori. Apabila hal ini dikaitkan dengan pekerjaan guru di lapangan, maka kita perlu mengetahui kompetensi-kompetensi apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengenalan terhadap kompetensi-kompetensi tersebut dalam rangka memahami dan mengukur serta mempersiapkan tenaga pengajar yang berkualitas yang mampu melakukan kerja secara efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar sehingga dapat melahirkan produk dan output yang berkualitas pula.

Secara umum, aktualisasi *Total Quality Management* (TQM) berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru pada lembaga pendidikan Islam dalam menyiapkan kompetensi guru merujuk kepada tiga faktor utama, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi kemasyarakatan. Dengan mengutip kriteria yang ditetapkan oleh *Asian Institute for Teacher Educators*, ia merumuskan perincian kompetensi seorang guru sebagai berikut :

1. Kompetensi pribadi yang berkaitan dengan:
 - a. Pengetahuan tentang adat istiadat (sosial dan agama).
 - b. Pengetahuan tentang tradisi dan budaya.
 - c. Pengetahuan tentang inti demokrasi.
 - d. Pengetahuan tentang estetika.
 - e. Apresiasi dan kesadaran sosial.

- f. Sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan.
 - g. Setiap pada harkat dan martabat manusia.
2. Kompetensi mata pelajaran, yakni mempunyai pengetahuan yang memadai tentang mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Kompetensi profesional, mencakup kemampuan dalam hal:
- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan, baik filosofis, psikologis maupun landasan lainnya.
 - b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku anak.
 - c. Mampu menangani mata pelajaran yang ditugaskan kepadanya.
 - d. Mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai.
 - e. Dapat menggunakan berbagai alat pelajaran dan fasilitas belajar lain.
 - f. Dapat mengorganisasi dan melaksanakan program pengajaran.
 - g. Dapat melaksanakan evaluasi.
 - h. Dapat menumbuhkan kepribadian anak.

Kompetensi yang ditetapkan di atas memberikan penegasan tentang tugas dan fungsi guru yang diharapkan mampu memahami tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakatnya disamping menguasai bidang ilmu yang menjadi spesialisnya serta diharapkan memiliki kapabilitas

untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi dan budaya serta ilmu pengetahuan tersebut kemudian mentransfer dan menanamkannya pada anak didik melalui proses pendidikan yang efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan kriteria profesional dalam perspektif *Total Quality Management* (TQM) tersebut, maka tuntutan agar guru bertindak secara profesional tidak dapat dilepaskan dari peranan pimpinan lembaga pendidikan dalam melakukan pembinaan secara terus menerus (*continous improvement*) terhadap para guru guna meningkatkan keprofesionalannya. Kepemimpinan disini menurut Edward Sallis diartikan sebagai *leadership is the essential ingredient in TQM. Leader must have the vision and be able to translate into clear policies and a specific goals.*²³ Kepemimpinan sebagai alat untuk menerapkan manajemen mutu terpadu, seorang pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya harus memiliki visi (pandangan jauh ke depan) dan dapat memindahkannya ke dalam kebijakan-kebijakan yang jelas dan tujuan khusus organisasi.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pemimpin adalah menangani mutu pembelajaran dan mendukung para staf yang berusaha mencapainya dalam mewujudkan visi dan misi lembaganya. Untuk itu, para guru perlu diberdayakan agar mereka dapat memberikan kreativitas dan inisiatif untuk meraih mutu yang mengarah pada *quality assurance, continous improvement and cotumer satisfaction*. Untuk me-

²³ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan Page Educational Management Series, 1993), 86.

ngetahui keterkaitan antar pemimpin dan pendidik (guru) dalam perspektif TQM guna meningkatkan profesionalisme guru pada lembaga pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai berikut :



Mengingat pentingnya pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan dalam melakukan pembinaan secara kontinu untuk meningkatkan profesionalisme guru yang ditunjang dengan pembentukan iklim organisasi yang kondusif, diperlukan pula tim yang mengurus terhadap setiap problematika yang dihadapi oleh guru berkaitan dengan upaya peningkatan profesionalitasnya, agar supaya pemenuhan terhadap kebutuhan pelanggan pendidikan menjadi maksimal.

Dalam hal ini, pemimpin lembaga pendidikan dituntut memahami secara seksama akan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kepemimpinannya dan upaya peningkatan kualitas dan mutu lembaga pendidikannya agar tetap *survive* dan mampu memenuhi terhadap tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman.

F. KESIMPULAN

Total Quality Manajement (TQM) dalam aktualisasinya pada lembaga pendidikan memfokuskan pada suatu proses atau sistem pencapaian tujuan organisasi yang berorientasi pada *quality assurance, contract conformance, continous improvement and costumer driven*. Dengan demikian, guru dituntut untuk bertindak secara profesional dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien dengan dedikasi yang tinggi guna meningkatkan kualitas pendidikan agar tercipta suatu produk yang memiliki kualitas dan mutu yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aktualisasi *Total Quality Management* (TQM) berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru pada lembaga pendidikan Islam harus mengacu kepada kompetensi guru yang merujuk kepada tiga faktor utama, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi kemasarakatan. Oleh sebab itu, guna menciptakan guru yang profesional dalam perspektif *Total Quality Management* (TQM) tidak dapat dilepaskan dari peranan pimpinan lembaga pendidikan yang visioner dalam menciptakan suasana organisasi kelembagaan yang kondusif, inovatif dan dinamis dan bertanggung jawab. []



Bagian 8

PEMIKIRAN FILOSOFIS MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM:

Suatu Pemikiran Teoritis untuk Catatan Epilog

Pemikiran dalam buku ini muncul dengan tema yang masih sangat baru dalam kancah pemikiran pendidikan Islam yaitu manajemen pendidikan Islam. Dan kita sangat memaklumi dan menyadari bahwa dalam kehidupan berkeluarga, berorganisasi, bermasyarakat, dan bernegara, manajemen merupakan upaya yang sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Apalagi dalam lingkup pendidikan yang merupakan salah satu faktor penting (vital) dalam kehidupan manusia sudah semestinya mendapatkan perhatian penting dalam hal manajemennya. Pendidikan merupakan salah satu komponen dalam pembangunan Nasional, bahkan pendidikan pula yang akan melahirkan dan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM)

sebagai aktor pembangunan di negara ini. Oleh karena itu, mutu pendidikan menjadi sangat penting untuk diperhatikan dan diprioritaskan terutama dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas dewasa ini yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Dan dengan demikian tidak berlebihan jika mengatakan bahwa pendidikan yang baik merupakan tolok ukur bagi sebuah bangsa atau negara dalam hal kemajuan yang di capai tidak terkecuali dalam Islam.¹

Begitu juga dalam lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan masjid, manajemen merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam yang telah menjadi “konsensus bersama” bagi umat Islam. Fakta ini yang kemudian memunculkan suatu bentuk pemikiran bahwa lembaga pendidikan Islam dalam pengelolaannya tidak lepas dari manajemen sebagai alat untuk mengelola proses pendidikan Islam dalam rangka mencapai mutu dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tersebut. Upaya yang demikian akan menunjang akselerasi pembangunan bangsa dan negara, yang dalam konteks Indonesia dengan tingkat pendidikan yang baik dan bermutu maka berbagai program reformasi akan tercapai untuk membangun masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan dapat hidup dalam *knowledge society* seperti yang dicita-citakan dalam UUD 1945.²

¹ H.D Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan*, (Bandung: Falah Production, 2004), ii.

² H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Terra Indonesia, 1999), 25.

Apalagi dengan adanya dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional yang secara eksplisit mengakui lembaga pendidikan Islam dari tingkat dasar sampai pendidikan menengah (RA, MI, MTs, MA dan MAK) sebagaimana tercantum dalam pasal 17, 18 dan 28³ serta pendidikan keagamaan (*religious education*) berupa pesantren (pasal 30 ayat 4)⁴ merupakan momentum nasional bahwa pendidikan agama sangat diperhatikan dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dan sudah seharusnya momentum ini dapat dijadikan para pengelola pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam mengelola lembaga pendidikan Islam. Karena salah satu kunci sukses siswa dalam belajar adalah berada di lingkungan pendidikan yang profesional dan kondusif.

Pendidikan dalam Islam sudah semestinya dikelola dan *dimanage* dengan sebaik-baiknya. Manajemen pendidikan

³ Pasal 17 ayat 2 UUSPN 2003 itu menyebutkan: "Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat." Pasal 18 ayat 3 UUSPN 2003 menyebutkan, bahwa "pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat." Pasal 28 ayat 3 UUSPN 2003 menyebutkan: "Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudlatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat".

⁴ Dalam Pasal 30 ayat 4 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas disebutkan: "Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pahlaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis." Berdasarkan pasal tersebut, sistem pendidikan pesantren secara eksplisit sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Islam merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat dari keterbelakangan baik secara moral, materi, dan spiritual.⁵ Dalam Islam, manajemen adalah hal yang sangat penting. Hal ini tampak dalam ungkapan bijak, seperti ungkapan: “*sesuatu yang haq yang tidak di organisir terkadang dikalahkan oleh sesuatu yang batil yang terorganisir*”.

Ungkapan tersebut merupakan acuan normatif dalam memperbaiki pengelolaan pendidikan Islam kedepan. Harus diakui, bahwa kurang tertariknya masyarakat dalam memilih lembaga-lembaga pendidikan Islam, sebenarnya bukan karena telah terjadi pergeseran nilai atau ikatan keagamaannya mulai memudar. Hal itu lebih banyak karena lembaga pendidikan Islam tersebut kurang menjanjikan (*promising*) dan kurang responsif terhadap tuntutan masyarakat. Paling tidak ada tiga alasan yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih suatu lembaga pendidikan untuk menyekolahkan anak-anak mereka, yaitu: 1). Cita-cita dan gambaran hidup masa depan; 2). Posisi dan status sosial; serta 3) Agama.⁶ Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam perlu melakukan rekonstruksi pada ranah manajemen yang lebih responsif terhadap tuntutan *steakholders* dan juga konsumen pendidikan Islam.

⁵ Sulistryorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (diktat), (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2005), 4.

⁶ A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), 1998), 8.

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris dari kata kerja “to manage” yang sinonimnya antara lain; “to hand’ berarti mengurus, “to control” berarti memeriksa, “to guide” berarti memimpin.⁷ Dalam kamus istilah populer, kata manajemen mempunyai arti pengelolaan usaha, kepengurusan, ketatalaksanaan, penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan direksi.⁸ Dengan demikian manajemen secara bahasa adalah pengurusan, pengaturan, penggerakan dan pengelolaan.

Menurut George R. Terry manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan; perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggiatan (*Actuating*), dan juga pengawasan (*Controlling*), yang lebih populer dengan istilah POAC.⁹ Ini semua dilakukan untuk menentukan atau mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia (SDM), dan juga sumber-sumber lainnya.

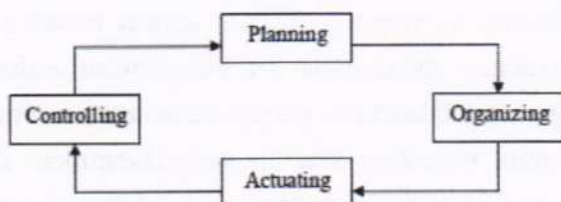
Melaluiempattahapanitulahmanajemen dapatbergerak, tentunya hal itu juga bergantung tingkat kepemimpinan seorang manajer. Artinya adalah proses manajerial sebuah organisasi akan bergerak apabila para manajernya mengerti

⁷ John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1996), 372.

⁸ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 434.

⁹ Lebih detailnya lihat dalam Jawahir Tanthowi, *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), 10. Bandingkan dengan Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 49-107.

dan paham secara benar akan apa yang dilakukannya (prinsip POAC). Proses tersebut jika digambarkan sebagai berikut:¹⁰



Dan secara terminologi paradigma manajemen sering disandingkan dengan administrasi, sehingga muncul 3 pandangan yang berbeda: 1). Memandang administrasi lebih luas dari pada manajemen; 2). Mengartikan manajemen lebih luas dari pada administrasi; 3). Menganggap manajemen sama dengan administrasi.¹¹ Dalam penulisan selanjutnya istilah manajemen sama dengan administrasi, karena keduanya mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk mengurus dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Pada tataran ini bisa dikatakan bahwa manajemen adalah suatu aktivitas yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengerahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dalam suatu organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara institusional maupun nasional.

¹⁰ A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 73.

¹¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 19.

Maka pada kerangka ini manajemen dapat diartikan suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin kerja sama, partisipasi dan keterlibatan sejumlah orang dalam mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang ditetapkan secara efektif. Manajemen mengandung unsur bimbingan, pengarahan, dan pengarahannya sekelompok orang terhadap pencapaian sasaran umum. Sebagai proses sosial, manajemen meletakkan fungsinya pada interaksi orang-orang, baik yang berada di bawah maupun berada di atas posisi operasional seseorang dalam suatu organisasi¹² pendidikan.

Sedangkan manajemen pendidikan¹³ adalah aktifitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Manajemen pendidikan merupakan suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan, seperti tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum,

¹² Soegabio Admodiwiro, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT Arda Dizya Jaya, 2000), 5. Dikatakan sebagai proses sosial sebab setiap manusia akan saling memerlukan dalam memenuhi kebutuhannya. Antara sesama manusia juga dituntut untuk saling bekerja sama, saling menghargai dan menghormati untuk mempertahankan hidupnya di muka bumi ini. Adanya alasan sosial (*social reasons*) ini menjadi salah satu pendorong bagi manusia untuk membentuk suatu perkumpulan yang biasa disebut "organisasi". Organisasi ini amat dibutuhkan untuk mewujudkan setiap cita-cita yang disepakati oleh anggota organisasi secara bersama. Oleh karena itu, organisasi tumbuh dan berkembang begitu pesat di tengah-tengah masyarakat. Organisasi itu juga dibentuk dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemerintahan, perusahaan, politik, hukum, ekonomi, dan termasuk bidang pendidikan.

¹³ Lebih detailnya lihat dalam E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Menyuksekan MBS dan KBK*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

dana, sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana, dan lingkungan. Pendapat yang lain manajemen pendidikan dirumuskan sebagai mobilisasi segala sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Sedangkan manajemen pendidikan Islam menurut Sulistyorini adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) muslim dan manusia dalam mengerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.¹⁴ Senada sebagaimana pengertian tersebut, Muhaimin mengatakan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah bagaimana menggunakan dan mengelola sumberdaya pendidikan Islam secara efektif untuk mencapai tujuan pengembangan, kemajuan, dan kualitas proses dan hasil pendidikan Islam itu sendiri.¹⁵ Namun, proses menggunakan dan mengelola sumberdaya untuk mencapai tujuan tersebut tidak lepas dari nilai-nilai normatif yang menjadi ciri khas dari Islam itu sendiri.

Cantolan ini yang membentuk sisi normatif dari pendidikan Islam sebagai dasar etik-normatifnya yaitu al-Qur'an dan al-Hadist yang membentuk teori-teori pendidikan guna membangun generasi bangsa yang *kaffah*. Demikian pula dengan manajemen pendidikan Islam yang harus dijadikan landasan normatif dalam menentukan dasar dan tujuannya tidak bisa dilepaskan dari aspek normatif tersebut. Apalagi

¹⁴ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam ... Op. Cit.*, 20.

¹⁵ Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, (Bandung: Nuan-sa Baru, 2003), 312-313.

banyak ayat-ayat al-Qur'an yang bisa menjadi dasar adanya manajemen dalam pendidikan (Islam). Ayat-ayat tersebut bisa dipahami setelah diadakan penelaahan secara mendalam dan menyeluruh. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar manajemen pendidikan Islam seperti QS. al-Taubah: 122, QS. al-Nisa: 9, QS. al-Hasyr: 18 dan juga dalam QS. al-Sajdah: 5. Ayat-ayat al-Qur'an ini menunjukkan nilai-nilai manajemen dalam Islam yang lebih memfokuskan pada pemanfaatan dan keteraturan untuk menghasilkan *output* pendidikan yang memuaskan. Maka paradigma ini menunjukkan bahwa pendidikan perlu dikelola dengan baik untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, dan sebaliknya pula jika pendidikan yang tidak di-*manage* secara baik sudah barang tentu akan menghasilkan *ouput* pendidikan yang tidak menentu pula.

Oleh sebab itu, antara pendidikan Islam dan manajemen (pendidikan Islam) adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Artinya, pengumpulan pendidikan Islam di ranah praktis pendidikan memerlukan pola pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan normatif dari pendidikan Islam itu sendiri. Sehingga tujuan manajemen dalam pendidikan Islam tentu tidak lepas dari tujuan pendidikan Islam. Menurut Athiyah al-Abrasyi sebagaimana yang telah dikutip oleh Oemar Muhammad At-Thoumy al-Syabani mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah:¹⁶

¹⁶ Oemar Muhammad at-Thoumy al-Syabany, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 399.

1. Pembentukan akhlak yang mulia.
2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat.
3. Menumbuhkan ruh ilmiah pada pelajaran.
4. Menyiapkan pelajar yang profesional disamping memelihara kerohanian dan keagamaan.
5. Mempersiapkan anak didik untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam di atas.

Apalagi melihat posisi sentral manusia dalam proses pendidikan yang melibatkan potensi fitrah, cita rasa ketuhanan dan hakekat serta wujud manusia menurut pandangan Islam, maka tujuan pendidikan Islam adalah untuk aktualisasi dari potensi-potensi kemanusiaan tersebut. Karena potensi yang ada merupakan nilai-nilai ideal yang dalam wujud implementasinya akan membentuk pribadi manusia secara utuh, sempurna dan mandiri. Bahkan tujuan akhir dari Pendidikan Islam adalah untuk perwujudan penyerahan mutlak kepada Allah, pada tingkat individual, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya.¹⁷ Oleh sebab itu, Islam memandang, kegiatan pendidikan merupakan sistem integral yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia dari aspek eksoteris maupun esoteris.

Dengan demikian, teori pendidikan manapun dalam suatu masyarakat memperoleh konsep dan pengertiannya berdasarkan ideologi atau falsafah yang dominan dalam masyarakat tersebut, apakah merupakan aqidah agama,

¹⁷ Majalah Ummi No. 2/V Zulhijjah 1413 H, Juni 1993 M., 30. Paragraf ini saya kutip dari bab-bab awal buku ini.

atau falsafah idealisme, naturalisme dan lain-lain. Konsep dan pengertian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti peradaban yang dominan, ciri dan tempat ketika ia muncul, tujuan politik dan sosial, sistem sosial dan tahap perekonomian. Dari aspek lain pula, teori pendidikan mencerminkan bentuk yang diinginkan oleh masyarakat bagi anak generasi baru, kebahagiaan yang dicita-citakan, cara yang digunakan untuk mempersiapkan generasi baru itu untuk menjadi anggota yang aktif dalam masyarakat yang bakal terbentuk itu.

Sesuai dengan tujuan pendidikan Islam tersebut dengan berpijak pada pengertian manajemen maka tujuan manajemen dalam pendidikan Islam adalah meningkatkan produktivitas pencapaian hasil yang maksimal dalam pendidikan Islam dalam berbagai aspek, jasmai, rohani, dunia, dan akhirat yang akhirnya mewujudkan sikap kepasrahan kepada Tuhan yang maha Esa (Allah) sebagai bentuk ibadah. Fakta inilah yang kemudian menjadi landasan dari manajemen pendidikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, maupun tujuan jangka panjang.¹⁸ Manajemen pendidikan Islam yang akhirnya merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam untuk masa depan.

Selain landasan normatif dalam manajemen pendidikan Islam tersebut. Ada pula landasan-landasan yang harus

¹⁸ Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: CRSD Press, 2005), 69.

menjadi prinsip dalam manajemen pendidikan Islam seperti yang diungkapkan oleh Azhar Arsyad bahwa prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam adalah: 1). Pembagian kerja; 2). Disiplin; 3). Kesatuan perintah (*unity of command*); 4). Kesatuan arah; 5). Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi; dan 6). Rantai berjenjang dan rentang kendali. Sedangkan Effendi Mochtar menyatakan bahwa prinsip-prinsip atau kaidah manajemen yang ada relevansinya dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar (QS. Ali Imran: 104 dan 110).
2. Prinsip menegakkan kebenaran (QS. al-Isra': 81, Ali Imran: 60).
3. Prinsip menegakkan keadilan (QS. Al-Nisa': 6, dan al-Araf: 29).
4. Amanah (QS. al-Nisa: 58, al-Baqarah: 283, dan Hadits riwayat Muslim).
5. Prinsip mawaddah (QS. Ali Imran: 112, Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).
6. Prinsip keseimbangan antara dunia dan akhirat (*tawazun*) (QS. al-Qashas: 77, dan Hadits riwayat Ibnu Asakir).
7. Prinsip Akhlaqul karimah (QS. al-Baqarah: 148, al-Qashas: 77, dan al-Maidah: 23).¹⁹

Karena sasaran manajemen pendidikan Islam adalah masyarakat-manusia yang diikat bersama oleh ikatan kerja demi mencapai tujuan beragama, maka manajemen pen-

¹⁹ Moehtar Effendi, *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta: Bhatara, 1996), 39-40.

didikan Islam berurusan dengan tabiat manusia dan (sebagaimana kita telah pelajari dan alami dalam kehidupan sehari-hari) dengan kebaikan dan kejahatan. Ini berarti, bahwa manajemen harus berlandaskan nilai-nilai, komitmen, keyakinan, dan bahkan semangat. Tanpa itu semua, tidak akan ada prestasi dan tidak ada hasil. Sesungguhnya, karena manajemen itu berurusan dengan manusia; bukan benda, maka manajemen tanpa nilai, tanpa komitmen dan tanpa keyakinan, hanya akan menghasilkan bencana.

Untuk mewujudkan manusia yang sanggup menghadapi tantangan, peluang dan kendala dalam memasuki kehidupan masa depan, pendidikan Islam memiliki peluang yang amat luas. Hal ini mudah dimengerti karena pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang (*balance*) dalam mempersiapkan anak didik. Yaitu anak didik yang tidak hanya mampu mengembangkan kreatifitas intelektual dan imajinasi secara mandiri, tetapi juga memiliki ketahanan mental spiritual serta mampu beradaptasi dan meresponi problematika yang dihadapinya sesuai dengan kerangka dasar ajaran Islam. Atas dasar ini pula tidaklah mengherankan jika pada saat ini, masyarakat lebih banyak menaruh minatnya untuk mendidik anak-anak pada lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan sesuai dengan ajaran Islam.

Tentunya, siapa pun mengerti bahwa aktivitas manajemen setiap lembaga/organisasi selalu berkaitan dengan usaha-usaha mengembangkan dan memimpin suatu tim kerjasama atau kelompok orang dalam satu kesatuan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Semuanya ini untuk

mencapai tujuan tertentu dalam organisasi yang ditetapkan sebelumnya (*pre determine objective*). Sebagai konsekuensi logis bagi peningkatan mutu manajemen pendidikan Islam adalah perlu dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama menuju pola baru, yaitu manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi²⁰ dan yang lebih demokratis.

Dan semoga catatan epilog dari buku ini dapat bermanfaat dengan tidak mereduksi bentuk pemikiran dari buku yang memberikan tawaran-tawaran baru bagi pengelolaan pendidikan Islam dan juga berisi muatan filosofis bagi pengembangan pendidikan Islam. Terakhir semoga pemikiran dalam buku ini menjadi pijakan untuk pengembangan pendidikan Islam masa depan. []

²⁰ Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak tergantung. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Lihat dalam Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 252.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).
- A. Khozin Afandi (Peterj.), *Pengetahuan Modern dalam Al-Qur'an*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995).
- A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), 1998).
- A.M. Saifuddin, *Desekularisasi Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998).
- A.Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Abd A'la, *Pembaharuan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006).
- Abd. Halim Soebahar, *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002).
- Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

- Abdul Munir Mulkhan, *Makrifat Burung Surga dan Ilmu Kesempurnaan Syekh Siti Jenar*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).
- Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritualis Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002).
- Abdul Munir Mulkhan, *Pemuliaan Kemanusiaan dalam Etika Intelektual Santri*, dalam Abdul Munir Mulkhan, *Rekontruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Abdul Rahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kenca, 2004).
- Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Bandung: Bumi Aksara, 1992).
- Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Ach. Mohyi, *Teori dan Perilaku Organisasi*, Edit.: Trioningsih dan Ratih Juliati, (Malang: UMM, 1991).
- Adam I. Indrawijaya, *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1989).
- Adnin Armas, *Westernisasi dan Islamisasi Ilmu*, Islamia, Thn. II No.6/Juli-September 2005.

- Ahmad Syalabi, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1982).
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
- Ahmad Warid Khan, *Membebaskan Pendidikan Islam*, (Tanpa Kota: Istawa, 2002).
- Ainurrafiq Dawam, "Emoh" Sekolah: Menolak "Komersialisasi Pendidikan" dan "Kanibalisasi Intelektual", Menuju Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003).
- Ali Abdul Adzim, *Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Perspektif Al Qur'an*, Petrej.: Kalilullah Ahmad Masykur Hakim, (Bandung: CV. Rosda, 2000).
- Ali Mudhofir, *Kamus Filsuf Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen Berbasis Al Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- AM. Saefuddin, *Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, (Bandung: Mizan, 1993)
- Aminullah El-Hady, *Pendidikan Berwawasan Islam: Tarbiyah atau Ta'dib (Tinjauan Terhadap Pandangan Naguib Al-Attas)*, dalam Jurnal Al-'Adalah Vol. 4, No. 3, Desember 2001.
- Amir Hamzah Wirosukarto, dkk, KH. Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren Modern, (Ponorogo: Gontor Press, 1996).
- Anthony-Darden-Bedford, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1992).

- Aprilia Fajar Pertiwi, dkk, *Mengembangkan Kecerdasan Emosi*, (Jakarta: Yayasan Aspirasi Pemuda, 1997).
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: CRSD Press, 2005).
- Ary Ginanjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ (Emotional Spiritual Quotient) berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, (Jakarta: Arga, 2001).
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2000).
- Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2002).
- Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Charles J. Keating, *Kepemimpinan: Teori dan Pengembangannya*, Peterj.: A. M. Mangunhadjana, (Yogyakarta: Kanisius, 2003).
- Daniel Goleman, *Emotional Intelligence*, Peterj.: Hermaya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

- Daniel L. Pals, *Dekonstruksi Kebenaran: Kritik Tujuh Teori Agama*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003).
- Daulat P. Tampubolon, *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad Ke-21* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1989).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1991).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jilid 2), (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Dicky Wisnu Ur-Siti Nurhasanah, *Teori Organisasi, Struktur dan Desain*, (Malang: UMM Press, 2005).
- Djamaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- DW. Ariani, *Manajemen Kualitas*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999).
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003).
- E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Menyuksesan MBS dan KBK*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
- Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan Page Educational Management Series, 1993).

- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi, 2009).
- Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, Peterj: Osman Ralibi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999).
- Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).
- George Strauss dan Leonard R. Sayles, *Manajemen Personalia: Segi Manusia dalam Organisasi*, Peterj: Grace M Hadikusuma dan Rochmulyati Hamzah, (Jakarta: Gramedia, 1991).
- Ginnet Hughes and Curphy, *Leadership: Enhancing The Lesson of Experience 4thEd*, (McGraw Hill Irwin, 2002).
- H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000).
- H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, (Magelang: Terra Indonesia, 1999).
- H.D Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan*, (Bandung: Falah Production, 2004).
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).
- Hamzah B. Uno, *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).
- Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983).
- Hasan Abd al-'Ali, *Al-Tarbiyah al-Islamiah fi al-Qur'an al-Rabi' al-Hijri*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t).

- Hasan Asyari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*, (Bandung: Mizan, 1984).
- Hasan Langguglung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988).
- Hasan Muarif Ambari, *Peranan Pesantren dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Banten*, Makalah Simposium Nasional dan Kongres Pemuda Al-Khairiyah se-Indonesia, Serang 1992.
- Herbert, *Total Quality Manajement in Bussiness School*, (Autumn: The Faculty ViewPoint, 1995).
- Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, (Yogyakarta: Sa-firia Insani Press, 2003).
- Husaini Usman, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2004).
- Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Islam*, Peterj: Bahrudin Fannani, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995).
- Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan: Mengurai Benang Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, (Malang: UMM Press, 1997).
- Isma'il Razi al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, (Bandung: Pustaka, 1984).
- J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Peterj.: Kartini Kartono, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).

- Jalaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990).
- Jamaludin Malik, *Pemberdayaan Pesantren, Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).
- James A. F. Stoner, R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert, Jr, *Manajemen*, Peterj.: Alexander Sindoro, (Jakarta: Prenhalindo, 1996).
- Jawahir Tanthowi, *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983).
- Jerome Bruner, *Proses Pendidikan: Upaya Pembenahan Pendidikan*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994).
- Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- John E. Talbott, *Education in Intellectual and Social History*, dalam Felix Gilbert & Stephen R. Graubard, ed. *Historical Studies Today*, (New York: W.W., 1992).
- John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1996).
- John P. Kotter dan James L. Heskett, *Corporate Culture and Performance*, (New York: The Free Press, 1992).
- Juwariyah, *Ibnu Khaldun dan Pemikirannya Tentang Filsafat Pendidikan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004).
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal itu?* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

- Keith Davis, *Human Behaviour at Work: Organizational Behavior, Seventh Edition*, Peterj: Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2004).
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003).
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995).
- Lester D. Crow dan Alice Crow, *Psikologi Pendidikan*, Peterj.: Z. Kasijan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Louis Ma'lûf, *Kamus Munjid*, (Beirut: Dâr al-Mishria, 1986).
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2003).
- M. Arifin, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987).
- M. Misbahus Salam, *NU dan Transformasi Masyarakat Madani*, (Malang: Pustaka Bayan, 2005).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2004).
- M. Sukidi, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Mikraj, 2005).
- M. Zainuddin dan M. In'am Esha (ed.), *Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Upaya Merespon Dinamika Masyarakat Global*, (Malang: UIN Press, 2004).
- M. Zainuddin, *Filsafat Ilmu: Perspektif Pemikiran Islam* (Malang: Bayu Media, 2003).
- M.N. Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Marshall Sashkin dan Kisser, *Putting Total Quality Management to Work*, (San Francisco: Berrett-Kohler Publisher, 1993).
- Mochtar Buchori, *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan dalam Renungan*, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Press, 1994).
- Moehtar Effendi, *Manajemen: Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta: Bhatar, 1996).
- Moh. Shofan, *Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, dalam Logos, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 4, No. 1 Januari 2005.
- Moh. Shofan, *Pendidikan Berparadigma Profetik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004).
- Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
- Mohammed Reza Modarrese, *Syiah dalam Sunnah: Mencari Titik Temu yang Terabaikan*, (Tanpa kota penerbit: Citra, 2005).
- Monty P. Satiadarma dan Fedelis E. Waruwu, *Mendidik Kecerdasan: Pedoman Bagi Orang Tua dan Guru Dalam Mendidik Anak Cerdas*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003).
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993).

- Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, (Bandung: Nuansa Baru, 2003).
- Muhaimin, et.al, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Meng-efektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Meng-efektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- Muhammad A. R., *Pendidikan di Alaf Baru: Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan*, (Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003).
- Muhammad Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun: His Life and Work*, Peterj: Muhammad Qodari Arif, (Jakarta: Ken-cana, 1999).
- Muhammad Ali, *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru, 1992).
- Muhammad Roy, *Ushul Fiq'h Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiq'h*, (Yoyakarta: Safiria Insania Press, 2003).
- Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).
- Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Muslih Usa (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991).

- Muzayin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Umum dan Agama*, (Semarang: Toha Putra, tt.).
- Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).
- Nasution, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, (Bandung: Jemmars, 1986).
- Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1999).
- Neil Postman, *Matinya Pendidikan: Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah*, (Yogyakarta: Jendela, 2002).
- Roem Topa-timasang, *Sekolah Itu Candu*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Intelektual Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007).
- Nur Kholis, *Menguak Tabir Keberhasilan Pendidikan: Sebuah Analisis Multidimensional*, dalam *Tarbiyah*, No.41, Tahun XIII, Januari-Maret 1996.
- Nur Rodjiah Kurmen. *Kedudukan Sunnah dan Fenomena Inkarussunnah*, dalam *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 4, No. 2, Agustus 2001.
- Nurul Huda, *Cakrawala Pembebasan: Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).
- Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).
- Oemar Hamalik, *Sistem dan Prosedur Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan*, (Bandung: Trigenda Karya, 1991).

- Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).
- Peter M. Senge, *The Fifth Discipline*, (Los Angeles: Currency Doubleday, 1994).
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994).
- Richard Denny, *Sukses Memotivasi: Jurus Jitu Meningkatkan Prestasi*, Peterj.: Pius M. Sumaktoyo, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Robert B. Maddux, *Team Building: Terampil Membangun Tim Handal*, Peterj.: Kristiyabudi P. Hananto, (Jakarta: Erlangga, 2001).
- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- Roihan Achwan, *Konstruksi Filosofis Pendidikan Islam*, dalam *Religiusitas Iptek*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 1998).
- Rosnani Hamim, *Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer: Sejarah, Perkembangan, dan Arah Tujuan*, dalam *Islamia*, Thn II No.9/Juli-September 2005.
- Rudi Suardi, *Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2000, Penerapannya untuk Mencapai TQM*, (Jakarta: PPM, 2001).
- S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Saefullah Maksum (Edit.), *Dinamika Pesantren*, (Jakarta: Yayasan Islam al-Hamidiyah, 1998).
- Saiful, *Tujuan Pendidikan Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Muhammad 'Athiyah Al-Abrasyi* (Laporan Penelitian), (Jember: STAIN Jember, 1999).

- Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Sayyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam*, (Cambridge: Harvard University Press, 1968).
- Sayyid Quth'b, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jilid 24), (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Soegabio Admodiwiro, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT Arda Dizya Jaya, 2000).
- Soegarda Purbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1976).
- Soekarto Indrafachrudi, *Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orang Tua Murid dan Masyarakat*, (Malang: IKIP Malang, 1994).
- Sondang P. Siagian, *Teknik Menumbuhkan Dan Mengembangkan Perilaku Organisasional*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987).
- Sri Widayati, *Hakikat Pendidikan*, (laporan Penelitian), (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002).
- Stephen Murgatroyd and Colin Morgan, *Total Quality Management and The School*, (Buckingham-Philadelphia: Open University Press, 1994).
- Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi Konsep Kontroversi Aplikasi*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1996).
- Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Petrej.: Hadyana Pujaatmaka, (Jakarta: Prenhallindo, 1996).

- Stephen P. Robbins, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, Peterj: Halida dan Dewi Sartika, (Jakarta: Erlangga, 2002).
- Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam* (diktat), (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2005).
- Suryadi Poerwanegara, *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002).
- Sutrisno, *Revolusi Pendidikan di Indonesia: Membedah Metode dan Teknik Pendidikan Berbasis Kompetensi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2005).
- Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2002).
- Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2000).
- Taliziduhuh Ndraha, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Tobroni, *The Spiritual Leadership: Pengefektifan Organisasi Noble Industry Melalui Prinsip-Prinsip Spiritual Etis*, (Malang: UMM Press, 2005).
- Tony Bush dan Marianne Coleman, *Manajemen Strategis: Kepemimpinan Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2010).
- Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996).
- Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) Tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

- Williiam A. Haviland, *Antropologi*, Peterj: RG Soekarjo, (Jakarta: Erlangga, 1988).
- Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982).
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Yusuf Qardhawi, *Tuhan Tak Terkuburkan: Sebuah Analisis Relevansi Agama di Era Sains*, (Jakarta Timur: Azan, 2001).
- Zainal Arifin Thoha, *Runtuhnya Singgasana Kiai NU, Pesantren dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usia*, (Yogyakarta: Kutub, 2003).
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

Indeks

A

accountability 103
ahdaf aqliyah 39
ahdaf jismiyah 39
ahdaf ruhiyah 39
al-Attas 20, 87
al-kaun 24, 32
Al-Syifa' 60
al-ulum al-diniyyah 90
Ancien Greece 11
an overall "feeling" 158

B

basic skill 74
brainstorming 204

C

confession 60
Crow 49, 129, 247

D

dekompartementalisasi 73

E

EQ 128, 131, 132, 139

F

force field analysis 204

G

God oriented 8
goodness of product 179
Grace de Raguna 57
grand teory 74

H

historical humanity civilization
12
Human Resources 45

I

IIT 86
IUM 86
intellectual capital x, 43

IQ 128, 130, 131, 132, 139
ISTAC 86

K

knowing the customer 193
kuttab 175, 176, 177

L

learning 44, 68, 69, 72, 74, 150,
211
literacy 168, 169

M

Marxis 26
Medieval 10, 70

N

Newstorm 107

O

Organizational Development
xxxii, 106, 107, 113, 138

P

PDCA 189, 192, 196
planning of learning 69, 72, 74
pre determine objective 238

Q

quality culture 100
quantum x, 43

R

reinventor x, 43
reward 116, 125, 157, 165, 218

S

salary 214, 216
SDM xxv, 17, 107, 200, 225,
229, 232
SQ 128, 131, 132, 139
strategy and goals 204, 205
style of life 17
Syafi'i Ma'arif 78, 82, 239

T

ta'lliim 19
The Conscious of God 73, 75
transfer of values and morality
13

U

Ukhuwah 137

V

Van Peursen 4, 150

W

world view xxii, 3

Z

zhimmi 175

RIWAYAT SINGKAT PENULIS

Abdul Qodir

Lahir di Banjarnegara Jawa Tengah tanggal 03 Pebruari 1956 dari keluarga petani, pasangan Asan Rozikin dan Ninik Saniah. Usai bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah swasta di desanya, Badakarya. Melanjutkan ke Pendidikan Guru Agama (PGA-4 dan 6 tahun), masing-masing di Wanadadi dan Bajanegara tahun 1976. Kuliah Jenjang Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap di Fakultas Tarbiyah. Pendidikan Agama Islam, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 1982. Selain itu, menambah pengetahuan bahasa Inggris di luar kampusnya. Selain belajar bahasa Inggris dan Arab yang diselenggarakan Lembaga Bahasa IAIN Sunan



Kalijaga. Pendidikan Sastra II ditempuh pada Program Studi Evaluasi dan Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2000. Jenjang Strata 3 *By Research* masih dijalani di kampus Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahap penelitian, penulis dan konsultasi.

Tulisannya yang telah dipublikasikannya, antara lain:

- 1.) Urgensi Evaluasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi (Telaah Awal Evaluasi Pembelajaran pada Mahasiswa), Jurnal Pendidikan Pedagogik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya tahun 2009;
- 2) Model Kaderisasi Kepemimpinan Agama dalam pondok pesantren AL-Munnawwir Yogyakarta, jurnal penelitian dan evaluasi pasca sarjana UNY 2000;
- 3) Etos Belajar dan Mengajar Bahasa Inggris di MTS Swasta Palangka Raya (Hasil Penelitian 2009);
- 4) Evaluasi Kinerja Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STAIN Palangka Raya (Hasil Penelitian, 2010);
- 5) Evaluasi Program dan Kinerja Pusat Bahasa STAIN Palangka Raya (Hasil Penelitian, 2010, STAIN Palangka Raya);
- 6) Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan STAIN Palangka Raya (Hasil Penelitian, 2006);
- 7) Kedatangan Islam di Bumi Tambun Bungai (Hasil Penelitian Kelompok, 2005);
- 8) Ide Dasar dan Perjuangan Tokoh Pelaku Sejarah STAIN Palangka Raya (Jurnal Penelitian, 2005);
- 9) Kolerasi Antara Motifasi Belajar Bahasa Inggris dan Prestasi Siswa Dalam UAN (Jurnal Penelitian, 2004);
- 10) Pembaruan System Pendidikan Pesantren Dalam Pembentukan Kemandirian Santri Studi Kasus Pesantren Muhajirin Palangka Raya, (Hasil Penelitian, 2003);
- 11) Pem-

belajaran Bahasa Inggris Pada Non-Jurusan (Jurnal UN Muh. Palangka Raya, 2006, UN Muh. Palangka Raya); 12) *An Error Analysis On Changing Active Voice Into Passive Voice* (Jurnal Himmah Palangka Raya, 2006); 13) Bahasa Internasional, Kebutuhan Intelektual dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran (Anterior Jurnal UN Muh Palangka Raya, 2006, UN Muh Palangka Raya).

Pengalaman organisasi dimulai dari dirinya sebagai anggota HMI di kampus. Menjadi *Nation Volunteer* yang ditempatkan di Kampus Polytechnic State College of Antique, Philippines selama dua tahun. Sebagai pemandu (LO) pada KTT Non-Block tahun 1992 di Jakarta.

Menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Palangka Raya Kalimantan Tengah. Pengabdian masyarakat dimulai dari jabatan Ketua Ranting Muhammadiyah Karanganyar Kabupaten Tegal. Sekertaris Pimpinan Daerah (PDM) Kota Palangka Raya. Dipercaya sebagai Bendahara Pimpinan Wilayah (PWM) Kalimantan Tengah periode tahun 2005 sampai tahun 2010; dan berlanjut pada periode tahun 2010 sampai tahun 2015. []

RIWAYAT SINGKAT EDITOR

Suhari

Keseharian beliau sebagai pengawas TK/SD/SDLB Kecamatan Silo. Lahir pada tanggal 05 Januari 1963 di kota Malang. Pada tahun 1969, beliau memasuki jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Argosuko Malang dan lulus pada tahun 1974. Pada tahun 1975, Hari -demikian ia di sapa- melanjutkan pendidikannya di SMP Wigya Mandala Malang dan lulus pada tahun 1977. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di SPG PGRI Malang dan lulus tahun 1981.



Kemudian Heri mengadu nasib menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu kabupaten di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Jember. Pada tahun 1990, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Strata-1 dan lulus pada tahun 1995. Dan pada 2010, ia melanjutkan lagi ke Strata-2 di Universitas Gresik dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan.

Di sela-sela kesibukannya sebagai pengawas, Bapak dari Yualeni Valensia dan Nicky Anggen ini juga tekun melakukan observasi pendidikan yang hasilnya ia diskusikan dengan teman-teman sejawatnya. Di tahun 2012, suami dari Hermin ini mampu mengedit salah satu buku yang cukup unik di dunianya, yaitu buku Manajemen dan Pendidikan Islam yang ada di tangan pembaca ini. []